



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025



MOCH. MAESYAL RASYID
BUPATI TANGERANG



INTAN NURUL HIKMAH
WAKIL BUPATI TANGERANG

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**



H. MOCH. MAESYAL RASYID
BUPATI TANGERANG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Banten selaku Wakil Pemerintah Pusat. Pada Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.7/989/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran/potret yang menjadi raport Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara garis besar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terdiri atas Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Capaian Kinerja Tugas Pembantuan, dan Capaian Standar Pelayanan Minimal.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang melalui One Team, One Spirit, One Goal.

Tigaraksa, 31 Maret 2026
BUPATI TANGERANG

H. MOCHA MAESYAL RASYID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR GRAFIK.....	X
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1 Latar Belakang.....	1
1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	5
c. Jumlah Penduduk.....	15
d. Jumlah Kecamatan.....	19
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	25
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	35
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	37
g. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	37
h. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	89
i. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	95
j. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	138
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	183
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENEYELNGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	 190
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	190

2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	194
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	208
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....		333
BAB IV PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....		334
4.1	Urusan Pendidikan.....	334
4.1.1	Jenis Pelayanan dasar.....	334
4.1.2	Target Pencapaian	334
4.1.3	Realisasi.....	335
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	339
4.1.5	Dukungan Personil.....	340
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	341
4.2	Urusan Kesehatan.....	343
4.2.1	Jenis Pelayanan dasar.....	343
4.2.2	Target Pencapaian	344
4.2.3	Realisasi.....	345
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	368
4.2.5	Dukungan Personil.....	368
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	369
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	371
4.3.1	Jenis Pelayanan dasar.....	371
4.3.2	Target Pencapaian	371
4.3.3	Realisasi.....	372
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	377
4.3.5	Dukungan Personil.....	378
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	378

4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	380
4.4.1	Jenis Pelayanan dasar.....	380
4.4.2	Target Pencapaian	381
4.4.3	Realisasi.....	382
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	386
4.4.5	Dukungan Personil.....	387
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	387
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	390
4.5.1	Jenis Pelayanan dasar.....	390
4.5.2	Target Pencapaian	391
4.5.3	Realisasi.....	392
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	409
4.5.5	Dukungan Personil.....	411
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	413
4.6	Urusan Sosial.....	418
4.6.1	Jenis Pelayanan dasar.....	418
4.6.2	Target Pencapaian.....	419
4.6.3	Realisasi.....	420
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	429
4.6.5	Dukungan Personil.....	430
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	431
4.7	Program dan Kegiatan.....	431
BAB V	PENUTUP.....	474

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Sub Wilayah Administratif di Kabupaten Tangerang Tahun 2025	6
2	Tabel 1.2	Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tangerang	9
3	Tabel 1.3	Curah Hujan per Bulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	11
4	Tabel 1.4	Luas dan Sebaran DAS Kabupaten Tangerang Bagian Selatan	12
5	Tabel 1.5	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang	13
6	Tabel 1.6	Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2025	14
7	Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang	15
8	Tabel 1.8	Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan Tahun 2025	16
9	Tabel 1.9	Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tangerang	19
10	Tabel 1.10	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	26
11	Tabel 1.11	Jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	33
12	Tabel 1.12	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025	35
13	Tabel 1.13	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek	37
14	Tabel 1.14	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum Per Urusan Pemerintahan Daerah	38
15	Tabel 1.15	Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	77
16	Tabel 1.16	Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026	96

17	Tabel 1.17	Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Murni)	138
18	Tabel 1.18	Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2020-2025	185
19	Tabel 2.1	Pendapatan per kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	192
20	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Makro di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dan 2025	194
21	Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci	195
22	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	209
23	Tabel 2.5	Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	212
24	Tabel 2.6	Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024	215
25	Tabel 2.7	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	219
26	Tabel 2.8	Pembentukan Wira Usaha Baru	267
27	Tabel 2.9	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten	321
28	Tabel 2.10	Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025	324
29	Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	334
30	Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	335
31	Tabel 4.3	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan	339
32	Tabel 4.4	Dukungan Personil Urusan Pendidikan	340
33	Tabel 4.5	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan	341
34	Tabel 4.6	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	344
35	Tabel 4.7	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	345
36	Tabel 4.8	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan	368

37	Tabel 4.9	Dukungan Personil Urusan Kesehatan	368
38	Tabel 4.10	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan	369
39	Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	371
40	Tabel 4.12	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	372
41	Tabel 4.13	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum	377
42	Tabel 4.14	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum	378
43	Tabel 4.15	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum	378
44	Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	381
45	Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	382
46	Tabel 4.18	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat	386
47	Tabel 4.19	Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat	387
48	Tabel 4.20	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat	387
49	Tabel 4.21	Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	391
50	Tabel 4.22	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	392
51	Tabel 4.23	Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Sub Urusan Trantibum	409
52	Tabel 4.24	Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Sub Urusan Bencana dan Kebakaran	410
53	Tabel 4.25	Perhitungan Kebutuhan Personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang	411

54	Tabel 4.26	Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	413
55	Tabel 4.27	Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	415
56	Tabel 4.28	Permasalahan dan Solusi Urusan Bencana dan Kebakaran	416
57	Tabel 4.29	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial	419
58	Tabel 4.30	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial	420
59	Tabel 4.31	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial	429
60	Tabel 4.32	Jumlah ASN Dinas Sosial	430
61	Tabel 4.33	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial	431
62	Tabel 4.34	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	432
63	Tabel 4.35	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	449
64	Tabel 4.36	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	451
65	Tabel 4.37	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	458
66	Tabel 4.38	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	461
67	Tabel 4.39	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	472

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang	7
2	Gambar 1.2	Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang	8
3	Gambar 1.3	Peta Jenis Tanah Hujan Kabupaten Tangerang	10
4	Gambar 1.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang Bagian Selatan	11
5	Gambar 1.5	Peta DAS Kabupaten Tangerang	12
6	Gambar 1.6	Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 (dalam jiwa)	17
7	Gambar 1.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025	18

DAFTAR GRAFIK

1	Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	190
2	Grafik 2.2	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2025 Kabupaten Tangerang	191
3	Grafik 2.3	Perkembangan Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	191
4	Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	192
5	Grafik 2.5	Pendapatan per kapita per tahun Tahun 2021-2025	193
6	Grafik 2.6	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Tahun 2021-2025	193

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh Agresi Militer Belanda pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.

Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda.

Prasasti yang tertera di tugu tersebut ditulis dalam huruf Arab "gundul" berbahasa Jawa kuno yang berbunyi "Bismillah pget Inkgang Gusti/Diningsun juput parenah kala Sabtu/Ping Gangsal Sapar Tahun Wau/Rengsenan perang netek Nangaran/Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian/Sakabeh Angraksa Sitingsun Parahyang". Yang berarti "Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa/Dari Kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu/Tanggal 5 Sapar Tahun Wau/Sesudah perang kita memancangkan tugu/untuk mempertahankan batas Timur Cipamugas (Cisadane) dan Barat Cidurian/Semua menjaga tanah kaum Parahyang. Sebutan "Tangeran" yang berarti "tanda" itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal sekarang ini.

Dikisahkan, bahwa kemudian pemerintahan "Tiga Maulana", "Tiga Pimpinan" atau "Tilu Tanglu" tersebut tumbang pada tahun 1684, seiring dengan dibuatnya perjanjian antara Pasukan Belanda dengan Kesultanan Banten pada 17 April 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan Penjajah Belanda. Kemudian, Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati.

Para bupati yang pernah memimpin Kabupaten Tangerang di era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682-1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.

Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tidak mampu lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia, yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu usaha pertahanannya, terutama sejak kekalahan armadanya di dekat Mid-Way dan Kepulauan Solomon.

Menurut cerita legenda setempat yang telah menjadi pengetahuan masyarakat Tangerang, nama daerah Tangerang berasal dari dua kosa kata atau bahasa setempat, atau lokasi yang berbentuk tugu dari kayu bambu atau tembok. Perang berarti perang, peperangan, pertempuran. Jadi Tangerang mempunyai arti tugu, batas pertempuran, tugu tersebut lazimnya oleh masyarakat disebut benteng atau batas daerah, wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten di sebelah sungai. Wilayah yang dikuasai Kompeni Belanda di sebelah timur Sungai Cisadane.

Sesungguhnya penduduk Tangerang dan Jakarta dahulu lebih mengenal Tangerang dengan sebutan Benteng dari pada istilah Tangerang untuk nama daerah Tangerang sekarang ini, walaupun berdasarkan sumber yang tidak otentik. Sedangkan istilah Tangerang sebagai nama daerah baru dikenal masyarakat luas sekitar tahun 1712 (Thohirruddin, 1971:22 dalam Web Terpadu Kabupaten Tangerang).

Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, diantaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M.

Atik Soeari dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera.

Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota.

Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang azas pemerintahannya militer.

Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, disertai tugas untuk mem-bentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu.

Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Ma-dura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (walikota) dan Kenco (bupati). Secara hierarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa).

Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta.

Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal; pertama, kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kota praja), dan kedua, pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.

Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya: "Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi

1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka diper-makloemkan seperti di bawah ini: Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken. Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken. Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan.

Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944).

Kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Djawa Barat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010), Kabupaten Tangerang masuk menjadi bagian Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988- 1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984).

Berdasarkan kronologis sejarah di atas, maka hari jadi Kabupaten Tangerang diperingati setiap 27 Desember. Hal ini berdasarkan pada Perda Nomor 18 Tahun 1984, yang menetapkan hari lahir Tangerang

jatuh pada tanggal 27 Desember 1943, yang didasarkan pada pemberian kekuasaan Pemerintah Pendudukan Jepang kepada Bupati Tangerang saat itu.

Namun berdasarkan fakta sejarah serta hasil diskusi yang dilakukan sejumlah budayawan, akademi, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang, diyakini Kabupaten Tangerang telah jauh berdiri sebelum Republik Indonesia lahir. Tidak hanya diteliti, dilakukan juga perbandingan dan kolaborasi data dengan berbagai data sejarah dari Banten, Sumedang, dan Belanda, sebagai bukti otentik lainnya yang mana isi data saling sinkron, menguatkan, dan saling melengkapi. Bukti sejarah yang ada di dalam negeri yang digunakan sebagai pegangan adalah naskah tulisan tangan atau manuskrip yang dimiliki keluarga keturunan salah satu pendiri Tangerang, Raden Aria Wangsakara. Manuskrip itu terhimpun dalam buku *Pari rimbon Ka-Aria-an Parahyang* tahun 1830 Masehi yang disusun oleh Bale Adat Kaum Parahyang, semacam Dinas Arsip di masa pemerintahan terdahulu. Berdasarkan fakta ini, Pemkab Tangerang menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang, yang menetapkan Hari Jadi Kabupaten Tangerang jatuh pada 13 Oktober 1632, bertepatan saat Sultan Banten memberikan perintah kepada tiga bangsawan untuk membuka wilayah baru tersebut.

b. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 1.034,54 km persegi (sumber data : Tangerang Dalam Angka Tahun 2026). Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dengan 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kecamatan yang memiliki area dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Tigaraksa dengan luas wilayah sebesar 55,30 Km persegi atau 5,35% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas wilayah 19,22 Km persegi atau 1,86% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.1.

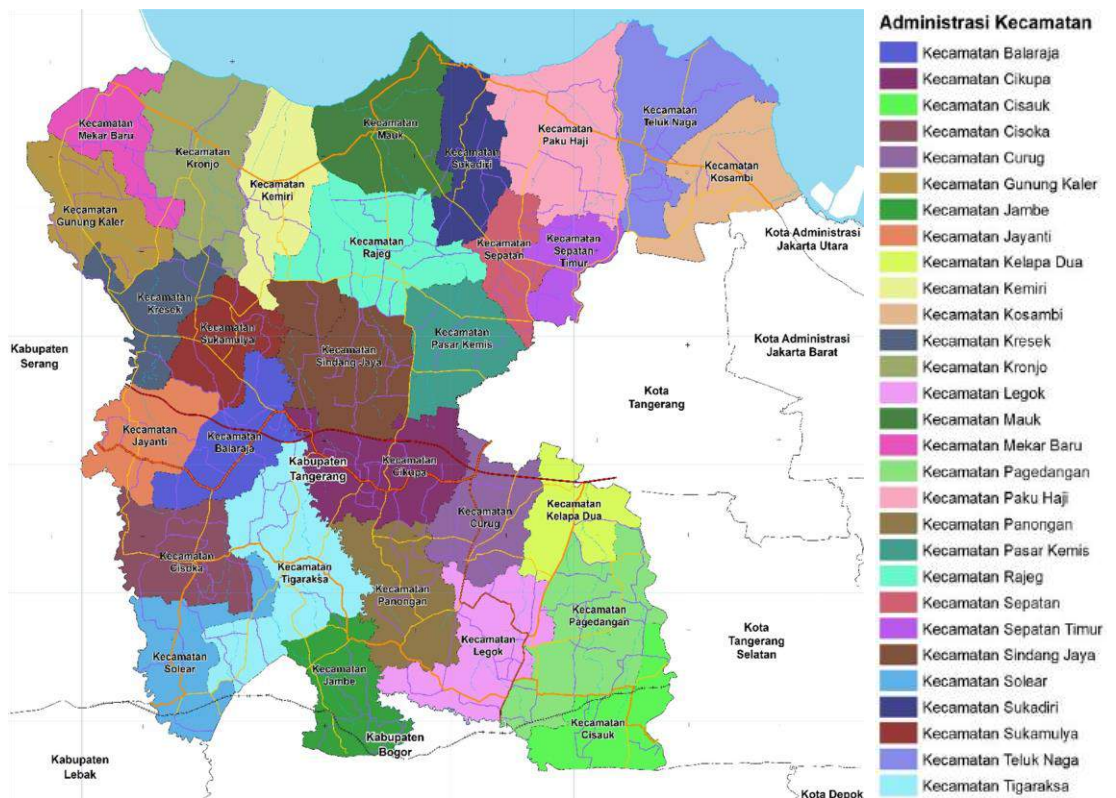
Sementara itu, jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Sub Wilayah Administratif di
Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Cisoka	Cisoka	31,21
Solear	Solear	34,07
Tigaraksa	Tigaraksa	55,30
Jambe	Tiparaya	28,25
Cikupa	Budimulya	46,00
Panongan	Panongan	36,15
Curug	Cukanggalih	30,83
Kelapa Dua	Curug Sangereng	26,22
Legok	Caringin	37,28
Pagedangan	Pagedangan	50,75
Cisauk	Sampora	30,05
Pasarkemis	Sukamantri	30,73
Sindang Jaya	Sindang Asih	41,39
Balaraja	Talagasari	32,30
Jayanti	Cikande	24,88
Sukamulya	Sukamulya	25,44
Kresek	Kresek	29,99
Gunung Kaler	Gunung Kaler	32,77
Kronjo	Pagedangan Ilir	46,51
Mekar Baru	Mekar Baru	25,78
Mauk	Mauk Timur	44,94
Kemiri	Kemiri	33,45
Sukadiri	Rawa Kidang	24,99
Rajeg	Mekar Sari	53,30
Sepatan	Sepatan	19,22
Sepatan Timur	Kedaung Barat	19,66
Paku haji	Buaran Bambu	54,55
Teluknaga	Kampung Melayu Timur	52,41
Kosambi	Selebaran Jaya	36,09
Kabupaten Tangerang <i>Tangerang Regency</i>	Tigaraksa	1.034,54

Sumber : Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2026, 2026

Gambar 1.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang



Sumber : Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2025

Kabupaten Tangerang ditinjau secara geografis berada di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan dan mempunyai garis pantai sepanjang 54 km. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ± 54 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, yang memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 54 km. Ketinggian wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut. Secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Dataran rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0 – 25

meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, Sepatan, dan Sepatan Timur; dan (2). Dataran tinggi di bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian antara 25 – 85 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0 - 8 % menurun ke utara.

Struktur batuan yang terbentuk di Kabupaten Tangerang adalah 1. Alluvium, terdiri dari lempung, kerikil, kerakal. dan (2) Tuf Banten (Banten Tuff), terdiri dari batu apung dan batu pasir tuffan.

Gambar 1.2
Kondisi Geologi Kabupaten Tangerang



Kabupaten Tangerang bagian utara merupakan yang sedikit bergelombang lemah. Daerah ini termasuk dalam kategori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budi daya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di

daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit padosolic yaitu asosiasinya.

Jika dilihat dari teksturnya, tekstur tanah adalah komposisi fraksi pasir, debu, dan tanah liat pada agregat (massa) tanah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah yaitu: halus, sedang, dan kasar.

Tanah memiliki banyak jenis karena perbedaan proses pembentukan dan unsur yang terdapat di dalamnya juga berbeda. Berdasarkan data dan informasi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, jenis tanah di Kabupaten Tangerang rata-rata didominasi oleh jenis tanah Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Paluosol dengan luas sebesar 30.363,83 ha.

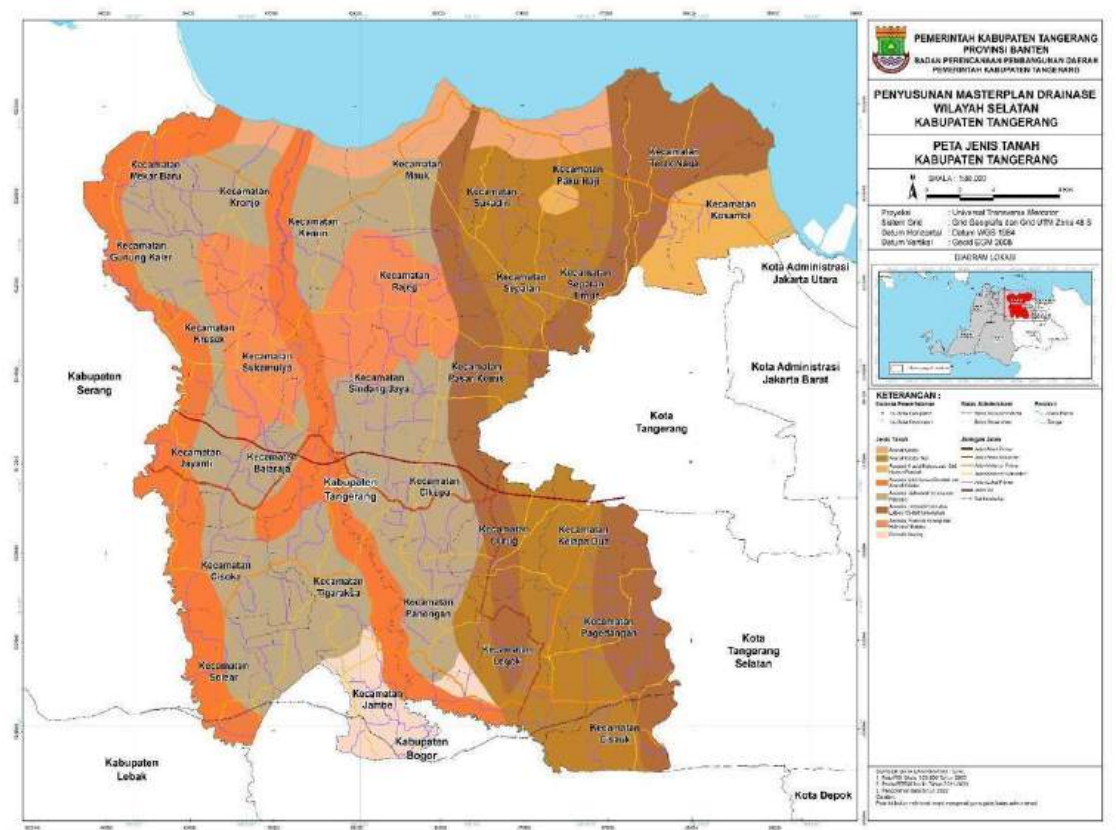
Luas dan sebaran jenis tanah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. 2
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tangerang

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial Kelabu	4.411,22
2	Aluvial Kelabu Tua	17.871,50
3	Asosiasi Aluvial Kelabu dan Gleis Humus Rendah	3.880,58
4	Asosiasi Gleis Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	16.043,44
5	Asosiasi Hidromorf Kelabu dan Paluosol	30.363,83
6	Asosiasi Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	18.221,99
7	Asosiasi Podsolik Kuning dan Hidromorf Kelabu	9.576,04
8	Podsolik Kuning	2.875,57
Total Luas		103.244,18

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Gambar 1.3



Menurut BMKG (2025), Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter.

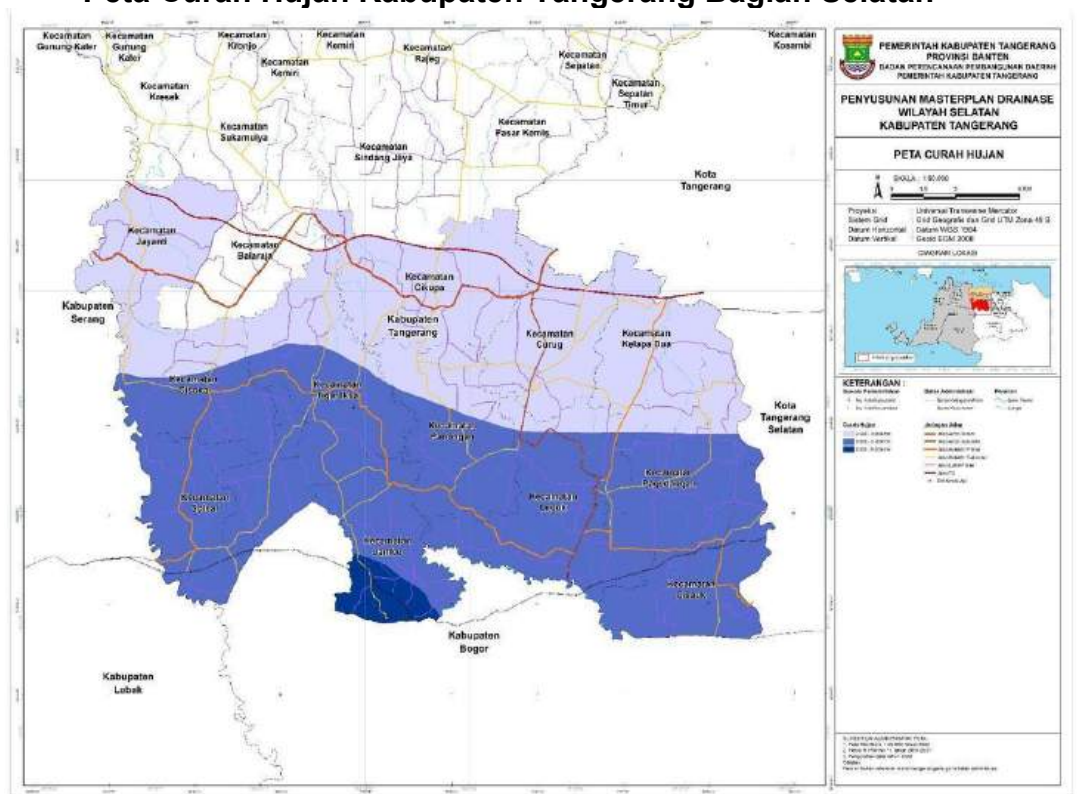
Berdasarkan data dan informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Pondok Betung, rata-rata jumlah curah hujan per-bulan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 222,06 mm dengan rata-rata jumlah hari sebesar 25 hari, sedangkan jumlah curah hujan tahunan Kabupaten Tangerang bagian selatan sebesar 2.500 - 3.000 mm dan 3.000 - 3.500 mm. untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.3
Curah Hujan per Bulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
Januari	322,60	21
Februari	161	19
Maret	149,50	23
April	483,60	27
Mei	102,60	14
Juni	123,40	15
Juli	88,70	28
Agustus	234,80	31
September	76,50	30
Oktober	60,10	31
November	613	30
Desember	208,90	31

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi dalam Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2025

Gambar 1.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Tangerang Bagian Selatan



Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di

beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah.

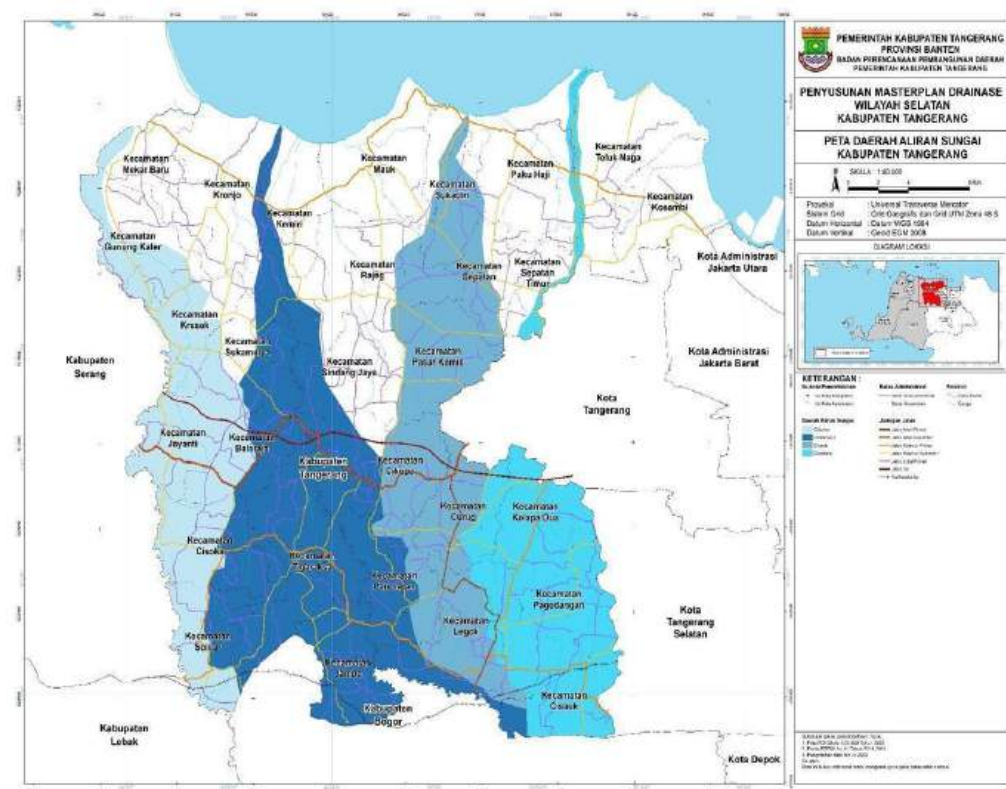
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. Kabupaten Tangerang terdapat 4 Daerah Aliran Sungai, dengan total luas seluas 64.016,14 ha.

Tabel 1.4
Luas dan Sebaran DAS Kabupaten Tangerang Bagian Selatan

No	DAS	Luas (Ha)
1	Cidurian	12.683,78
2	Cimanceuri	22.978,16
3	Cirarab	15.568,15
4	Cisadane	12.786,05
Total Luas		64.016,14

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Gambar 1.5
Peta DAS Kabupaten Tangerang



Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pasal (1) menyebutkan bahwa Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Sedang pada pasal 1 ayat (6), disebutkan: Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai terpanjang di Kabupaten Tangerang yaitu Sungai Cimanceuri dengan panjang sungai 69,09 km.

Nama dan panjang Sungai Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 1.5
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang

No	Nama Sungai	Panjang		No	Nama Sungai	Panjang	
		Meter	Kilometer			Meter	Kilometer
1	Ci Apus	4.398,68	4,4	23	Ci Pasilian	14.989,00	14,99
2	Ci Asin	8.352,70	8,35	24	Ci Payauen	25.979,68	25,98
3	Ci Barebeg	11.082,47	11,08	25	Ci Rajeun	9.746,30	9,75
4	Ci Biuk (Cilaku)	19.022,32	19,02	26	Ci Rangon	9.995,44	10
5	Ci Bolang	2.740,00	2,74	27	Ci Rarab	9.338,65	9,34
6	Ci Bugel	5.383,19	5,38	28	Ci Rumpak	3.141,77	3,14
7	Ci Calengka	5.665,02	5,67	29	Ci Sabi	16.288,51	16,29
8	Ci Cayur	17.593,12	17,59	30	Ci Sauk	9.405,77	9,41

No	Nama Sungai	Panjang		No	Nama Sungai	Panjang	
		Meter	Kilometer			Meter	Kilometer
9	Ci Conteng	3.239,67	3,24	31	Ci Slatip	4.573,85	4,57
10	Ci Garukgak	11.149,60	11,15	32	Ci Soge	16.879,87	16,88
11	Ci Jantra	7.152,19	7,15	33	Ci Tuis	4.739,52	4,74
12	Ci Kakalen	8.318,01	8,32	34	Kali Kramat	9.395,94	9,4
13	Ci Kolear	9.484,69	9,48	35	Kali Apung	5.985,33	5,99
14	Ci Leuleus	6.261,43	6,26	36	Kali Asin	7.666,24	7,67
15	Ci Longo	4.499,33	4,5	37	Kali Ketapang	5.218,47	5,22
16	Ci Longok	14.940,32	14,94	38	Kali Perancis	10.597,04	10,6
17	Ci Lowong	5.872,08	5,87	39	S. Cidurian	3.746,69	3,75
18	Ci Manaauh	9.061,90	9,06	40	S. Cimanceuri	69.091,40	69,09
19	Ci Manceuri	17.526,77	17,53	41	S. Cirarab	49.657,11	49,66
20	Ci Matuk	8.063,33	8,06	42	S. Cisadane	40.794,53	40,79
21	Ci Mauk	9.365,46	9,37	43	Sungai Tahang	10.834,21	10,83
22	Ci Odeng	2.215,72	2,22	44	Terusan Apung	21.346,44	21,35
					Total Panjang	50.799,75	550,8

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 19,70 – 37,30 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 37,30 0C dan suhu minimum terendah pada bulan Juli yaitu 19,70 0C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 82% dan 27,36%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 222,05 mm. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.6.

Tabel 1.6
Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Uraian Data	Nilai	Satuan
Iklim		
a. Rata-rata Temperatur Udara	26,97°	°C
b. Rata-rata Kelembaban Udara	82,39	%
c. Rata-rata Kecepatan Angin	3,83	Knot
d. Rata-rata Curah Hujan	237,92	Mm/tahun

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2026, 2026

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2025 yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebanyak 3.567.531 orang terdiri dari 1.814.357 orang laki-laki dan 1.753.174 orang perempuan.

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang

NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BALARAJA	67.500	65.128	132.628
2	JAYANTI	38.124	36.774	74.898
3	TIGARAKSA	89.227	86.815	176.042
4	JAMBE	31.025	29.843	60.868
5	CISOKA	56.000	52.519	107.519
6	KRESEK	39.039	37.620	76.659
7	KRONJO	35.467	34.984	70.451
8	MAUK	49.561	47.322	96.883
9	KEMIRI	28.213	27.155	55.368
10	SUKADIRI	36.421	34.935	71.356
11	RAJEG	108.706	103.666	212.372
12	PASAR KEMIS	136.390	131.949	267.339
13	TELUKNAGA	92.399	88.657	181.056
14	KOSAMBI	60.765	58.748	119.513
15	PAKUHAJI	70.560	66.681	137.241
16	SEPATAN	62.146	59.233	121.379
17	CURUG	95.155	93.517	188.672
18	CIKUPA	110.824	106.813	217.637
19	PANONGAN	71.738	69.367	141.105
20	LEGOK	68.437	65.665	134.102
21	PAGEDANGAN	62.749	61.261	124.010
22	CISAUK	51.233	50.059	101.292
23	SUKAMULYA	39.948	38.994	78.942
24	KELAPA DUA	87.942	88.914	176.856
25	SINDANG JAYA	53.014	51.240	104.254
26	SEPATAN TIMUR	59.427	55.681	115.108
27	SOLEAR	58.811	55.612	114.423
28	GUNUNG KALER	30.976	30.158	61.134
29	MEKAR BARU	24.560	23.864	48.424

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Rasio jenis kelamin berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk	Rasio Jenis kelamin
1	BALARAJA	67,500	65,128	132,628	3.72	103.7
2	JAYANTI	38,124	36,774	74,898	2.10	103.9
3	TIGARAKSA	89,227	86,815	176,042	4.93	102.9
4	JAMBE	31,025	29,843	60,868	1.71	104.2
5	CISOKA	55,000	52,519	107,519	3.01	104.9
6	KRESEK	39,039	37,620	76,659	2.15	103.5
7	KRONJO	35,467	34,984	70,451	1.97	101.3
8	MAUK	49,561	47,322	96,883	2.72	104.8
9	KEMIRI	49,561	47,322	96,883	2.72	104.8
10	SUKADIRI	36,421	34,935	71,356	2.00	104.6
11	RAJEG	108,706	103,666	212,372	5.95	104.9
12	PASAR KEMIS	135,390	131,949	267,339	7.49	102.6
13	TELUKNAGA	92,399	88,657	181,056	5.08	104.2
14	KOSAMBI	60,765	58,748	119,513	3.35	103.4
15	PAKUHAJI	70,560	66,681	137,241	3.85	106
16	SEPATAN	62,146	59,233	121,379	3.40	105.1
17	CURUG	95,155	93,517	188,672	5.29	102
18	CIKUPA	110,824	106,813	217,637	6.10	104
19	PANONGAN	71,738	69,367	141,105	3.96	103.6
20	LEGOK	68,437	65,665	134,102	3.76	104.4
21	PEGDANGAN	62,749	61,261	124,010	3.48	102.6
22	CISAUK	51,233	50,059	101,292	2.84	102.8
23	SUKAMULYA	39,948	38,994	78,942	2.21	102.2
24	KELAPA DUA	87,942	88,914	176,856	4.96	99.1
25	SINDANG JAYA	53,014	51,240	104,254	2.92	103.4
26	SEPATAN TIMUR	59,427	55,681	115,108	3.23	106.6
27	SOLEAR	58,811	55,612	114,423	3.21	105.8
28	GUNUNG KALER	30,976	30,158	61,134	1.71	102.6
29	MEKAR BARU	24,560	23,864	48,424	1.36	103

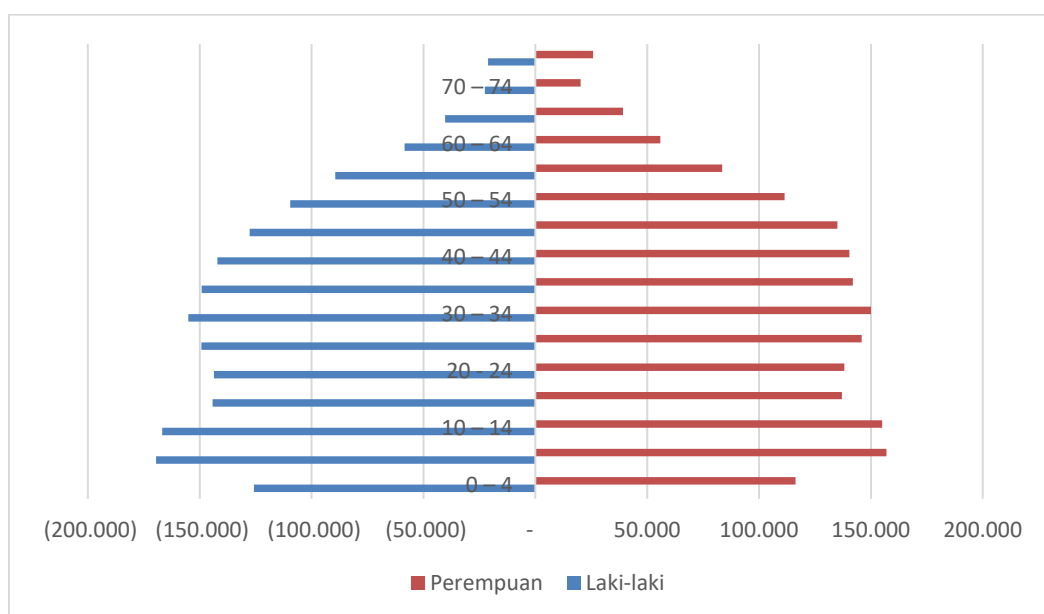
Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2026, 2026 (data diolah)

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah 103,48, sedangkan tahun 2024 adalah 103,59. Sex ratio 103.48 yang berarti terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Sepatan Timur yakni sebesar 106,73 dan yang

terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 98,91.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 5-9 tahun yaitu sebesar 326.476 jiwa naik dari tahun 2024 yang sebanyak 320.725 jiwa, usia 5-9 tahun merupakan usia anak balita dengan Pendidikan PAUD/TK serta usia anak kelas 3 Sekolah Dasar. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 46.935 jiwa naik dari tahun 2024 yang sebesar 37.154 jiwa, usia lanjut usia ini didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 25.865 jiwa naik dari tahun 2024 yang sebanyak 20.308 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.6.

Gambar 1.6
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2025 (dalam jiwa)

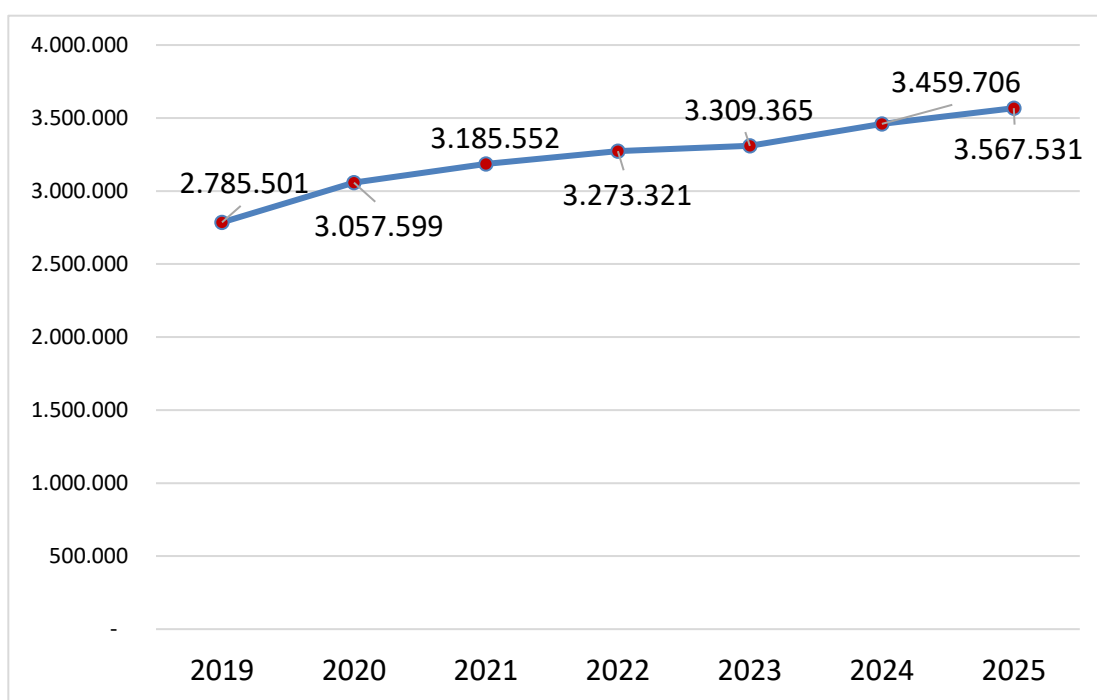


Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2025 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini

menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus meningkat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Gambar 1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025



d. Jumlah Kecamatan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang sebanyak 29 kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 246 desa dan 28 kelurahan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9

Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tangerang

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	36.03.01	BALARAJA						
			1	36.03.01.1001	Balaraja			
						1	36.03.01.2003	Cangkudu
						2	36.03.01.2005	Talagasari
						3	36.03.01.2009	Tobat
						4	36.03.01.2010	Sentul
						5	36.03.01.2011	Gembong
						6	36.03.01.2013	Sukamurni
						7	36.03.01.2014	Saga
						8	36.03.01.2016	Sentul Jaya
2	36.03.02	JAYANTI						
						1	36.03.02.2001	Pangkat
						2	36.03.02.2002	Pabuaran
						3	36.03.02.2004	Pasir Muncang
						4	36.03.02.2005	Sumur Bandung
						5	36.03.02.2006	Jayanti
						6	36.03.02.2007	Dangdeur
						7	36.03.02.2008	Cikande
						8	36.03.02.2009	Pasir Gintung
3	36.03.03	TIGARAKSA						
			1	36.03.03.1001	Tigaraksa			
						1	36.03.03.2002	Pasir Bolang
						2	36.03.03.2003	Matagara
						3	36.03.03.2004	Pasir Nangka
						4	36.03.03.2005	Pete
						5	36.03.03.2006	Tegal Sari
			2	36.03.03.1007	Kadu Agung			
						6	36.03.03.2008	Pematang
						7	36.03.03.2009	Cisereh
						8	36.03.03.2010	Margasari
						9	36.03.03.2011	Cileles
						10	36.03.03.2012	Sodong
						11	36.03.03.2013	Tapos
						12	36.03.03.2014	Bantar Panjang
4	36.03.04	JAMBE						
						1	36.03.04.2001	Sukamanah
						2	36.03.04.2002	Jambe
						3	36.03.04.2003	Tipar Jaya

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						4	36.03.04.2004	Tamban
						5	36.03.04.2005	Daru
						6	36.03.04.2006	Kutruk
						7	36.03.04.2007	Ranca Buaya
						8	36.03.04.2008	Mekar Sari
						9	36.03.04.2009	Ancol Pasir
						10	36.03.04.2010	Pasir Barat
5	36.03.05	CISOKA						
						1	36.03.05.2001	Cisoka
						2	36.03.05.2002	Caringin
						3	36.03.05.2003	Selapajang
						4	36.03.05.2004	Suka Tani
						5	36.03.05.2006	Bojong Loa
						6	36.03.05.2007	Cibugel
						7	36.03.05.2008	Cempaka
						8	36.03.05.2009	Carenang
						9	36.03.05.2014	Karang Harja
						10	36.03.05.2017	Jeungjing
6	36.03.06	KRESEK						
						1	36.03.06.2001	Pasir Ampo
						2	36.03.06.2003	Ranca Ilat
						3	36.03.06.2007	Kemuning
						4	36.03.06.2009	Renged
						5	36.03.06.2011	Talok
						6	36.03.06.2013	Koper
						7	36.03.06.2014	Jengkol
						8	36.03.06.2015	Patrasana
						9	36.03.06.2018	Kresek
7	36.03.07	KRONJO						
						1	36.03.07.2001	Kronjo
						2	36.03.07.2002	Pagenjahan
						3	36.03.07.2006	Pasir
						4	36.03.07.2007	Muncung
						5	36.03.07.2008	Pagedangan Ilir
						6	36.03.07.2009	Pagedangan Udik
						7	36.03.07.2010	Pasilian
						8	36.03.07.2013	Bakung
						9	36.03.07.2015	Blukbuk
						10	36.03.07.2017	Cirumpak
8	36.03.08	MAUK						
						1	36.03.08.2001	Mauk Barat
			1	36.03.08.1002	Mauk Timur			
						2	36.03.08.2003	Tegal Kunir Kidul
						3	36.03.08.2004	Tegal Kunir Lor
						4	36.03.08.2005	Sasak
						5	36.03.08.2006	Gunung Sari
						6	36.03.08.2007	Kedung Dalem

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						7	36.03.08.2008	Marga Mulya
						8	36.03.08.2009	Tanjung Anom
						9	36.03.08.2010	Jati Waringin
						10	36.03.08.2011	Banyu Asih
						11	36.03.08.2012	Ketapang
9	36.03.09	KEMIRI						
						1	36.03.09.2001	Patra Manggala
						2	36.03.09.2002	Karang Anyar
						3	36.03.09.2003	Lontar
						4	36.03.09.2004	Kemiri
						5	36.03.09.2005	Ranca Labuh
						6	36.03.09.2006	Klebet
						7	36.03.09.2007	Legok Suka Maju
10	36.03.10	SUKADIRI						
						1	36.03.10.2001	Sukadiri
						2	36.03.10.2002	Buaran Jati
						3	36.03.10.2003	Rawa Kidang
						4	36.03.10.2004	Pekayon
						5	36.03.10.2005	Karang Serang
						6	36.03.10.2006	Kosambi
						7	36.03.10.2007	Mekar Kondang
						8	36.03.10.2008	Gintung
11	36.03.11	RAJEG						
						1	36.03.11.2001	Rajeg
						2	36.03.11.2002	Rajeg Mulya
						3	36.03.11.2003	Pangarengan
						4	36.03.11.2005	Jambu Karya
						5	36.03.11.2006	Lembang Sari
						6	36.03.11.2007	Sukamanah
						7	36.03.11.2008	Tanjakan
						8	36.03.11.2009	Tanjakan Mekar
			1	36.03.11.1010	Sukatani			
						9	36.03.11.2011	Sukasari
						10	36.03.11.2012	Ranca Bango
						11	36.03.11.2013	Daon
						12	36.03.11.2014	Mekarsari
12	36.03.12	PASAR KEMIS						
						1	36.03.12.2001	Pasar Kemis
			1	36.03.12.1005	Sindang Sari			
						2	36.03.12.2008	Sukamantri
			2	36.03.12.1010	Kutabumi			
						3	36.03.12.2011	Pangadegan
			3	36.03.12.1012	Kutajaya			
						4	36.03.12.2013	Gelamjaya
			4	36.03.12.1014	Kutabaru			
						5	36.03.12.2015	Suka Asih
13	36.03.13	TELUKNAGA						

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1	36.03.13.2001	Teluknaga
						2	36.03.13.2002	Bojong Renged
						3	36.03.13.2003	Babakan Asem
						4	36.03.13.2004	Keboncau
						5	36.03.13.2005	Pangkalan
						6	36.03.13.2006	Kampung Melayu Timur
						7	36.03.13.2007	Kampung Melayu Barat
						8	36.03.13.2008	Muara
						9	36.03.13.2009	Lemo
						10	36.03.13.2010	Tanjung Pasir
						11	36.03.13.2011	Tegal Angus
						12	36.03.13.2012	Tanjung Burung
						13	36.03.13.2013	Kampung Besar
14	36.03.14	KOSAMBI						
			1	36.03.14.1001	Kosambi Barat			
						1	36.03.14.2002	Kosambi Timur
			2	36.03.14.1003	Salembaran Jaya			
						2	36.03.14.2004	Salembaran Jati
						3	36.03.14.2005	Rawa Rengas
						4	36.03.14.2006	Rawa Burung
						5	36.03.14.2007	Cengklong
						6	36.03.14.2008	Belimbing
						7	36.03.14.2009	Jati Mulya
			3		Dadap		36.03.14.1010	
15	36.03.15	PAKUHAJI						
			1	36.03.15.1001	Pakuhaji			
						2	36.03.15.2002	Pakualam
						3	36.03.15.2003	Boni Sari
						4	36.03.15.2004	Rawa Boni
						5	36.03.15.2005	Buaran Mangga
						6	36.03.15.2006	Buaran Bambu
						7	36.03.15.2007	Kalibaru
						8	36.03.15.2008	Kohod
						9	36.03.15.2009	Kramat
						10	36.03.15.2010	Sukawali
						11	36.03.15.2011	Surya Bahari
						12	36.03.15.2012	Kiara Payung
						13	36.03.15.2013	Laksana
						14	36.03.15.2014	Gaga
16	36.03.16	SEPATAN						
			1	36.03.16.1001	Sepatan			
						1	36.03.16.2002	Karet
						2	36.03.16.2003	Kayu Agung
						3	36.03.16.2004	Kayu Bongkok
						4	36.03.16.2008	Pondok Jaya

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						5	36.03.16.2011	Pisangan Jaya
						6	36.03.16.2012	Mekar Jaya
						7	36.03.16.2015	Sarakan
17	36.03.17	CURUG						
			1	36.03.17.1001	Curug Kulon			
						1	36.03.17.2002	Curug Wetan
						2	36.03.17.2003	Kadu
						3	36.03.17.2004	Kadu Jaya
			2	36.03.17.1005	Sukabakti			
			3	36.03.17.1006	Binong			
						4	36.03.17.2010	Cukang Galih
18	36.03.18	CIKUPA						
			1	36.03.18.1001	Sukamulya			
						1	36.03.18.2002	Cibadak
			2	36.03.18.1003	Bunder			
						2	36.03.18.2004	Talaga
						3	36.03.18.2005	Talaga Sari
						4	36.03.18.2006	Dukuh
						5	36.03.18.2007	Cikupa
						6	36.03.18.2008	Sukanagara
						7	36.03.18.2009	Bitung Jaya
						8	36.03.18.2010	Pasir Gadung
						9	36.03.18.2011	Suka Damai
						10	36.03.18.2012	Pasir Jaya
						11	36.03.18.2013	Budi Mulya
						12	36.03.18.2014	Bojong
19	36.03.19	PANONGAN						
						1	36.03.19.2001	Ranca lyuh
			1	36.03.19.1002	MekarBakti			
						2	36.03.19.2003	Peusar
						3	36.03.19.2004	Ranca Kelapa
						4	36.03.19.2005	Serdang Kulon
						5	36.03.19.2006	Mekar Jaya
						6	36.03.19.2007	Ciakar
						7	36.03.19.2008	Panongan
20	36.03.20	LEGOK						
						1	36.03.20.2002	Caringin
						2	36.03.20.2003	Serdang Wetan
						3	36.03.20.2004	Babat
						4	36.03.20.2005	Ciangir
						5	36.03.20.2006	Legok
						6	36.03.20.2007	Palasari
						7	36.03.20.2008	Bojong Kamal
						8	36.03.20.2009	Ranca Gong
						9	36.03.20.2010	Kemuning
			1	36.03.20.1011	Babakan			
						10	36.03.20.2012	Cirarab

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	36.03.22	PAGEDANGAN						
						1	36.03.22.2002	Cicalengka
						2	36.03.22.2003	Pagedangan
			1	36.03.22.1004	Medang			
						3	36.03.22.2005	Cijantra
						4	36.03.22.2006	Lengkong Kulon
						5	36.03.22.2007	Situ Gadung
						6	36.03.22.2008	Jatake
						7	36.03.22.2009	Cihuni
						8	36.03.22.2010	Kadu Sirung
						9	36.03.22.2011	Malang Nengah
						10	36.03.22.2012	Karang Tengah
22	36.03.23	CISAUK						
			1	36.03.23.1001	Cisauk			
						1	36.03.23.2003	Mekar Wangi
						2	36.03.23.2005	Suradita
						3	36.03.23.2006	Sampora
						4	36.03.23.2009	Dangdang
						5	36.03.23.2011	Cibogo
23	36.03.27	SUKAMULYA						
						1	36.03.27.2001	Benda
						2	36.03.27.2002	Sukamulya
						3	36.03.27.2003	Kali Asin
						4	36.03.27.2004	Buni Ayu
						5	36.03.27.2005	Perahu
						6	36.03.27.2006	Merak
						7	36.03.27.2007	Bunar
						8	36.03.27.2008	Kubang
24	36.03.28	KELAPA DUA						
			1	36.03.28.1001	Kelapa Dua			
			2	36.03.28.1002	Bencongan			
			3	36.03.28.1003	Bencongan Indah			
			4	36.03.28.1004	Pakulonon Barat			
			5	36.03.28.1005	Bojong Nangka			
						1	36.03.28.2006	Curug Sangereng
25	36.03.29	SINDANG JAYA						
						1	36.03.29.2001	Sindang Jaya
						2	36.03.29.2002	Wanakerta
						3	36.03.29.2003	Sukaharja
						4	36.03.29.2004	Sindang Asih
						5	36.03.29.2005	Sindang Panon
						6	36.03.29.2006	Sindang Sono
						7	36.03.29.2007	Badak Anom
26	36.03.30	SEPATAN TIMUR						
						1	36.03.30.2001	Kedaung Barat

NO	KODE	KECAMATAN	NO	KODE	KELURAHAN	NO	KODE	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2	36.03.30.2002	Lebak Wangi
						3	36.03.30.2003	Jati Mulya
						4	36.03.30.2004	Sangiang
						5	36.03.30.2005	Gempol Sari
						6	36.03.30.2006	Kampung Kelor
						7	36.03.30.2007	Pondok Kelor
						8	36.03.30.2008	Tanah Merah
27	36.03.31	SOLEAR						
						1	36.03.31.2001	Solear
						2	36.03.31.2002	Cikuya
						3	36.03.31.2003	Cikasungka
						4	36.03.31.2004	Cirendeu
						5	36.03.31.2005	Cikareo
						6	36.03.31.2006	Pasanggarahan
						7	36.03.31.2007	Munjul
28	36.03.32	GUNUNG KALER						
						1	36.03.32.2001	Gunug Kaler
						2	36.03.32.2002	Sidoko
						3	36.03.32.2003	Rancagede
						4	36.03.32.2004	Kedung
						5	36.03.32.2005	Cipaeh
						6	36.03.32.2006	Onyam
						7	36.03.32.2007	Tamiang
						8	36.03.32.2008	Kandawati
						9	36.03.32.2009	Cibetok
29	36.03.33	MEKAR BARU						
						1	36.03.33.2001	Mekar Baru
						2	36.03.33.2002	Kedaung
						3	36.03.33.2003	Cijeruk
						4	36.03.33.2004	Waliwis
						5	36.03.33.2005	Klutuk
						6	36.03.33.2006	Jenggot
						7	36.03.33.2007	Kosambi Dalam
						8	36.03.33.2008	Gandaria

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Pasal 3 menyebutkan bahwa “Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut:

Tabel 1.10**Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
3	Inspektorat	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
6	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

17	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
18	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan
19	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
20	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
23	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

25	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Kecamatan Tigaraksa	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
33	Kecamatan Cisoka	Peraturan Bupati Tangerang Nomor

		33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
34	Kecamatan Solear	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
35	Kecamatan Jayanti	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
36	Kecamatan Jambe	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
37	Kecamatan Balaraja	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
38	Kecamatan Sukamulya	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
39	Kecamatan Kresek	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
40	Kecamatan Gunung Kaler	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
41	Kecamatan Mekar Baru	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
42	Kecamatan Kemiri	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

43	Kecamatan Kronjo	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
44	Kecamatan Mauk	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
45	Kecamatan Pakuhaji	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
46	Kecamatan Pasar Kemis	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
47	Kecamatan Rajeg	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
48	Kecamatan Sukadiri	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
49	Kecamatan Sepatan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
50	Kecamatan Sepatan Timur	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
51	Kecamatan Sindang Jaya	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

52	Kecamatan Teluk Naga	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
53	Kecamatan Kosambi	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
54	Kecamatan Panongan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
55	Kecamatan Cikupa	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
56	Kecamatan Curug	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
57	Kecamatan Kelapa Dua	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
58	Kecamatan Pagedangan	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
59	Kecamatan Cisauk	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
60	Kecamatan Legok	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

ASN Kabupaten Tangerang tahun 2025 berjumlah 15.622 pegawai, pada tahun 2025 jabatan struktural sebanyak 870 pegawai berkurang dari tahun 2024 karena adanya perubahan stuktur organisasi, jabatan fungsional tertentu sebanyak 836, 8.785 guru, 2743 tenaga Kesehatan, dengan jumlah pegawai fungsional umum/pelaksana sebanyak 2.388 pegawai, dengan diistribusi sebagai berikut :

Tabel 1.11
Jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Guru	JF Tertentu	Nakes	Pelaksana	Struktural	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		26		59	10	95
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				39	13	52
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		86		82	6	174
4	Badan Pendapatan Daerah		10		129	25	164
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6		62	16	84
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		24		39	7	70
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		9		96	48	153
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25		53	8	86
9	Dinas Kesehatan		11	1513	164	58	1746
10	Dinas Komunikasi dan Informatika		34		25	8	67
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		13		21	7	41
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		15		51	32	98
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		5		29	7	41
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		13		28	8	49
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		5		27	6	38
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		44		17	3	64
17	Dinas Pendidikan	8785	102		239	15	9141
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10		31	9	50
19	Dinas Perhubungan		12		137	18	167
20	Dinas Perikanan		5		29	9	43
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		24		20	8	52
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip		34		33	6	73
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		49		30	15	94
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman		5		56	13	74

No.	Perangkat Daerah	Guru	JF Tertentu	Nakes	Pelaksana	Struktural	Jumlah
25	Dinas Sosial		14		22	7	43
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan		21		61	13	95
27	Dinas Tenaga Kerja		28		22	9	59
28	Inspektorat		64		38	9	111
29	Kecamatan Balaraja		1		9	14	24
30	Kecamatan Cikupa		1		9	19	29
31	Kecamatan Cisauk		1		13	14	28
32	Kecamatan Cisoka		1		10	8	19
33	Kecamatan Curug		1		12	24	37
34	Kecamatan Gunung Kaler		1		9	8	18
35	Kecamatan Jambe		1		12	8	21
36	Kecamatan Jayanti				8	9	17
37	Kecamatan Kelapa Dua		1		13	34	48
38	Kecamatan Kemiri		1		10	7	18
39	Kecamatan Kosambi				14	24	38
40	Kecamatan Kresek		1		8	8	17
41	Kecamatan Kronjo				12	9	21
42	Kecamatan Legok		1		16	14	31
43	Kecamatan Mauk		1		11	14	26
44	Kecamatan Mekar Baru		1		14	8	23
45	Kecamatan Pagedangan		1		20	13	34
46	Kecamatan Pakuhaji		1		10	14	25
47	Kecamatan Panongan		2		15	13	30
48	Kecamatan Pasar Kemis				17	29	46
49	Kecamatan Rajeg				17	14	31
50	Kecamatan Sepatan		1		13	12	26
51	Kecamatan Sepatan Timur		1		8	8	17
52	Kecamatan Sindang Jaya		1		10	8	19
53	Kecamatan Solear				13	9	22
54	Kecamatan Sukadiri		1		15	9	25
55	Kecamatan Sukamulya		2		11	8	21
56	Kecamatan Teluk Naga		1		17	8	26
57	Kecamatan Tigaraksa		1		16	19	36
58	Satuan Polisi Pamong Praja		14		93	15	122
59	Sekretariat Daerah		76		99	26	201
60	Sekretariat DPRD		6		39	11	56
61	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah						1446
Total		8.785	836	2.743	2.388	870	15.622

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tangerang, 2026

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.12

**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE : 01 JANUARI 2025 S/D 31 DESEMBER 2025**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.148.718.579.714,00	0,00	5.383.275.364.307,76	5.383.275.364.307,76	234.556.784.593,76	104,56
4.1.01	Pajak Daerah	4.123.570.000.000,00	0,00	4.273.695.878.211,00	4.273.695.878.211,00	150.125.878.211,00	103,64
4.1.02	Retribusi Daerah	204.203.623.497,00	0,00	229.390.144.881,00	229.390.144.881,00	25.186.521.384,00	112,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.739.592.373,00	0,00	60.739.592.375,00	60.739.592.375,00	2,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	760.205.363.844,00	0,00	819.449.748.840,76	819.449.748.840,76	59.244.384.996,76	107,79
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.588.735.992.887,00	0,00	3.669.081.393.323,00	3.669.081.393.323,00	80.345.400.436,00	102,24
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.230.216.043.000,00	0,00	3.131.423.446.639,00	3.131.423.446.639,00	(98.792.596.361,00)	96,94
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887,00	0,00	537.657.946.684,00	537.657.946.684,00	179.137.996.797,00	149,97
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	8.737.454.572.601,00	0,00	9.052.356.757.630,76	9.052.356.757.630,76	314.902.185.029,76	103,60
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	6.670.630.746.805,94	0,00	6.424.435.722.171,00	6.424.435.722.171,00	(246.195.024.634,94)	96,31
5.1.01	Belanja Pegawai	2.792.481.718.736,58	0,00	2.734.041.926.442,00	2.734.041.926.442,00	(58.439.792.294,58)	97,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.474.258.088.944,36	0,00	3.311.074.510.210,00	3.311.074.510.210,00	(163.183.578.734,36)	95,30
5.1.05	Belanja Hibah	384.480.739.125,00	0,00	360.445.585.519,00	360.445.585.519,00	(24.035.153.606,00)	93,75
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.410.200.000,00	0,00	18.873.700.000,00	18.873.700.000,00	(536.500.000,00)	97,24
5.2	BELANJA MODAL	1.806.583.369.450,06	0,00	1.749.933.242.821,00	1.749.933.242.821,00	(56.650.126.629,06)	96,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	112.762.628.340,00	0,00	108.735.367.766,00	108.735.367.766,00	(4.027.260.574,00)	96,43

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.843.868.776,00	0,00	426.864.550.884,00	426.864.550.884,00	(7.979.317.892,00)	98,17
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	456.753.191.662,40	0,00	433.083.238.361,00	433.083.238.361,00	(23.669.953.301,40)	94,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	752.159.399.058,66	0,00	741.354.264.344,00	741.354.264.344,00	(10.805.134.714,66)	98,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.308.825.363,00	0,00	39.161.786.075,00	39.161.786.075,00	(10.147.039.288,00)	79,42
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	755.456.250,00	0,00	734.035.391,00	734.035.391,00	(21.420.859,00)	97,16
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.574.124.991,00	0,00	35.219.507.481,00	35.219.507.481,00	(2.354.617.510,00)	93,73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.574.124.991,00	0,00	35.219.507.481,00	35.219.507.481,00	(2.354.617.510,00)	93,73
5.4	BELANJA TRANSFER	980.820.189.016,00	0,00	929.060.600.413,00	929.060.600.413,00	(51.759.588.603,00)	94,72
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	426.814.057.516,00	0,00	426.642.348.716,00	426.642.348.716,00	(171.708.800,00)	99,96
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	554.006.131.500,00	0,00	502.418.251.697,00	502.418.251.697,00	(51.587.879.803,00)	90,69
	JUMLAH BELANJA DAERAH	9.495.608.430.263,00	0,00	9.138.649.072.886,00	9.138.649.072.886,00	(356.959.357.377,00)	96,24
	SURPLUS / (DEFISIT)	(758.153.857.662,00)	0,00	(86.292.315.255,24)	(86.292.315.255,24)	671.861.542.406,76	11,38
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	788.153.857.662,00	0,00	788.153.857.662,54	788.153.857.662,54	0,54	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	788.153.857.662,00	0,00	788.153.857.662,54	788.153.857.662,54	0,54	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	758.153.857.662,00	0,00	758.153.857.662,54	758.153.857.662,54	0,54	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	671.861.542.407,30	671.861.542.407,30	671.861.542.407,30	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2026 (data unaudited yang ditarik tanggal 19 Februari 2026)

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

g. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan bentuk dari “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Tabel 1.13

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek

No.	Aspek	Permasalahan
a.	Aspek Geografi dan Demografi :	
		1. Banjir rob melanda pemukiman warga daerah pesisir utara Kabupaten Tangerang 2. Banjir yang diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi 3. Pemanfaatan lahan terkonsentrasi di wilayah perkotaan 4. Pengikisan lahan akibat abrasi di Pantai Utara 5. Bencana banjir melanda permukiman yang berdekatan dengan daerah aliran sungai 6. Pemanfaatan lahan terkonsentrasi di wilayah perkotaan 7. Pertumbuhan penduduk cukup tinggi
b.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat :	

No.	Aspek	Permasalahan
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	1. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor padat karya yang membutuhkan tenaga Kerja yang banyak, jika pertumbuhan sektor industri pengolahan menurun, akan berdampak kepada PHK 2. Kenaikan harga makanan dan non makanan akibat kenaikan BBM penyebab inflasi di Kabupaten Tangerang 3. Kemampuan masyarakat dalam akses makanan dan non makanan belum meningkat
	Fokus Kesejahteraan Sosial	1. Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Tangerang selama 8,92 tahun, belum sampai 9 tahun (SMP) atau 12 tahun (SMA). 2. Jumlah bayi dengan gizi buruk belum tertangani secara maksimal

Tabel 1.14
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek
Pelayanan Umum Per Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
Pendidikan	1. Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal 3. Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah 4. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan 5. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak 6. Masih kurangnya jumlah TK Negeri

	7. Terdapat Lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang belum memenuhi SNP 8. Terdapat anak usia PAUD yang belum memperoleh Pendidikan PAUD 9. Belum meratanya pendidikan Non Formal/Kesetaraan 10. Masih terdapat ATS yang belum terlayani 11. Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan 12. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan 13. Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik 14. Kurangnya dan rendahnya kualitas tenaga administrasi sekolah 15. Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik 16. Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka 17. Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran
Kesehatan	1. Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat 2. Belum optimalnya sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur antara FKTP dan FKRTL, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi 3. Belum optimalnya pengukuran status gizi balita, serta belum optimalnya angka partisipasi ke Posyandu, pengukuran antropometri yang belum sesuai standar, baik diakibatkan sarana prasarana Posyandu yang masih kurang, maupun kompetensi petugas yang masih kurang 4. Tingginya ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

	5. Masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap pasien Tuberkulosis dan HIV/AIDS 6. Semakin meluasnya kelompok umur dan sasaran anak dengan faktor risiko obesitas, serta tidak menerapkan gaya hidup sehat 7. Kurangnya pelaksanaan fungsi Puskesmas dalam menjalankan pelayanan kesehatan dasar (<i>essential health care</i>) yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 8. Peran rumah sakit juga diarahkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar <i>revenue</i>, tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan stunting, penurunan wasting, dan juga pengendalian penyakit 9. Kurangnya pelatihan SDM kesehatan serta kurangnya peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui <i>on-job training</i> (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat 10. Belum optimalnya koordinasi perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan 11. Masih rendahnya pengetahuan Puskesmas dalam menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 12. Alkes yang beredar di Indonesia adalah produk impor, sehingga masih menjadi tantangan untuk terwujudnya kemandirian Alkes dalam negeri
--	---

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Undang-Undang Cipta Kerja belum ada turunan produk hukum di daerah, sehingga pelayanan dokumen tertunda 2. Belum adanya standar perhitungan kebutuhan minimal dalam beberapa indikator/jenis pelayanan antara lain dalam perhitungan kebutuhan layanan air minum 3. Beberapa wilayah Kabupaten Tangerang cukup sulit untuk mencari sumber air baku untuk pemenuhan layanan air minum bukan perpipaan, disamping lokasinya juga cukup jauh dari jaringan air minum perpipaan 4. Belum optimal ketegasan dalam tindakan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu alasannya karena belum tersedianya PPNS terkait bidang Penataan Ruang 5. Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 6. Belum optimalnya pendataan dan penindakan izin terhadap bangunan tidak berizin dan tidak sesuai izin. Salah satu alasannya karena keterbatasan sumber daya yang tidak dapat mengejar kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang 7. Kurang memadainya kapasitas jalan Kabupaten karena lebar jalan yang tidak seimbang dengan volume kendaraan yang ada 8. Rata-rata kerusakan jalan kabupaten yang masih tinggi karena ada peningkatan jumlah kendaraan per tahun yang sangat pesat 9. Tingginya sedimentasi/endapan/sampah pada drainase jalan yang menyebabkan sistem drainase jalan Kabupaten belum maksimal 10. Kurangnya pembangunan untuk daerah resapan air dan daya tampung Saluran/Sungai/Situ; 11. Kurangnya kapasitas bangunan untuk jaringan irigasi (kurang dari 1000 Ha)
--	--

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU Wakaf dan TPU milik Pemda 2. Rendahnya kesadaran pengembang untuk menyerahkan PSU 3. Kurangnya pemahaman pengembang terkait regulasi penyerahan PSU 4. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada serta penanggulangan bencana masih kurang 2. Kurangnya personal Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada 3. Data persebaran/pertumbuhan tempat hiburan belum akurat 4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan aktivitas pelaku usaha hiburan, peredaran miras; 5. Penyalahgunaan pelaku kegiatan usaha 6. Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat daerah dan Aparat Keamanan di wilayah terkait permasalahan trantibum; 7. Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan PSK; 8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas 9. Kesulitan memperoleh data warga yang berada di radius 50 meter dari lokasi penertiban dikarenakan belum ada petugas yang khusus mencatat data warga saat pelaksanaan penertiban 10. Terbatasnya jumlah personil saat pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar 11. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 12. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran 13. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data kebencanaan dan kebakaran 14. Belum adanya dokumen rencana induk

	sistem proteksi kebakaran dan dokumen rencana kontingensi per jenis bencana 15. Belum adanya peta daerah rawan bencana 16. Masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat 17. Masih rendahnya cakupan pelayanan pos damkar yang ada dalam kebencanaan dan kebakaran 18. Masih rendahnya kapasitas aparatur BPBD dalam kebencanaan dan kebakaran 19. Belum dipedomaninya KRB dan RPB dalam perencanaan penataan ruang dan perencanaan perangkat daerah terkait
Sosial	1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS 3. Target sasaran kebutuhan berdasarkan mutu layanan masih sulit ditentukan dikarenakan kejadian yang bersifat kasuistik 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS 5. Koordinasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah perihal bantuan sosial kurang optimal, sehingga penyaluran belum maksimal; 6. Rendahnya aksesibilitas dan keberfungsian pada anak terlantar, lansia, WRSE dan Fakir Miskin serta disabilitas; 7. Masih adanya stigma negatif terhadap eks nabi di keluarga dan masyarakat; 8. Bantuan yang diberikan masih belum tepat sasaran

Tenaga Kerja	1. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan UPT Pelatihan Kerja di perusahaan 2. Kurangnya tenaga instruktur yang kompeten sesuai dengan kejuruan yang ada 3. Informasi lowongan kerja yang diperoleh pencari kerja terbatas 4. Keahlian dan keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 5. Penyediaan jenis pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan 6. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan 7. Belum efektifnya penanganan HPI pada tahap Bipartit 8. Tingkat pendidikan pencari kerja masih rendah 9. Produktivitas dan etos kerja masih rendah 10. Minat masyarakat untuk berwirausaha masih rendah 11. Adanya pelanggaran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja 12. Kurangnya pengetahuan terkait peraturan perundangan ketenagakerjaan
--------------	--

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 2. Perempuan Berpolitik DPRD baru tercapai 14% dari target 30% 3. Perempuan yang menduduki jabatan Eselon II baru 16% 4. Perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan hanya sebesar 19,72% 5. Belum optimalnya Pembinaan Tenaga Pendidik terhadap Sekolah Ramah Anak 6. Belum optimalnya Pelatihan Konvensi Hak Anak 7. Belum optimalnya sosialisasi tentang Pembentukan Forum Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas dan Rumah Sakit Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa dan Kelurahan Layak Anak, dan Tempat Ibadah Layak Anak 8. Belum optimalnya Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 9. Belum optimalnya cakupan kreativitas anak 10. Belum optimalnya sosialisasi kepada dunia usaha dan media massa dalam upaya pencapaian Kabupaten Layak Anak
Pangan	1. Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tangerang cukup secara kuantitas namun belum beragam secara kualitas 2. Perubahan iklim 3. Harga bahan baku pangan unggas tidak stabil (sering terjadi lonjakan) 4. Skala usaha pemeliharaan ternak rakyat masih rendah dan perorangan 5. Belum optimalnya sistem pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 6. Masih rendahnya tata kelola, pendampingan pengelolaan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif

	7. Belum berkembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan 8. Masih rendahnya penanganan daerah dan efisiensi serta efektivitas rentan rawan pangan yang terprogram melalui pertumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan 9. Masih rendahnya capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Pertanahan	Tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan oleh tim appraisal.
Lingkungan Hidup	1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 2. Tindak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang masih banyak 3. Kurangnya penyediaan lahan RTH 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah 5. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Adanya anomali data kependudukan 2. Belum optimalnya pegawai memenuhi standar sesuai dengan Anjab ABK 3. Masih sedikitnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan 4. Keterbatasan pegawai untuk ditugaskan ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5. Inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil belum optimal.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tingkat kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa belum sesuai yang diharapkan 2. Desa tidak mampu memaksimalkan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3. Tingkat kompetensi Lembaga Kemasyarakatan Desa rendah 4. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Belum terimplementasinya satu data kependudukan untuk perencanaan pembangunan 2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK 3. Belum adanya pemetaan data kependudukan 4. Kurangnya sosialisasi dan terbatasnya materi tentang pembangunan kependudukan 5. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai pengendalian penduduk 6. Belum adanya dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk 7. Belum optimalnya pemanfaatan GDPK sehingga pelaksanaannya tidak aplikatif 8. Kurangnya kapasitas SDM dalam menemukan dampak kependudukan 9. Belum optimalnya koordinasi dalam pengendalian dampak kependudukan 10. Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan kependudukan 11. Terbatasnya jumlah bimbingan teknis pembangunan kependudukan yang dilakukan 12. Masih terdapatnya sikap ego program/ sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber KB 13. Belum adanya keterpaduan dan kolaborasi pelaksanaan program KB

	14. Belum ada SOP mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pembinaan KB 15. Belum optimalnya data dan pemetaan sasaran dalam melakukan advokasi 16. Kurangnya strategi, desain program dan inovasi dalam pelaksanaan advokasi dan KIE 17. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE 18. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melaksanakan advokasi dan KIE 19. Belum optimalnya pendayagunaan mitra kerja dalam pelayanan KB 20. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan KB 21. Belum tersedianya sistem pencatatan dan pengendalian hasil pelayanan berKB 22. Kurangnya kapasitas PKB/PLKB/Kader untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat 23. Belum tersedianya data dan pemetaan sasaran kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera 24. Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sectoral dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 25. Kurangnya strategi, desain program dan inovasi advokasi dan KIE dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 26. Kurangnya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 27. Kurangnya data sasaran untuk perencanaan sarpras dan dukungan operasional dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 28. Belum optimalnya keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
--	--

	29. Belum optimalnya pendayagunaan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera 30. Kurangnya peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera 31. Belum tersedianya pusat informasi dan konselling ketahanan keluarga 32. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan dengan lintas sektor dalam program ketahanan keluarga
Perhubungan	1. Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi 2. Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan 3. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat 4. Tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Rendahnya kualitas dan pemasaran produk usaha mikro 2. Rendahnya jumlah penerima dana bergulir untuk koperasi/usaha mikro melalui UPT UPDB 3. Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi

Komunikasi dan Informatika	1. Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik oleh badan publik dan pengelolaan komunikasi publik 2. Belum optimalnya kegiatan kemitraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan 3. Jumlah layanan hubungan media masih belum optimal 4. Sarana dan prasarana persandian belum memadai 5. Belum adanya jaringan komunikasi sandi antar perangkat daerah 6. Belum optimalnya keamanan sistem persandian 7. Kebijakan, strategi, dan perencanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik belum optimal 8. Layanan pemerintah dan publik berbasis elektronik belum optimal 9. Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data 10. Kurangnya pemahaman terkait pengisian dan manfaat metadata 11. Pengumpulan data dari produsen data yang lambat dari batas waktu yang ditentukan 12. Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi oleh produsen data 13. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan 14. Kurangnya kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi dari BPS
----------------------------	--

Penanaman Modal	1. Promosi yang dilakukan belum maksimal 2. Belum maksimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal 3. Belum tersosialisasikannya secara merata informasi penggunaan aplikasi perizinan berusaha dan non perizinan secara online kepada masyarakat 4. Belum ada kajian sarana, prasarana dan SDM dalam penyelenggaraan PTSP 5. Belum optimalnya sosialisasi tata cara pembuatan LKPM 6. Belum optimalnya pemantauan dan berjalannya tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum membuat LKPM 7. Belum optimalnya pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM 8. Kurangnya pelatihan dari Kementerian Investasi/BKPM terkait LKPM kepada SDM di daerah
Kepemudaan dan Olah Raga	1. Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan 2. Adanya pertumbuhan organisasi pemuda baru sehingga masih membutuhkan pembinaan dari Pemerintah Daerah 3. Minimnya prestasi olahraga tingkat Nasional dan Internasional 4. Belum optimalnya peran organisasi pemuda dalam pembangunan 5. Belum optimalnya wirausaha baru

Kebudayaan	1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya 2. Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni 3. Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan 4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang bergerak 5. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya.
Perpustakaan	1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar 2. Promosi layanan perpustakaan masih belum masif 3. Belum optimalnya jumlah koleksi judul perpustakaan 4. Belum optimalnya capaian IPLM dan TGM
Kearsipan	1. Pelaksanaan akuisisi dan penyerahan arsip statis masih belum maksimal 2. Belum optimalnya kapasitas Arsiparis 3. Belum terkelolanya arsip sesuai NSPK
Perikanan	1. Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah 2. Belum optimalnya sistem pemasaran produk 3. Tingginya biaya operasional produksi 4. Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha 5. Rendahnya angka konsumsi ikan

Pariwisata	1. Kurangnya perencanaan, rencana aksi, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata 2. Minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata 3. Kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata 4. Kurangnya perlindungan hasil kreativitas usaha pariwisata 5. Kurangnya promosi dan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 6. Kurangnya data pariwisata baik dalam dan luar negeri 7. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan 8. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 9. Rendahnya kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Tangerang
Pertanian	1. Masih rendahnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal 2. Masih rendahnya kesediaan benih unggul 3. Masih rendahnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan 4. Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian 5. Masih tingginya risiko serangan hama dan penyakit tanaman 6. Masih rendahnya kualitas serta daya saing produk pertanian

	- Masih rendahnya surveilans penyakit hewan, jumlah medik veteriner dan paramedik veteriner, serta pelayanan kesehatan hewan - Masih rendahnya kualitas produk hewan - Masih rendahnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian - Masih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian - Rendahnya kontribusi pertanian/ perkebunan terhadap PDRB
Perdagangan	- Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal - Masih naik turunnya kegiatan ekspor bersih perdagangan - Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen menurut undang- undang dan juga regulasi yang belum mengatur mekanisme detail tentang penyidikan dan aturan pelaksana pengurusan sengketa konsumen
Kelautan dan Perikanan	Nilai tukar nelayan yang masih fluktuatif setiap tahunnya
Perindustrian	Kurang optimalnya pembinaan kepada pelaku IKM
Transmigrasi	Terbatasnya jumlah kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi.
Administrasi Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan	Belum optimalnya pengendalian internal

	2. Jumlah SDM APIP belum sesuai rekomendasi Menpan-RB 3. Belum seluruhnya mempunyai Peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian korupsi
Perencanaan	1. Kapasitas dan profesionalisme SDM perencana yang belum merata 2. Belum tersedianya SOP dalam implementasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah 3. Kepatuhan PD untuk mempedomani dokumen perencanaan masih rendah 4. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 5. Kurang memadainya data-data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan 6. Aplikasi SIPD belum dapat terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan 7. Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran 8. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan
Kuangan	1. Masih terjadi kendala dalam layanan tatalaksana pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta penilaian dan penetapan pajak daerah 2. Masih terjadi kendala dalam layanan penyelesaian keberatan 3. Masih terdapat realisasi laporan yang belum mencerminkan fakta dan data lapangan 4. Masih terdapat pengusaha belum mendaftar sebagai WP 5. Perlunya pemberlakuan sanksi terhadap WP yang tidak taat;

	6. Kompetensi dan pemahaman PPK pada OPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan belum merata dan masih rendahnya perhatian Kepala OPD pada proses penyusunan Laporan Keuangan 7. Masih banyak tanah milik daerah yang belum bersertifikat dan masih terdapat perbedaan pada beberapa jenis BMD antara kondisi di lapangan dengan catatan <i>database</i> 8. Banyak BMD berupa tanah dan gedung yang tidak terpakai untuk operasional Pemerintah Daerah dan tidak dilakukan pemeliharaan rutin atau pengawasan secara rutin 9. Masih tingginya program/kegiatan yang tidak terlaksana
Kepegawaian	Belum optimalnya Manajemen ASN
Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya penyelenggaraan tugas fungsi DPRD
Kewilayahan	Belum optimalnya pelayanan masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Belum optimalnya pencegahan dan deteksi dini konflik. 2. Belum optimalnya penanganan konflik.

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, 2026

Permasalahan pembangunan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 1.15

Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pelayanan dasar Kesehatan dan Pendidikan	Permasalahan kinerja sektor Pendidikan :
		• Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
		• Belum maksimalnya pelaksanaan PAUD
		• Belum maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
		• Belum optimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Permasalahan kinerja sektor Perpustakaan dan Kearsipan :
		• Rendahnya kunjungan perpustakaan
		• Belum terbangunnya sinergitas antar instansi terkait
		• Belum tertib administrasi kearsipan dalam perangkat daerah

		Permasalahan kinerja sektor Kesehatan :
		• Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi
		• Tingginya angka <i>stunting</i> dan KEK
		• Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
		• Rendahnya mutu pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
		• Rendahnya SDM Kesehatan
		• Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan
	Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan	Permasalahan kinerja sektor Kepemudaan :
		• Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
		• Minimnya Akses Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan
	Belum optimalnya pemberdayaan peran gender	Permasalahan kinerja sektor Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
		• Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
		• Belum optimalnya kualitas hidup anak
		• Masih tingginya kekerasan pada perempuan dan anak

	Tingginya angka kelahiran	Permasalahan kinerja sektor kependudukan dan keluarga berencana :
--	---------------------------	---

		• Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga • Belum optimalnya pencapaian program KB dan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Dan Masih Tingginya Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor PDRB	Permasalahan kinerja sektor Perikanan:
		• Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah
		• Belum maksimalnya produksi dan produktivitas Perikanan
		• Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan
		• Permasalahan kinerja sektor Pertanian:
		• Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian
		• Tingginya Potensi Risiko Terjangkitnya Penyakit Hewan Menular
		• Masih rendahnya kapasitas SDM Pertanian (ASN dan Petani/Peternak)
		• Permasalahan kinerja sektor Perindustrian dan Perdagangan:
		• Kurang optimalnya Pembinaan kepada pelaku IKM.

		• Permasalahan kinerja sektor Pariwisata:
		• Rendahnya daya Tarik destinasi pariwisata
		• Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif
		• Rendahnya publikasi dan promosi pariwisata
	Belum optimalnya realisasi investasi	Permasalahan kinerja sektor penanaman :
		• Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan
		• Belum optimalnya promosi investasi daerah
	Lambatnya pertumbuhan IKM dan UM	Permasalahan kinerja sektor koperasi dan Usaha Mikro :
		• Rendahnya kualitas dan pemasaran produk usaha mikro
		• Masih rendahnya jumlah penerima dana bergulir untuk koperasi/usaha mikro melalui UPT UPDB
		• Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi
		Permasalahan Kinerja perindustrian :
		• Rendahnya daya saing IKM
		• Permasalahan kinerja perdagangan :
		• Belum Optimalnya Pengawasan Metrologi Legal
		• Belum optimalnya pelayanan tera/tera ulang
		• Optimalnya Sistem Informasi Perdagangan

	Belum optimalnya tingkat kemandirian desa	Permasalahan kinerja sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa :
		• Rendahnya kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan
	Rendahnya partisipasi angkatan kerja	Permasalahan kinerja sektor tenaga kerja :
		• Tingginya angka pengangguran
	Belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS	Permasalahan kinerja sektor sosial :
		• Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Belum optimalnya destinasi wisata dan pengembangan seni budaya	Permasalahan kinerja sektor Pariwisata:
		• Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
		• Permasalahan kinerja sektor Kebudayaan:
		• Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan seni budaya
		• Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya asli daerah
		• Belum tersedianya sarana prasarana pembinaan seni budaya daerah
	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Permasalahan kinerja sektor Pangan:

		Masih rendahnya ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) maupun Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)
		Masih rendahnya penanganan daerah rentan rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
		Masih rendahnya penganeekaragaman/ diversifikasi pangan dan keamanan pangan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP	Permasalahan kinerja sektorPerencanaan:
		Belum terwujudnya perencanaan yang berkualitas
		Permasalahan kinerja sektor Sekretariat Daerah:
		Belum Optimalnya Fasilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah
		Permasalahan kinerja sektor Pengawasan:
		Belum optimalnya kapabilitas APIP
		Belum optimalnya tingkat maturitas SPIP terintegrasi
	Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD)	Permasalahan kinerja sektor pendapatan daerah :

		• Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
	Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Permasalahan kinerja sektor keuangan :
		• Penggunaan aplikasi SIPD yang belum dapat diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan lokal daerah. • Belum optimalnya manajemen asset
	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN	Permasalahan kinerja sektor Kepegawaian :
		• Belum optimalnya perencanaan ASN
		• Belum Optimalnya kinerja dan pengembangan kompetensi ASN
	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	• Permasalahan kinerja sektor komunikasi dan informasi :
		• Masih belum optimalnya program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		• Belum optimalnya kualitas persandian dan keamanan informasi
		• Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral
	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur	• Permasalahan kinerja sektor Sekretariat Daerah:

		• Belum Optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		• Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
		• Belum Optimalnya Fasilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah
		Permasalahan kinerja sektor Sekretariat DPRD:
		• Belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda
		Permasalahan kinerja sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
		• Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil
		• Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD maupun instansi layanan publik lainnya
		• Belum optimalnya inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil
		Permasalahan kinerja sektor Kearsipan:
		• Belum optimalnya pengelolaan arsip
		Permasalahan kinerja sektor Kewilayahan:
		• Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan tingkat kewilayahan/kecamatan
	Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Permasalahan kinerja sektor ketentraman dan ketertiban :

		• Belum optimalnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum
		• Belum optimalnya penanganan kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan
		• Kapasitas dan Kuantitas SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS yang masih perlu ditingkatkan
		• Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada
		• Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana
		• Permasalahan Kinerja kesatuan bangsa dan politik:
	Belum optimalnya kondisi masyarakat yang kondusif	• Belum optimalnya deteksi dini konflik masyarakat • Belum optimalnya penanganan konflik.
Belum Optimalnya Pemenuhan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan	• Permasalahan Kinerja Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
		• Kurang memadainya kapasitas jalan dan jembatan
	Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur sumber daya air	• Kurangnya daerah resapan air dan Daya tampung Saluran/Sungai/Situ
		• Kurangnya kapasitas jaringan Daerah Irigasi

	Belum optimalnya pencegahan banjir	• Tingginya Sedimentasi/Endapan/Sampah pada DAS, Drainase Jalan, saluran pembuang.
	Belum optimalnya penataan ruang kota	Permasalahan Kinerja Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
		• Masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang
		• Belum Optimalnya Data Sektoral untuk Mendukung Penataan Ruang
		• Masih banyaknya bangunan yang tidak berijin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh
		• Belum optimalnya pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas public
		• Belum adanya konsep penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi
	Belum optimalnya peningkatan hunian yang layak bagi masyarakat	Permasalahan Kinerja Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
		• PSU perumahan belum terkelola dengan baik
		• Belum optimalnya penanganan lingkungan permukiman kumuh
		• Masih belum idealnya kondisi Tpu Pemerintah
		• Permasalahan Kinerja Sektor Pertanahan:
		• Permintaan pemilik tanah lebih tinggi dari harga <i>Appraisal</i>

	Belum optimalnya sarana prasarana perhubungan	Permasalahan kinerja sektor perhubungan :
		• Belum optimalnya aksesibilitas transportasi
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan	Permasalahan kinerja sektor Lingkungan Hidup :
		• Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		• Masih tingginya tingkat timbulan sampah
		• Kurangnya penyediaan lahan RTH
	Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	• Belum optimalnya pelayanan penanganan bencana • Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, 2026

h. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

a) Sejahtera

Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama.

Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan.

b) Berdaya Saing

Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas.

Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Pemerintahan yang akuntabel dan efisien merupakan bagian dari prinsip *good governance*. Prinsip akuntabel menjadi acuan dalam menjalankan program dan kebijakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepercayaan publik. Efisiensi diperlukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal serta pencegahan terhadap gangguan keamanan masyarakat yang efektif. Perwujudan pelayanan publik yang optimal mulai dari administrasi hingga layanan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan melalui pendekatan yang lebih responsif. Melalui penerapan sistem yang lebih sederhana dan efisien dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan keperluan administrasi tanpa melewati birokrasi yang berbelit. Selain itu, hal yang menjadi prioritas adalah penguatan SDM sektor pelayanan yang diharapkan dapat menciptakan aparat/birokrat memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melayani masyarakat.

2. Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang kuat, produktif, dan berdaya saing menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan tingkat kemiskinan, menekan ketimpangan, kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing, serta adaptif terhadap tantangan global dan nasional (seperti geoekonomi, pembangunan berkelanjutan, penurunan GRK, transisi EBT, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pondasi ekonomi kerakyatan serta memperkuat sistem

perdagangan dan jasa untuk pengembangan ekonomi daerah.

Perekonomian yang maju ditunjukkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sektor unggulan (seperti industri, perdagangan dan jasa, serta manufaktur) dan sektor potensial (seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta pariwisata). Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing tenaga kerja untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggulan kompetitif. Selain itu, perekonomian yang maju ditunjang dengan infrastruktur penghubung dalam integrasi ekonomi domestik dan regional dalam mengakses pasar dan kemudahan pergerakan orang – barang. Selain itu, akses terhadap pasar juga berhubungan dengan menjaga kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah. Integrasi ekonomi membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas *stakeholder* (seperti pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkeadilan diwujudkan melalui peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, badan usaha desa, serta kewirausahaan. Skalabilitas ekonomi mikro didorong melalui kemudahan akses terhadap pemodalan, pengembangan kapasitas tenaga kerja dalam manajemen usaha, inkubasi bisnis kewirausahaan, serta kemudahan akses terhadap pasar.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkelanjutan menunjukkan komitmen untuk transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pengetatan regulasi untuk aktivitas perekonomian dengan prinsip berkelanjutan dan sirkular serta investasi terhadap transisi energi baru terbarukan (EBT).

3. Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas

Kesehatan masyarakat yang berkualitas di Kabupaten Tangerang dapat diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh optimalisasi pemberian layanan kesehatan dengan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas di setiap

kecamatan, serta peningkatan pola hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat. Pengoptimalan layanan kesehatan diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan. Selain peningkatan kuantitas, perlu ditunjang dengan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi rekrutmen tenaga kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemberian jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan untuk seluruh lapisan.

Terwujudnya kesehatan yang berkualitas juga perlu didukung melalui pemenuhan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Pembangunan dan perbaikan unit-unit layanan kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan layanan serta pemenuhan kebutuhan peralatan medis yang sesuai standar. Upaya tersebut juga sejalan dengan target untuk menekan angka kesakitan dan stunting, yang diimbangi dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai program kesehatan yang bersifat preventif, seperti edukasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pemenuhan gizi masyarakat, dan penerapan PHBS, digalakkan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

4. Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, optimalisasi layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya yang memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik dari kelompok disabilitas maupun anak-anak di daerah terpencil, dengan fasilitas pendidikan sesuai standar yang tersedia secara merata. Peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya ditunjukkan dengan penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar kemampuan akademik peserta didik. Kemampuan akademik perlu diimbangi dengan pembentukan karakter peserta didik melalui pendekatan kurikulum muatan lokal. Selain

penghayatan nilai budaya, nilai-nilai toleransi perlu disisipkan dalam pendidikan sejak dini, sebagai modal dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tangerang.

Upaya-upaya sebelumnya perlu didukung dengan pengoptimalan kuantitas dan kualitas maupun kompetensi tenaga pendidik, melalui pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengadaan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Di samping itu, perwujudan sistem pendidikan yang berkualitas juga didukung melalui pengembangan potensi kepemudaan, seni budaya, dan olahraga. Hal tersebut dapat menumbuhkan kecakapan dalam bekerja sama, memiliki kedisiplinan tinggi, serta akan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai luhur.

5. Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur terpadu merupakan landasan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan *Quality of Life* bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui peningkatan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Infrastruktur dasar menjadi fondasi dalam mendorong daya saing sumber daya manusia (seperti pendidikan, kesehatan, dan permukiman) serta mengakselerasi aktivitas perekonomian wilayah (seperti nilai tambah sektor, perhubungan dan perdagangan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar serta mewujudkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tangerang.

Pengembangan infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Hal ini terwujud melalui:

- 1) Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara;
- 2) Pengembangan *Blue-Green Infrastructure* dan infrastruktur penunjang Energi Baru Terbarukan (EBT);

- 3) Keterpaduan penataan bangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan perencanaan tata ruang serta daya dukung lingkungan.

Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas *stakeholder*. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang infrastruktur terintegrasi. Selain itu, juga beberapa proyek strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan kerjasama lintas K/L dan *stakeholder* terkait. Berbagai opsi skema pembiayaan kreatif seperti KPBU diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Tangerang. Kerjasama dan kolaborasi juga membuka peluang untuk mendorong realisasi investasi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur.

6. Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologis menjadi landasan dan penyangga pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui:

- 1) Peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan daerah
- 2) Peningkatan perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Peningkatan manajemen risiko bencana yang responsif.

Strategi dalam pencapaian misi ini adalah meningkatkan penanganan masalah lingkungan, serta melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati untuk generasi masa depan.

Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi memerlukan langkah strategis dalam efisiensi pendayagunaan sumber daya alam, diversifikasi dan konservasi energi, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, diperlukan arahan strategis dalam perlindungan ekosistem

melalui optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, penegakan regulasi pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Manajemen risiko bencana diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana.

i. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen perencanaan Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dimana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 memasuki tahun ke dua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 mulai diterapkan karena sudah terdapat penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru.

Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini yang disajikan adalah program pembangunan daerah berdasarkan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dikarenakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 masih mengacu kepada RPD 2024-2026.

Program Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 diprioritaskan pada upaya:

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat
3. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan

Berikut adalah program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 .

Tabel 1.16

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
1	Prioritas 1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,97	74,1	
	PP.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,68	0,71	
	Program Pengelolaan Pendidikan					Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	93.50	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	77.30	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	26.19	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	Persen	0.12	100	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	100	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	Persen	100	100	Dinas Pendidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	Persen	NA	100	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	Persen	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PP.2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,77	0,8	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					Dinas Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0.10	0.10	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	Persen	55.56%	100.00	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	99.77	100	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	98.07	100	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	95.08	100	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	98.61	100	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97.27	100	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	96.45	100	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	98.75	100	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100.00	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Wasting	Persen	99.0	100	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Angka	83.94	85.40	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	Persen	80	95.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase alat kesehatan memenuhi standar	Persen	81.85	83.00%	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					Dinas Kesehatan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persen	100.00%	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persen	100.00%	100	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					Dinas Kesehatan
		Persentase P-IRT yang sesuai standar	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan
		Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					Dinas Kesehatan
		Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Persen	100%	100	Dinas Kesehatan
	PP.3 Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	50,13	54	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persen	N/A	100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan	Persen	N/A	100	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
	PP.4 Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,17	63,67	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan terhadap Anak	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PP.5 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,47	1,05	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna	Persen	15	40	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem informasi pengendalian kependudukan	Persen	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%)	Persen	70.75	71.75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	26.41	27.37	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	Persen	90	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	Persen		80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	Persen	92	92,75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti	Persen	93	95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	Persen	n/a	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PP.6 Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraan dan Ketertiban	Indeks	2,02	2,38	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Satuan Pol PP
		Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	Satuan Pol PP
		Persentase Linmas yang terlatih	Persen	0	32	Satuan Pol PP

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	0	100	Satuan Pol PP
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	100	Satuan Pol PP
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persen	0.02%	0,27%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	Persen	8.61	25,94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	8.61%	42,86%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	14.29%	2,73%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persen	0.33%	38,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Prioritas 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,63	5,27-5,41	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88	7,2	
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,92	5,5	
	PP.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	Persen	2,28	3,88	

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Realisasi Investasi	Persen	N/A	5,12%	
		Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	Persen	20,45%	100,00%	
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Persen	3,25%	3,73%	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Persen	8.93%	64,29%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	Persen	13.51	81.09%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	Persen	0	53.58%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	Persen	13,29%	80.37%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	1,84%	9.4%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
		Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Persen	2.14%	6,42%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
		Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	Persen	1.20%	4,80%	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi	Persen	0	75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	Persen	0	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	Persen	32.55	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	86.30	75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	Persen	0%	83.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	86.15	85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0,5	0,6	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	Persen	2.27	1,5	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Persen	N/A	1.5	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	100%	100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	Persen	N/A	100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	Persen	11%	60%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	35%	75%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	Persen	53%	80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	Persen	60	68	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan	Persen	20	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	40%	80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	Persen	56.04%	69.60%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	44.00%	100%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	Persen	25.00%	100.00%	Dinas perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	20.00%	33%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTP	Persen	38.97%	100.00%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	Persen	3.08%	37.26%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	Persen	73.28%	100%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	Persen	19.24%	100%	Dinas perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Persen	N/A	100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
	PP.8 Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7107	0,7507	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Desa	5	45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Desa	N/A	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah rekomendasi penataan desa	Rekomendas i	N/A	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	Desa	N/A	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	PP.9 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77	78,5	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	Persen	33%	64,47%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%	Persen	100	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persen	9.05%	29.15%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	84,4	86	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Dokumen	1	3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	Persen	47.27	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	95	255	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Indikator Kinerja				

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	(Tujuan/Impact/Outcome)	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	PP.10 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,05	66,52	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	Persen	NA	100%	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	Persen	NA	77.80%	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	Lembaga	21 Lembaga	40 Lembaga	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	Persen	97.71%	96.90%	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Wirausaha Baru	Orang	208 Orang	2000 Orang	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	Persen	1.54%	1.18%	Dinas Tenaga Kerja
	PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN	Menurunnya Animo masyarakat bertransmigrasi	KK	NA	24 KK	Dinas Tenaga Kerja
	PP.11 Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	Persen	N/A	5%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen	67.99%	83.82%	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persen	0	100	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen	25.98%	100%	Dinas Sosial

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Persen	85%	100%	Dinas Sosial
3	Prioritas 3. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,74	66	
	PP.12 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	72,52	80,5	
		Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	0,505	0,53	
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	85	81	
		Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	3	3	
		Indeks SPBE	Indeks	3,08	3,21	
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,12	4,4	
	Program Pendaftaran Penduduk					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Perekaman KTP-el	Persen	99,26	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KIA	Persen	40	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	Persen	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	Persen	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Persen	93.07% (903.733)	99.55%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	Persen	100% (727.047)	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	Persen	100% (19.562)	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	Persen	100% (6.737)	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak	Persen	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Persen	100	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	35,48	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	Persen	100	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Persen	100	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase statistik sektoral	Persen	55	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	prosentase layanan kemanan informasi	Persen	45%	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	Persen	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perizinan penggunaan arsip	Persen	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					Sekretariat Daerah
		Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	n/a	Tinggi	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Buruk	Baik	Sekretariat Daerah
		Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan					Sekretariat Daerah
		Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
		Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
		Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Indeks	100	100	Sekretariat Daerah
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	88	100	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Ketersedian Data Pembangunan	Persen	62	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase	N/A	98,5%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah	Persentase	N/A	97,5%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase	N/A	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase	N/A	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang digunakausahkan	Persentase	N/A	90%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Persen	106,67	80%	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persen	100	100%	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Capaian Target Pajak Daerah	Persen	121,34	100%	Badan Pendapatan Daerah

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	Persen	100	100%	Badan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah					Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai	32,5	40.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai	36	40.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	57,5	75.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	40	40.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	62,5	80.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	35	40.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai	16	16.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	17	24.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengembangan SDM	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	57,50	75.00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan	Persen	22.22	67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan	Persen	55.56	53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	Persen	0	100%	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	Persen	0	100%	Inspektorat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Kecamatan Balaraja
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Balaraja
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	n/a	70	Kecamatan Balaraja
						Kecamatan Cikupa
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	89,00	98.00%	Kecamatan Cikupa

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	98.5	100	Kecamatan Cikupa
						Kecamatan Cisauk
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100%	100%	Kecamatan Cisauk
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Cisauk
						Kecamatan Curug
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	95%	99%	Kecamatan Curug
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	81.14%	85%	Kecamatan Curug
						Kecamatan Cisoka
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Cisoka
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	95	100	Kecamatan Cisoka

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Gunung Kaler
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Gunung Kaler
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	97%	100%	Kecamatan Gunung Kaler
						Kecamatan Jambe
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	89%	89,70%	Kecamatan Jambe
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	88,86	89,70	Kecamatan Jambe
						Kecamatan Jayanti
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Jayanti
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	n/a	93	Kecamatan Jayanti
						Kecamatan Kelapa Dua

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91%	91.8	Kecamatan Kelapa Dua
						Kecamatan Kemiri
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Kemiri
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100%	100	Kecamatan Kemiri
						Kecamatan Kosambi
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	87%	100%	Kecamatan Kosambi
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	49%	100	Kecamatan Kosambi
						Kecamatan Legok
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Legok

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91.60%	92	Kecamatan Legok
						Kecamatan Kresek
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	88.86%	89.70%	Kecamatan Kresek
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	88.86%	89.70%	Kecamatan Kresek
						Kecamatan Mauk
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	100%	Kecamatan Mauk
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	100	Kecamatan Mauk
						Kecamatan Kronjo
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100.00%	Kecamatan Kronjo
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100%	100	Kecamatan Kronjo

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)				
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Mekar Baru
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	65%	85%	Kecamatan Mekar Baru
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	55	75	Kecamatan Mekar Baru
						Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	87%	95%	Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	85%	95	Kecamatan Pagedangan
						Kecamatan Pakuhaji
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Pakuhaji
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	85	93	Kecamatan Pakuhaji
						Kecamatan Panongan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	90%	95%	Kecamatan Panongan
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	95%	100%	Kecamatan Panongan
						Kecamatan Pasar Kemis
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	n/a	90	Kecamatan Pasar Kemis
						Kecamatan Rajeg
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Rajeg
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	100	Kecamatan Rajeg
						Kecamatan Sepatan
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	85	92.45	Kecamatan Sepatan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	86.93	92.45	Kecamatan Sepatan
						Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	100	Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	100	Kecamatan Sepatan Timur
						Kecamatan Sindang Jaya
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	92.45%	Kecamatan Sindang Jaya
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	86	92.45	Kecamatan Sindang Jaya
						Kecamatan Solear
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	70%	89%	Kecamatan Solear
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	70	89	Kecamatan Solear

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Sukadiri
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	85%	93%	Kecamatan Sukadiri
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	88,62%	100%	Kecamatan Sukadiri
						Kecamatan Sukamulya
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	1	100%	Kecamatan Sukamulya
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
						Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100%	100%	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	86.93	100.00%	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	88.62	96	Kecamatan Tigaraksa

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	93.60	51.50	Kecamatan Tigaraksa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	100	Kecamatan Gunung Kaler
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Balaraja
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	65.00%	80.00%	Kecamatan Cikupa
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	90,00%	93,75%	Kecamatan Cisauk
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Cisoka
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75%	81%	Kecamatan Curug
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	65.00%	80.00%	Kecamatan Jambe
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	88.88%	100%	Kecamatan Jayanti
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Kemiri
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75%	100%	Kecamatan Kosambi
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75%	80.00%	Kecamatan Kresek
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Kronjo
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Mauk

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)				
1	2	3	4	5	6	7
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Legok
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	55%	75%	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75.00%	95	Kecamatan Pagedangan
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	14.29	28.57	Kecamatan Panongan
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Rajeg
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	80	90	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	60	90	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75	90	Kecamatan Sepatan
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75%	100%	Kecamatan Solear
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	90	Kecamatan Sukadiri
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	75	90%	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	70	90	Kecamatan Tigaraksa

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondis Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Balaraja
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Cikupa
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	93,25%	95,00%	Kecamatan Cisauk
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Cisoka
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	57.14%	75	Kecamatan Curug
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Jambe
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60.00%	100%	Kecamatan Jayanti
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	15%	10%	Kecamatan Kelapa Dua
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Kemiri
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60%	100%	Kecamatan Kosambi

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Kresek
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	15%	100%	Kecamatan Kronjo
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60%	100%	Kecamatan Legok
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Mauk
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Mekar Baru
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60%	90%	Kecamatan Pagedangan
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Pakuhaji
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100	Kecamatan Panongan
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60	100	Kecamatan Sepatan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60	100	Kecamatan Sindang Jaya
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100%	Kecamatan Sukadiri
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	15%	100%	Kecamatan Sukamulya
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	60	100%	Kecamatan Teluknaga
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	57.14	100	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	Kecamatan Rajeg
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	43%	71%	Kecamatan Solear
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100%	Kecamatan Gunung Kaler
	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	90,00%	95,50%	Kecamatan Cisauk

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100%	Kecamatan Kelapa Dua
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0	100%	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100	Kecamatan Balaraja
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	Kecamatan Cikupa
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0	84	Kecamatan Cisoka
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0%	83	Kecamatan Curug
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	88,86	89,70	Kecamatan Jambe
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0	100	Kecamatan Jayanti
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	88,86	89,70	Kecamatan Kemiri
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0%	100	Kecamatan Kosambi
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0.00%	100%	Kecamatan Kresek
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	Kecamatan Kronjo
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0	100	Kecamatan Legok
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	Kecamatan Mauk
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	75	Kecamatan Mekar Baru

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	10	Kecamatan Pagedangan
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	70	Kecamatan Pakuhaji
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100%	Kecamatan Panongan
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	Kecamatan Pasar Kemis
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	85	93	Kecamatan Sepatan
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	Kecamatan Sindang Jaya
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	80%	Kecamatan Sukadiri
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Kecamatan Sukamulya
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Kecamatan Teluknaga
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	Kecamatan Rajeg
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	0	80	Kecamatan Solear
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	Kecamatan Gunung Kaler
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100%	Kecamatan Rajeg
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	12.50%	90.40%	Kecamatan Balaraja

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	87.50%	95,50%	Kecamatan Cisauk
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	97%	100%	Kecamatan Cisoka
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	77.77%	89%	Kecamatan Curug
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	97%	100%	Kecamatan Gunung Kaler
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	42.86%	79.89%	Kecamatan Jambe
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	88.88%	100%	Kecamatan Jayanti
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100%	Kecamatan Kelapa Dua
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	95%	100%	Kecamatan Kemiri
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	86%	100%	Kecamatan Kosambi
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	78%	79.89%	Kecamatan Kresek
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100	Kecamatan Kronjo
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100%	Kecamatan Legok
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	85.71%	92	Kecamatan Mauk
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	55%	75%	Kecamatan Mekar Baru
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	77%	95%	Kecamatan Pagedangan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	95%	100%	Kecamatan Pakuhaji
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100	Kecamatan Panongan
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100%	Kecamatan Pasar Kemis
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100%	Kecamatan Rajeg
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	85.71	92	Kecamatan Sepatan
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	80	88%	Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	85.71	92	Kecamatan Sindang Jaya
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	70%	89%	Kecamatan Solear
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	85.71	92	Kecamatan Sukadiri
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100%	100%	Kecamatan Sukamulya
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	100%	Kecamatan Teluknaga
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	83.33	92	Kecamatan Tigaraksa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
		Komponen Pelaporan SAKIP	Nilai	11,18	11,5	Sekretariat Daerah

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
4	Prioritas 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	80	
	PP.13 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	92,95	95,5	
		Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW		8%	55%	
		Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan, dan Pemakaman yang Layak		0,9433	0,9442	
		Rasio Konektivitas Kabupaten			0,83	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					Dinas Bina Marga dan SDA
		Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	63.20	84%	Dinas Bina Marga dan SDA
		Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	Persen	63.6	100%	Dinas Bina Marga dan SDA
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
		Cakupan Sarana Air Bersih	Persen	59.07	88.67	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
		Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	Persen	103.64	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	Persen	96.35	96.88	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	0.136	0.146	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	11.43	12.93%	Dinas Bina Marga dan SDA
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	Persen	100	100.00	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	Persen	45.45%	100%	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	Persen	47.47%	100%	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	Persen	50	70	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	Persen	30	50	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Persen	7.92	6%	Dinas Bina Marga dan SDA

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Persen	60	76	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Persen	100	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persen	100	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persen	100	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
		Persentase Rumah Layak Huni	Persen	2.76	14.03	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP	Persen	78%	90%	Dinas Sosial
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	Persen	100	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					Dinas Perhubungan
		Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jaringan	N/A	7	Dinas Perhubungan
		Terminal yang terbangun	Unit	N/A	3	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio	N/A	0.7	Dinas Perhubungan
		Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	Persen	1	100.00%	Dinas Perhubungan
		Persentase Perlangkapan Jalan	Persen	75%	92%	Dinas Perhubungan
	PP.14 Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,88	56,89	
		Indeks Resiko Bencana		130,45	115	
	Program Penanggulangan Bencana					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1. Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya	Jumlah Desa dan Kelurahan	0	182	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama	Jumlah Desa dan Kelurahan	0	92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persen	95%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3. Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	100	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(Tujuan/Impact/Outcome)				
1	2	3	4	5	6	7
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat	Dokumen	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	Penilaian	20	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	Persen	50%	50%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Pelaku Usah	100	750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola	Persen	2,7	3,60%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbuan Sampah yang Terkelola	Persen	55	64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, 2025

j. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2026 dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berikut adalah rekapitulasi program prioritas Kabupaten Tangerang 2025:

Tabel 1.17
Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pendidikan	74 Persen	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	53 Angka	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95.5 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	95.5 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	80.5 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 angka	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan	100 persen	Dinas Pendidikan
	Tercapainya Peserta Didik yang dapat baca tulis Al Quran	10000 Siswa	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	91 Persen	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	85 Persen	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan	100 Persen	
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan RSUD	100 Persen	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	82 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	92.59 Persen	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	100 Persen	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100 Persen	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100 Persen	
	Persentase pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	84.90 Angka	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas	100 Persen	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang melakukan Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	100 Persen	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100 Persen	
	Persentase anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100 Persen	
	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Balita Wasting	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	100 Persen	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100 Persen	
	kesehatan persalinan sesuai standar		
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100 Persen	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	100 Persen	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84.90 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Balita	100 Persen	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85 Nilai	
	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	100 Persen	
	Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	
	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	100 Persen	
	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kehatan bayi baru lahir	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kehatan Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kehatan Balita	100 Persen	
	Persentase orang dengan risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	92.59 Persen	
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 Persen	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	0.10 Persen	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94 Persen	
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	100 Persen	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	100 Persen	
	Persentase Balita Wasting	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	100 Persen	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	100 Persen	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Persen	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Persentase P-IRT yang sesuai standar	100 Persen	Dinas Kesehatan
KES EHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	100 Persen	
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	100 Persen	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	100 Persen	
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	70 Persentase	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	80 Persen	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	96,7 Persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	100 Persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	73 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks ketangguhan Desa (IKD)	91 Desa/Kelurah an	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100 Persen	
	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1500 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100 persen	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air Bersih	80.67 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	96.75 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	11.09 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar	50.64 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum	35.4 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	14.14 persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	14.14 persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	0.143 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	Satuan Pol PP
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	Satuan Pol PP
	Persentase Linmas yang terlatih Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	55 persen 100 persen 100 persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	33,33 persen	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32,70 persen	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	Dinas Sosial

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP	85 persen	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32,70 persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	35 Lembaga	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	75 Persen	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Wirausaha Baru	660 Orang	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	96.87 Persen	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	1.25 Persen	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n	8 KK	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	35 Lembaga	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten		
		75 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Seluruh Kluster Hak Anak	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan terhadap Anak	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DLHK	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup	33 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	33 Persen	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah	1,5 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang terkelola	1,2Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	85 persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	27 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	62 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah	1,5 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	62 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah SKDWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWNl	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	100 Persen	
	Cakupan Perekaman KTP-el	99,47 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	70 Persen	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	99,5 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Kematian	100 Persen	
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan	100 Persen	
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian	100 Persen	
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Pengesahan Anak	100 Persen	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata	0,81 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasamanya	0,81 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	14,23 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya fungsi Administrasi DPPKB secara efektif	100 persen	
	Meningkatnya manajemen dan kompetensi ASN DPPKB	100 persen	
	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem informasi pengendalian kependudukan	100 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan		
		100 Persen	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan GDPK Tingkat kabupaten	2 Kali	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terlaksananya pendidikan kependudukan jalur formal dan informal	3 Kali	
	Terlaksananya pengendalian program Bangga Kencana	20 sekolah	
	Terlaksananya sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga	1 kali	
	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan	4 Kegiatan	
	Tersediannya data dan sosialisasi IPBK	103 orang	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	95 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	70 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	92.25 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kerjasama dengan mitra kerja	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fungsi Administrasi DPPKB secara efektif	100 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya manajemen dan kompetensi ASN DPPKB	100 persen	
	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	
	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 persen	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	95 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	70 Persen	Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	66,67 Persen	Dinas Perhubungan
	Persentase Perlangkapan Jalan	75 Persen	
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	2 jaringan	
	Terminal yang terbangun	1 Terminal	
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0,5 Angka	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	66,67 Persen	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	2 Jaringan	
	Terminal yang terbangun	1 Terminal	
	Persentase Perlangkapan Jalan	75 75 Persen	
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0,5 Angka	
PROGRAM	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	66,67 Persen	
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0,5 Angka	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terminal yang terbangun	1 Terminal	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	2 Jaringan	
	Persentase Perlangkapan Jalan	75 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
APLIKASI INFORMATIKA			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	80 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase layanan kemanan informasi	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika\
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	21.43 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	27.03 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	17.86 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	26.79 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	3.1 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	2.14 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	1,60 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP	100 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi	25 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	75 Persen	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	33,33 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	79,0 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	74 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online	80 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	70 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan	40 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	75 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	70 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	50 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0,6 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	1,5 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,5 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	67,34 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	16.90 Persen	
		100 Persen	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	1 dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	82,63 Persen	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	80 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	50 Pesen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	60 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	40 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	86 Persen	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	90 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	75 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	65,93 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP	95,24 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	30 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	28.72 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	25,05 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	25,05 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori Sedang	Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Indeks Cukup	
		100 Persen	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	100 persen	Sekretariat Daerah
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	100 Persen 100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	Sekretariat DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	64 Persen 100 Persen	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
	Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
	Persentase OPD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan	75 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan		
KEUANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	79 Persen	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan	100 Persen	
	Pengembangan Pendapatan Daerah		
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pencapaian Kinerja Akuntansi Daerah (Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran	95 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Pencapaian Kinerja Anggaran Daerah (Rata rata dari Persentase pencapaian Mandatory Spending, Persentase Kesesuaian Waktu Penyusunan KUA PPAS, Persentase Kesesuaian Waktu penyampaian Nota Keuangan, Persentase Kesesuaian Waktu Perstujuan RAPBD)	98.25 Persen	
	Persentase Pencapaian Waktu Pencairan Kas Daerah Berdasarkan Kesesuaian Dokumen Pencairan	100 Persen	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rata rata dari Persentase pengajuan sertifikasi Aset dan Persentase capaian pencatatan data aset	97 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakusahkan	85 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEPEGAWAIAN			

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	16 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	40 Nilai	
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	24 Nilai	Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	40 Nilai	
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	80 Nilai	
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	72,5 Nilai	
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40 Nilai	
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	40 Nilai	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Aspek Pengembangan Karier	72,5 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	80 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	40 Nilai	
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	72,5 Nilai	
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40 Nilai	
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	40 Nilai	
	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	16 Nilai	
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	40 Nilai	
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	24 Nilai	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	66,07 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	100 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa	100 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91,90 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90,25 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	95 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart	100 Persen	Kecamatan Cikupa
		100 Persen	
		95 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Cikupa
			Kecamatan Cikupa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90,25 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Panongan	100 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 Persen	Kecamatan Panongan
	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart Kec. Panongan		
		94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan	28.57 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kec. Panongan	100 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Panongan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan	100 Persen	Kecamatan Panongan
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	98,30 Persen	Kecamatan Curug
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug	84 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug	80 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM KOORDINASI	Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	73 Persen	Kecamatan Curug
ETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	81 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	89,30 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Legok
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Legok

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kresek
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kresek

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kronjo
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Mauk
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Mauk

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Rajeg
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Sepatan
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Sepatan
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuh Kec. Teluknagaan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Teluknaga
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 Persen	
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	Kecamatan Teluknaga

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Cisoka
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PEMERINTAHAN UMUM			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Paku Haji
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kosambi
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan	100 Persen	Kecamatan Pagedangan
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang Terpelihara	100 persen	Kecamatan Pagedangan
	Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan	100 persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90 persen	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	80 persen	Kecamatan Pagedangan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 persen	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	95 persen	Kecamatan Pagedangan
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90 persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Jambe
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Jambe

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Jayanti
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Jayanti
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kemiri
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kemiri

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri	100 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	92 Persen	Kecamatan Sukadiri
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri	89,5 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	79 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Cisauk
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Sindang Jaya

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,90 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91,90 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	87 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	71,43 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Solear	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	90 Persen	Kecamatan Solear
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	78 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	50 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Solear	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Mekar Baru	100 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	58 Persen	Kecamatan Mekar Baru
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	63 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	58 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	65 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	70 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	67 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	0,09 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	8,61 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	14,29 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,91 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	12,94 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing masing kementerian yang membawahi urusan wajib Pelayanan Dasar. Tindak lanjut dari masing-masing kementerian terkait SPM tersebut yaitu : Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 untuk bidang Pendidikan, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 bidang Kesehatan, PermenPUPR Nomor 29 Tahun 2018 bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permensos 9 Tahun 2018 bidang Sosial, Permendagri 121 Tahun 2018 Sub Bidang Trantibum, Permendagri 101 Sub Bidang Bencana dan Permendagri 114 Tahun 2018 Sub Bidang Kebakaran. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar Pelayanan Minimal menjadi begitu penting mengingat manfaatnya bagi Pemerintah Daerah diantaranya :

1. Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
2. Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik.
3. Menjadi landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan;
4. Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;
5. Menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan

Mengingat arti penting SPM, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan peraturan bupati ini dan peraturan lain di atasnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Selain hal tersebut dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di Kabupaten Tangerang, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sesuai Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 -2026.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Capaian dan target pembangunan yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel. 1.18
Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2020-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
1.	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN									
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	66,52	99,26	98.13	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		49,42	51,59	54,42	56,68	53,94	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		37,1	39,54	41,54	42,45	40,27	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		56,43	60,03	63,03	66,07	63,12	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		52,4	52,97	54,97	56,94	54,80	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SD	nilai		75,31	81,91	85,00	88,99	85,07	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	nilai		63,28	86,23	88,00	91,21	87,26	Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SD	nilai		71,12	73,76	75,00	79,96	76,38	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai		74,49	75,96	80,00	82,64	80,21	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	nilai		64,12	75,42	77,00	79,84	77,33	Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SMP	nilai		65,92	72,94	75,00	79,14	76,36	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi	%	69,90	74,21	96.63	80	100	100	Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
		dalam pendidikan kesetaraan								
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	68,09	82,49	67,65	80	100	100	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%		59,21	54,58	54,60	54,64	62,10	Dinas Pendidikan
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%		69,10	55,16	56,00	57,96	63,00	Dinas Pendidikan
2.	BIDANG URUSAN KESEHATAN									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	99,04	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	99,77	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,57	92,38	98,07	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	89,32	96,32	95,08	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,24	86,33	98,61	70	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	84,45	70,80	97,27	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,62	87,34	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,65	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	76,66	90,71	96,45	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,42	72,19	98,75		100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	76,43	69,67	100	90	100	100	Dinas Kesehatan
3.	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM									
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	36,46	34,78	72,43	60	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,52	2,11	91,89	20	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
4.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni	%	15,00	62,50	100	35	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	66,27	100	50	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	100	100	99.54	100	100	100	Satuan Pol PP
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	59,56	100	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	92.8	100	100	100	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	78,11	84,29	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	78,36	86,38	96.95	100	100	100	BPBD
6.	BIDANG URUSAN SOSIAL									
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20,29	75,82	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,28	84,82	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	%	17,47	84,63	97.33	70	100	100	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
		rehabilitasi sosial diluar panti								
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	65,55	90,00	93.33	80	100	100	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	40	69,91	88.37	80	100	100	Dinas Sosial

Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, 2026

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperoleh dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Tangerang tahun 2025 mencapai 76,74 mengalami peningkatan laju kinerja makro sebesar 0,72% bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 76,19. Secara grafis nilai IPM Kabupaten Tangerang dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025

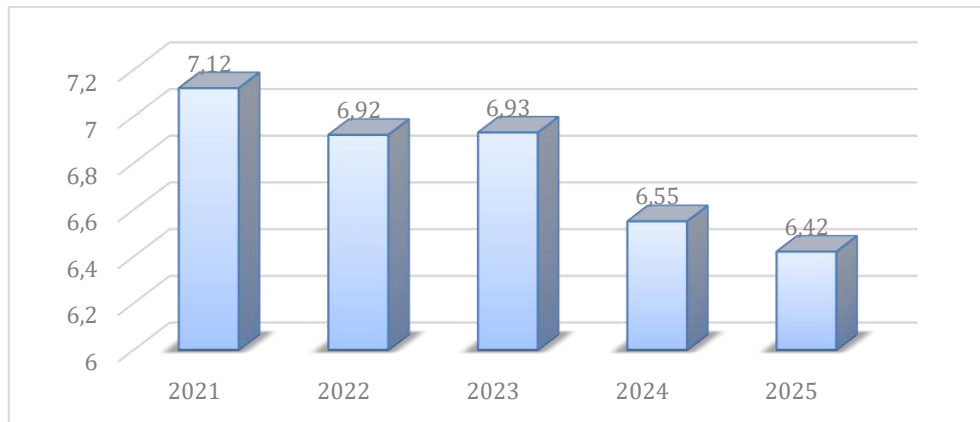


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2026

2.1.2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,55% dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi sebesar 6,4%. Perbandingan angka kemiskinan dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025

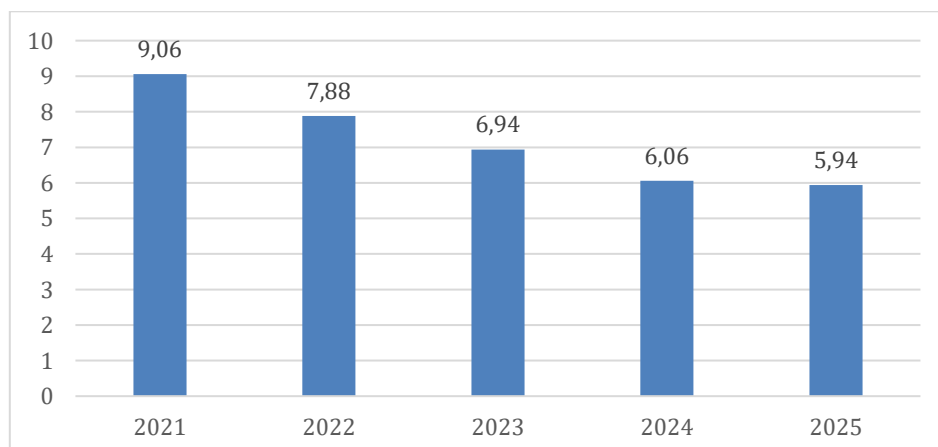


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2026

2.1.3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran Kabupaten Tangerang sebagaimana dirilis BPS Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 6,06% pada tahun 2024 menjadi 5,94% pada tahun 2025.

Grafik 2.3
Angka Pengangguran Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025

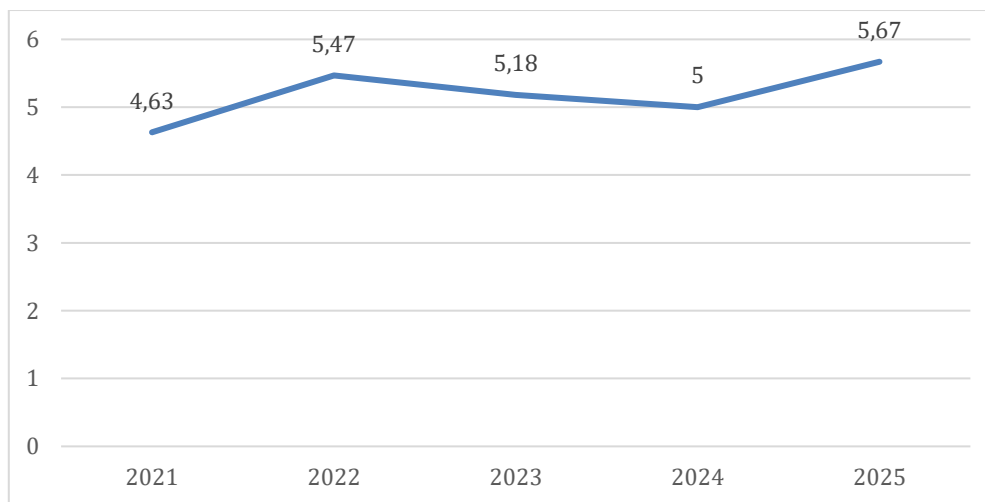


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2026

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tangerang pada tahun 2025 mencapai angka 5,67% yang berarti naik 13,40% jika dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 5%.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2026

2.1.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu daerah. Pendapatan per kapita Kabupaten Tangerang untuk tahun 2024 sebesar 55.170.000,00 naik menjadi 56.840.000,00 pada tahun 2025.

Tabel 2.1
Pendapatan per kapita Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025

NO	TAHUN	PENDAPATAN PER TAHUN
1.	2021	Rp. 44.300.000,00
2.	2022	Rp. 48.220.000,00
3.	2023	Rp. 51.540.000,00
4.	2024	Rp. 55.170.000,00
5.	2025	Rp. 56.840.000,00

Grafik 2.5
Pendapatan per kapita per tahun
Tahun 2021-2025

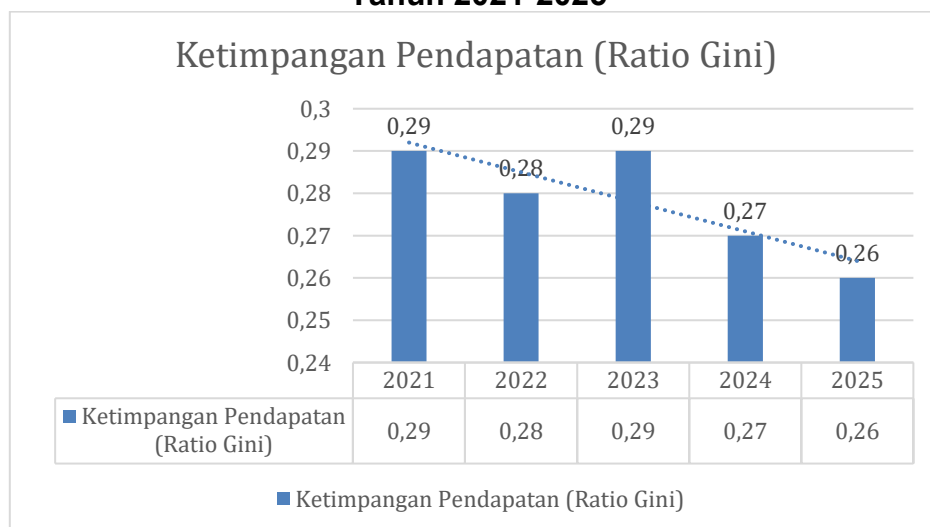


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2026

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima Masyarakat yang menyebabkan perbedaan pendapatan antar golongan dalam Masyarakat tersebut. Angka ketimpangan pendapatan (Ratio Gini) Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar 0,26 turun jika dibandingkan tahun 2024 yang menunjukkan angka 0,27.

Grafik 2.6
Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2026.

Indikator Kinerja Makro di Kabupaten Tangerang selama tahun 2024 dan tahun 2025 disajikan dalam bentuk ringkasan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Makro di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja Tahun N (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76,19	76,74	0,72
2.	Angka Kemiskinan	6,55	6,42	-1,98
3.	Angka Pengangguran	6,06	5,94	-1,98
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5	5,67	13,40
5.	Pendapatan Perkapita	55.17	56,84	3,03
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.27	0.26	-3,70

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN				
	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	91.02	Dinas Pendidikan	
	1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.00	Dinas Pendidikan	
	1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	74.31	Dinas Pendidikan	
	1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	61.92	Dinas Pendidikan	
	1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	57.99	Dinas Pendidikan	
2.	KESEHATAN				
	1.b.1	Persentase kematian ibu	0.03	Dinas Kesehatan	
	1.b.2	Prevalensi stunting	7.30	Dinas Kesehatan	
	1.b.3	(pendek dan sangat pendek) pada balita	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.9	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
	1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN				
	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	6.71	DBMSDA	
	1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	76.06	DBMSDA	
	1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	60.47	DPPP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.99	DPPP	
	1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	1.96	DBMSDA/DTRB	
	1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Tidak dapat dilaksanakan	DBMSDA	
	1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	99.68	DTRB	
	1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tidak dapat dilaksanakan	DTRB	
	1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	DBMSDA	
	1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	43.51	DTRB	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	1.d1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	DPPP	
	1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100	DPPP	
	1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	44.01	DPPP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100	DPPP	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	BPBD	
	1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satpol PP	
	1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100	Satpol PP	
	1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	70.68	BPBD	
	1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	BPBD	
6	SOSIAL				
	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINSOS	
	1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINSOS	
	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINSOS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINSOS	
	1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	DINSOS	
	1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	DINSOS	
7	TENAGA KERJA				
	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	DISNAKER	
	2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	33.24	DISNAKER	
	2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	DISNAKER	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2.g.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	DP3A	
	2.g.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	DP3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pangan				
	2.h.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	157.23	DISTAN	
10	PERTANAHAN				
	2.i.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	64.29	DPMPTSP	
	2.i.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	56.64	DPPP	
	2.i.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	9.09	DPMPTSP	
11	LINGKUNGAN HIDUP				
	2.j.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	91.25	DLHK	
	2.j.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	62.00	DLHK	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	91.37	DISDUKCAPIL	
	2.f.2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	58.86	DISDUKCAPIL	
	2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun yang dipublikasikan	100	DISDUKCAPIL	
	2.f.4	Persentase kepemilikan kartu tanda	98.83	DISDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penduduk elektronik (KTP)			
	2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
	2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
	2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tuntas hasil 100%	DPMPD	
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	76.00	DPMPD	
	2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	9.09	DPMPD	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	82.07	DPPKB	
	2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	58.90	DPPKB	
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	31.43	DPPKB	
15	PERHUBUNGAN				
	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	0.65	DISHUB	
	2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.37	DISHUB	
	2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi	0.00	DISHUB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sistem manajemen keselamatan			
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.j.1	Persentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100	DISKOMINFO	
	2.j.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	69.57	DISKOMINFO	
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	DISKOMINFO	
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	2.k.1	Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi	-11.95	DISKUM	
	2.k.2	Persentase Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100	DISKUM	
18	PENANAMAN MODAL				
	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	43.20	DPMPTSP	
	2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	154.08	DPMPTSP	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100	DISPORABUDPAR	
	2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.16	DISPORABUDPAR	
	2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari	5.63	DISPORABUDPAR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi			
	2.m.4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	71.70	DISPORABUDPAR	
20	STATISTIK				
	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	90.35	DISKOMINFO	
21	PERSANDIAN				
	2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	97.82	DISKOMINFO	
22	KEBUDAYAAN				
	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	0	DISPORABUDPAR	Surat Keterangan
	2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	2.14	DISPORABUDPAR	
23	PERPUSTAKAAN				
	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	58.46	DISPERPUSIP	
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	11.79	DISPERPUSIP	
24	KEARSIPAN				
	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	100	DISPERPUSIP	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	101.64	DISKAN	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	41.68	DISKAN	
26	PARIWISATA				
	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	1.87	DISPORABUDPAR	
	3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-54.63	DISPORABUDPAR	
	3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-11.84	DISPORABUDPAR	
27	PERTANIAN				
	3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	7.17	DISTAN	
	3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	-9.56	DISTAN	
	3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	1.01	DISTAN	
	3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100	DISTAN	
30	PERDAGANGAN				
	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100	DISPERINDAG	
31	PERINDUSTRIAN				
	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota	100	DISPERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota			
	3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	71.21	DISPERINDAG	
	3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	17.29	DISPERINDAG	
	3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	41.69	DISPERINDAG	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan				
	4.a.1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	64.71	BAPPEDA	
2.	Keuangan				
	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk	25.79	BPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya			
	4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	59.47	BPKAD/BAPENDA	
	4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	61.97	BPKAD	
	4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	46.80	BPKAD	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	84.41	BKPSDM	
4	Penelitian dan Pengembangan				
	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	59.46	BAPPEDA	
5	Fungsi Pengawasan				
	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan	2	INSPEKTORAT	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	2	INSPEKTORAT	
	4.e.3	Manajemen risiko Indeks	2	INSPEKTORAT	
	4.e.4	Persentase Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	90.31	INSPEKTORAT	
6	Pengadaan				
	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Bagian PBJ	
	4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	19.84	Bagian PBJ	
	4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	30	Bagian PBJ	
7	Hubungan dengan Perwakilan Daerah				
	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	Bagian Hukum	
	4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	46.67	Bagian Hukum	
8	Pelayanan Publik				
	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	84.33	ORGANISASI	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merujuk pada transparansi pencapaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selama satu periode kepada masyarakat. Pengukuran capaian kinerja memiliki manfaat yang penting, yaitu memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal pemerintah tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menggunakan capaian dari target kinerja sebagai tolak ukur realisasi program mereka dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dalam RPD 2024-2025, sejumlah target kinerja telah ditetapkan sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan daerah. Namun, berdasarkan hasil realisasi tahun 2024, ditemukan bahwa beberapa indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2025 telah terlampaui lebih awal sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja tahun 2025. Hal ini menunjukkan efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta adanya percepatan pencapaian sasaran strategis.

Akibat dari pencapaian ini, target yang terdapat dalam PK 2025 mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan mencerminkan tantangan yang lebih tinggi dalam pengelolaan kinerja instansi.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Indeks	0.7
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	2. Indeks Kesehatan	Indeks	0.86
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	3. Indeks pembangunan Pemuda	Indeks	53
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	4. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	5. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.15
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	6. Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	7. Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	%	3.48
		8. Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	%	5.12
		9. Persentase Daya saing produk unggulan lokal	%	26.52
		10. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3.57

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	11. Indeks desa membangun	Indeks	0.7853
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	12. Indeks ketahanan pangan	Indeks	78.00
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	13. Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67.85
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	14. Persentase PPKS yang berdaya	%	1.69
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	15. Nilai Sakip	Nilai	78
		16. Nilai indeks kemandirian fiskal	Indeks	0.525
		17. Opini BPK	Kategor	WTP
		18. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	75
		19. Maturitas SPIP terintegrasi	Angka	3
		20. Indeks SPBE	Indeks	3.19
		21. Indeks Pelayanan publik	Indeks	4.3
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	22. Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	%	95
		23. Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	55
		24. Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang	Rasio	0.9442

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		layak		
		25. Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	0.83
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	26. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56.89
		27. Indeks resiko bencana (IRBI)	Indeks	115

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja, dilakukan perbandingan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis. Dengan cara ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,82	76,74	103,96
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,70	0,66	94,77
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,86	0,856	99,52
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53	57,50*	108,49
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	64	69,37*	108,39
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	1,20	95,83
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong		Indeks Kesalehan Sosial	76	82,73	108,86
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	1	100
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20-5,33	5,67	106,38

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,36	5,94	123,91
			Persentase Penduduk Miskin	5,74	6,42	89,4
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	3,48	11,61	333,62
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	5,12	43,2	843,74
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	26,52	26,52	100
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3,57	4,83	135,29
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7853	0,7853	100
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78	79,39	101,78
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,85	66,26	97,66
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	1,69%	1,69%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	65	84,56	130,09
			Nilai SAKIP	78	77,87	99,83
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0,525	0,605	115,24
			Opini BPK	WTP	WTP*	100
			Indeks Profesionalitas ASN	75	83,65	111,53
			Maturitas SPIP Terintegrasi	3	2,6	86,67
			Indeks SPBE	3,19	3,91*	122,57
			Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,22	98,14
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	72,41	92,83
			Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	95	97*	102,11
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	55%	57,72%	104,95
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan	0,9442	0,9473	100,33

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
			Pemakaman yang layak			
			Rasio Konektivitas Kabupaten	0,83	0,6	72,29
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,89	60,18	105,78
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	115	125,22	91,84

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,19	76,74
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,66	0,66
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,851	0,856
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	52,13	57,50*
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,37	69,37*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025
		dalam Pembangunan			
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	1,20
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong		Indeks Kesalehan Sosial		82,73
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	1
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5	5,67
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,06	5,94
			Persentase Penduduk Miskin	6,55	6,42
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	-0,28	11,61
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)		43,2
			Persentase Daya Saing	28,83	26,52

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025
			Produk Unggulan Lokal		
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3,9	4,83
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7812	0,7853
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,60	79,39
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,88	66,26
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	1,48%	1,69%
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi		84,56
			Nilai SAKIP	75,2	77,87
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0,5324	0,605
			Opini BPK	WTP	WTP*
			Indeks Profesionalitas ASN		83,65
			Maturitas SPIP Terintegrasi	3,359	2,6
			Indeks SPBE	3,91	3,91*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025
			Indeks Pelayanan Publik	4,17	4,22
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		72,41
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	97	97*
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	37%	57,72%
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak		0,9473
			Rasio Konektivitas Kabupaten	0,4	0,6
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,8	60,18
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	125,22	125,22

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Perbandingan reFalisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,66	0,71	93,44
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,856	0,8	106,98
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks pembangunan Pemuda	57,50*	54	106,48
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,37*	64	108,39
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,05	87,50
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	2,38	238,00
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	11,61	3,88	299,23
		Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	43,2	5,12	843,74
		Persentase Daya saing produk unggulan lokal	26,52	30,3	87,52

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	4,83	3,73	129,49
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks desa membangun	0,7853	0,7507	104,61
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	79,39	78,5	101,13
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,26	68,65	96,52
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang berdaya	1,69%	1,87%	90,37
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Sakip	77,87	80,5	96,73
		Nilai indeks kemandirian fiskal	0,605	0,53	114,15
		Opini BPK	WTP*	WTP	100
		Indeks profesionalitas ASN	83,65	81	103,27
		Maturitas SPIP terintegrasi	2,60	3,37	86,67
		Indeks SPBE	3,91*	3,21	121,81
		Indeks Pelayanan publik	4,22	4,4	95,91
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	97*	95,5	101,57
		Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	57,72%	55%	104,95
		Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	0,9473	0,9442	100,33

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
		Rasio konektivitas kabupaten	0,6	0,83	72,29
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,18	56,89	105,78
		Indeks resiko bencana (IRBI)	125,22	115	91,84

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebanyak 14 Sasaran Strategis.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang. dari sebanyak 14 Sasaran Strategis dengan 27 indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel diatas.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi. kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran. agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja. perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RPD.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

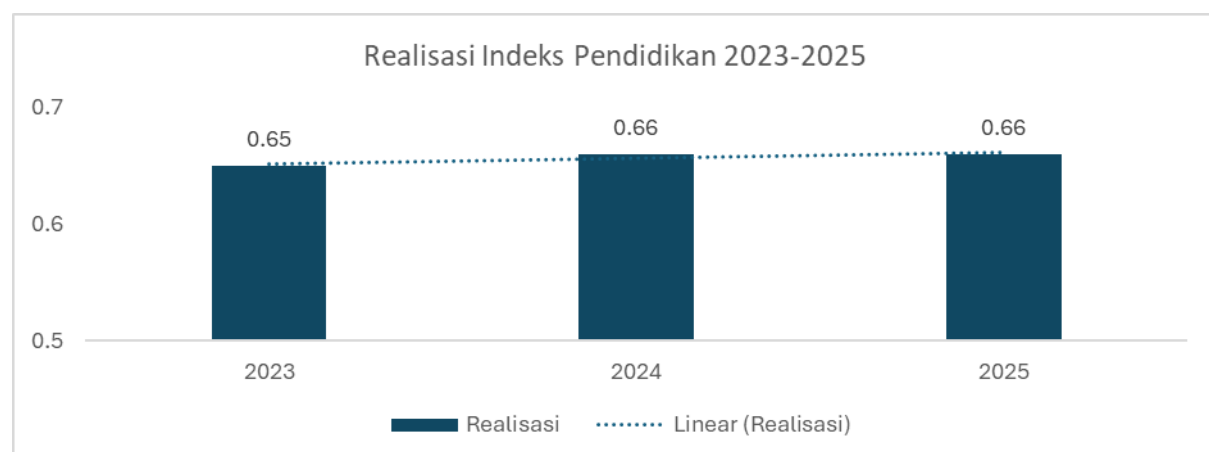
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 14 Sasaran Strategis dengan 27 indikator akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui rencana aksi kedepan sebagai upaya nyata

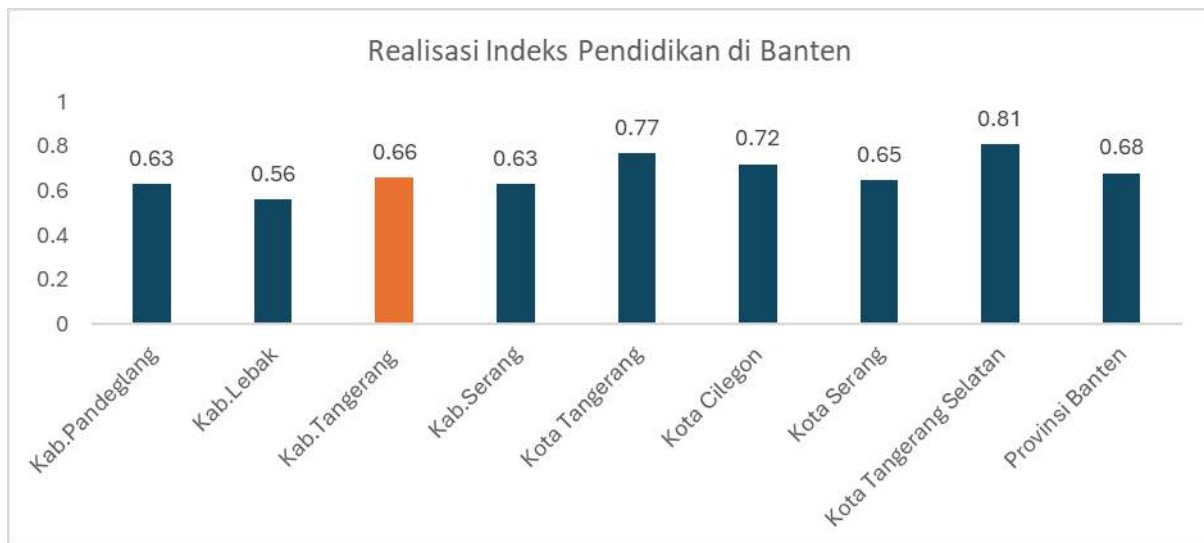
pelaksanaan peningkatan dan perbaikan.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 01 MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

INDEKS PENDIDIKAN			
Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,70	0,66	95%	0,71





Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Indeks ini dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan akses serta tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Data Capaian RLS dan HLS Kabupaten Tangerang (Sumber: www.bps.go.id)	
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,16 Tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,89 Tahun

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{pend} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Langkah perhitungan :

1. Menghitung Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$IHLS = \frac{12,89 - 0}{18 - 0} = \frac{12,89}{18} = 0,716$$

2. Menghitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (IRLS)

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$IRLS = \frac{9,16 - 0}{15 - 0} = \frac{9,16}{15} = 0,611$$

3. Menghitung Indeks Pendidikan

$$I_{pend} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

$$IPend = \frac{0,716 + 0,611}{2} = \frac{1,327}{2} = 0,663$$

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan indeks pendidikan, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 indeks pendidikan tercatat 0,65 dan 2024 sebesar 0,66, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,663. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih belum memenuhi target 2025 sebesar 0,70.

Berdasarkan realisasi Indeks Pendidikan di Provinsi Banten, terlihat adanya kesenjangan antara kabupaten dan kota. Secara umum, kabupaten memiliki indeks pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kota.

Dari empat kabupaten di Banten, **Kabupaten Tangerang** memiliki capaian tertinggi dengan indeks **0,66**, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang sama-sama berada di angka **0,63**, serta Kabupaten Lebak yang memiliki indeks pendidikan terendah sebesar **0,56**.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kota-kota di Banten, indeks pendidikan kabupaten tertinggal cukup jauh. Kota Tangerang Selatan mencatat capaian tertinggi sebesar **0,81**, disusul oleh Kota Tangerang **0,77** dan Kota Cilegon **0,72**. Bahkan Kota Serang yang memiliki indeks **0,65**, masih lebih tinggi dari tiga kabupaten di Banten.

Hal ini mencerminkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor seperti infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses terhadap pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan. Kabupaten umumnya menghadapi tantangan dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan sarana dan prasarana pendidikan.

Faktor penyebab ketidakcapaian

1. Keterbatasan sarana, prasarana, dan fasilitas pembelajaran

Ketidakcapaian indeks pendidikan dipengaruhi oleh belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal sarana dan prasarana, kerusakan bangunan sekolah, keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan TIK, serta ketidaksesuaian standar harga satuan barang yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan riil satuan pendidikan.

2. Keterbatasan SDM pendidikan dan kapasitas pengelolaan

Jumlah dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan yang belum merata, ditambah rendahnya kapasitas pengelola administrasi dan aplikasi pendidikan (Dapodik dan ARKAS), menyebabkan kualitas layanan pendidikan dan tata kelola belum optimal.

3. Tata kelola, pembiayaan, dan kebijakan belum optimal

Pengelolaan keuangan dan aset yang belum sepenuhnya sesuai rekomendasi auditor, pelaksanaan kebijakan sekolah gratis yang belum sesuai kebutuhan riil, serta belum tersedianya kebijakan daerah yang adaptif menyebabkan efektivitas program pendidikan belum maksimal.

4. Akses, pemerataan, dan dukungan lingkungan pendidikan masih rendah

Masih adanya peserta didik putus sekolah akibat faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kesenjangan digital, serta belum optimalnya layanan pendidikan inklusi menunjukkan akses dan pemerataan pendidikan belum merata.

5. Mutu pembelajaran dan karakter peserta didik belum optimal

Rendahnya capaian indikator mutu pendidikan, masih terjadinya perundungan dan penyalahgunaan narkoba di sekolah, serta lemahnya penguatan karakter peserta didik menjadi faktor yang menurunkan kualitas hasil pendidikan secara keseluruhan.

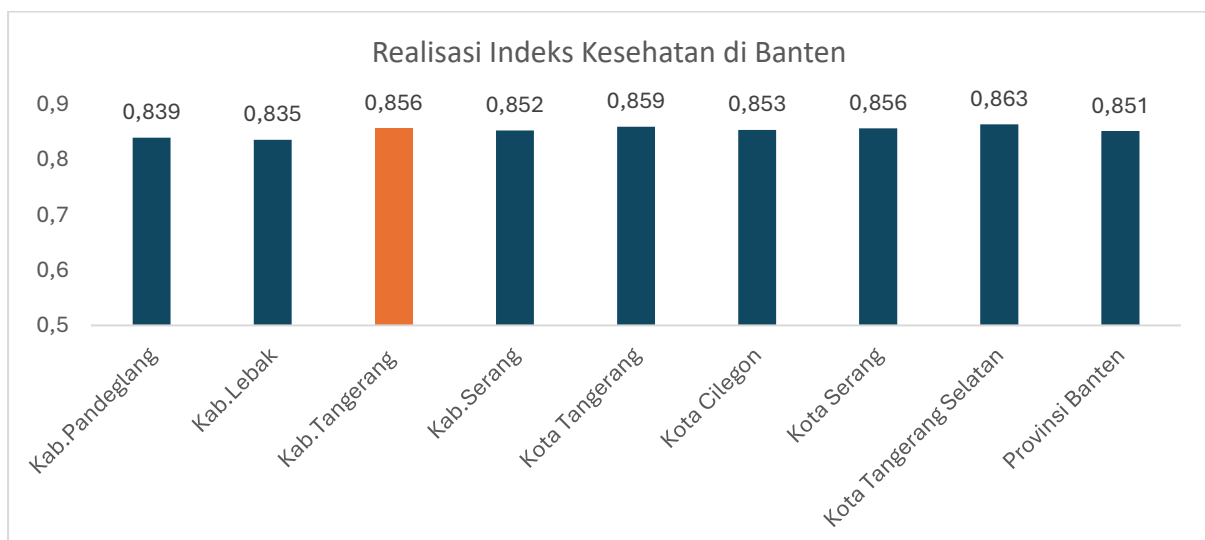
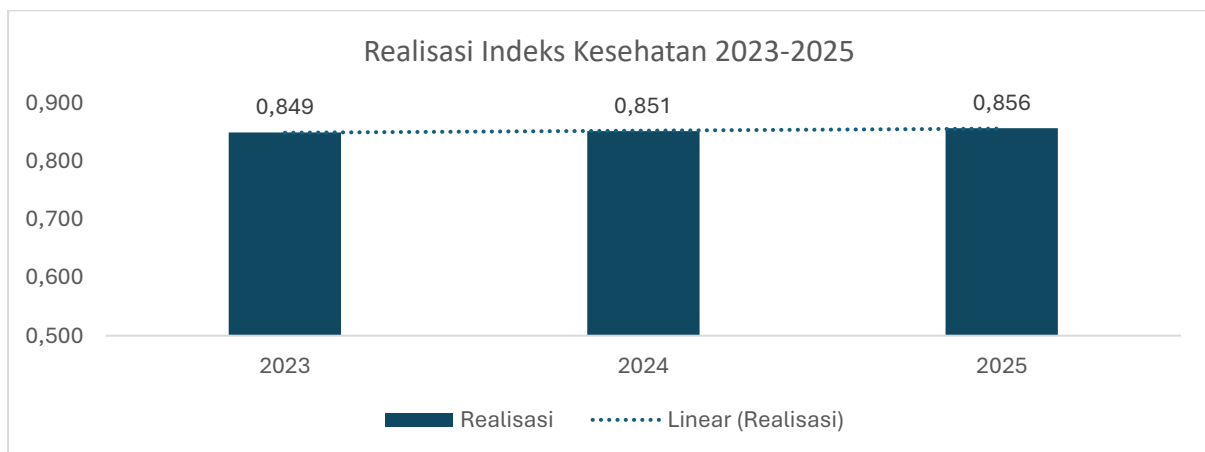
RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
2. Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi minimal;
3. Sebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Pemenuhan layanan satuan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas;
5. Tersedianya unit layanan disabilitas Kabupaten Tangerang;
6. Pemberian beasiswa pada masyarakat berpenghasilan rendah pada jenjang SD, SMP dan Kesetaraan melalui program PAKADES (program pendidikan kesetaraan di desa);
7. Memperluas akses layanan pendidikan dengan pelaksanaan program sekolah gratis swasta;
8. Meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di Satuan Pendidikan Negeri.

SASARAN 02 MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN

INDEKS KESEHATAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,860	0,856	99,52%	0,800



Indeks kesehatan adalah salah satu komponen dasar dalam mengukur kualitas hidup berdasarkan dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Data Capaian UHH Kabupaten Tangerang (Sumber: <i>banten.bps.go.id</i>)	
Umur Harapan Hidup (UHH)	75,63 Tahun

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Ikes = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

Langkah perhitungan :

$$UHH_{min} = 20$$

$$UHH_{max} = 85$$

$$UHH \text{ Kabupaten Tangerang tahun 2025} = 75,63$$

$$Ikes = \frac{75,63 - 20}{85 - 20}$$

$$Ikes = \frac{55,63}{65} = 0,856$$

Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor kesehatan, sebagaimana tercermin dalam pencapaian Indeks Kesehatan yang terus meningkat. Dengan realisasi indeks kesehatan yang mencapai 0,856 pada tahun 2025, pencapaian ini tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan.

Kabupaten Tangerang memiliki indeks kesehatan sebesar 0,856. Ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten, setara dengan Kota Serang (0,856) dan hanya sedikit lebih rendah dibanding Kota Tangerang Selatan (0,863), yang mencatat indeks tertinggi di Banten.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur medis, peningkatan akses layanan kesehatan bagi

masyarakat, serta program preventif dan promotif yang aktif dijalankan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Salah satu faktor keberhasilan ini adalah penambahan fasilitas kesehatan dengan dibangunnya RSUD Tigaraksa. Rumah sakit ini hadir sebagai pelengkap layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap fasilitas medis yang memadai. RSUD Tigaraksa adalah RSUD ke 4 setelah RSUD Balaraja, RSUD Paku Haji dan RSUD Tangerang.

Hambatan dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tangerang:

1. **Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan:** Meskipun fasilitas kesehatan telah berkembang akan tetapi jumlah tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana masih belum optimal.
2. **Keterbatasan Fasilitas Sanitasi:** Kualitas sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit menular. Beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak, seperti toilet yang higienis.
3. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya layanan kesehatan preventif dan promotif, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat upaya pencegahan penyakit dan deteksi dini masalah kesehatan.

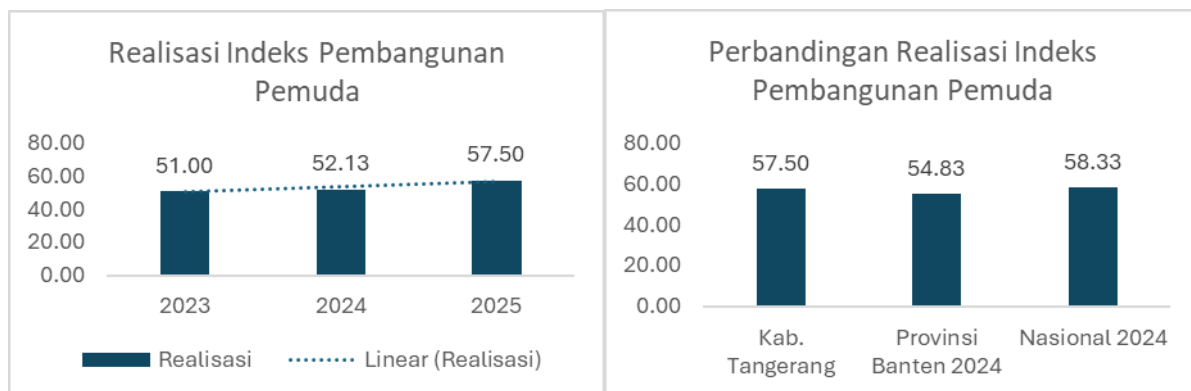
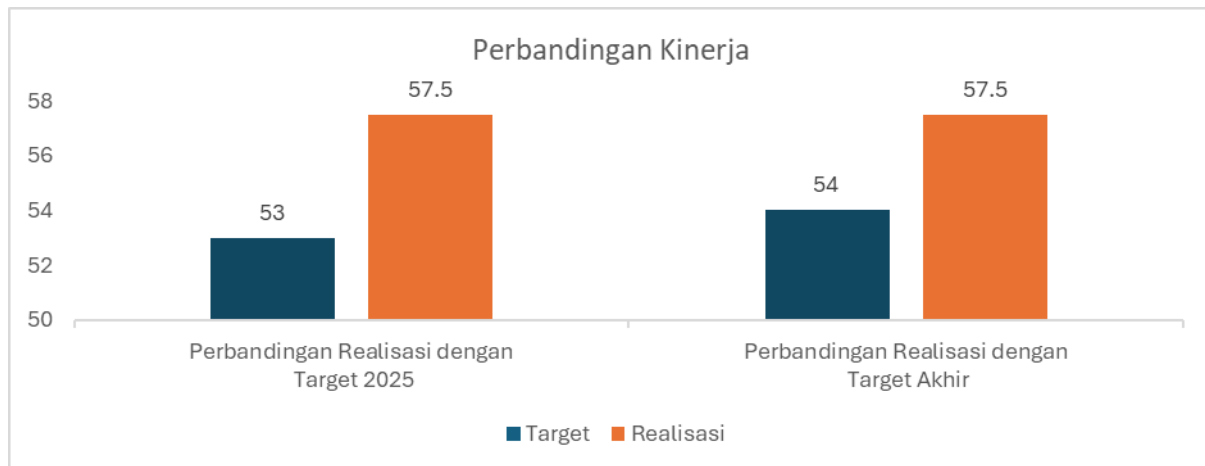
RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan
2. Digitalisasi Layanan Kesehatan
3. Optimalisasi Program Pencegahan Penyakit
4. Penguatan Tenaga Kesehatan
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

SASARAN 03 MENINGKATKAN DAYA SAING PEMUDA

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
53	57,5*	108,49%	54



Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Tangerang mencapai angka 57,50, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 53, dengan capaian kinerja 108,49%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang berada diatas IPP Provinsi Banten yang berada di angka 54,83 namun masih berada dibawah nasional yang berada diangka 58,33.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan pemuda. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian realisasi kinerja IPP tahun 2025 antara lain:

- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemuda, termasuk pengembangan Sekolah Terpadu Ramah Anak

(SETARA), peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta program beasiswa pendidikan bagi pemuda kurang mampu. Selain itu, pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan berbasis teknologi digital telah diperluas untuk meningkatkan kesiapan pemuda dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

- **Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kepemudaan**

Pembangunan dan revitalisasi pusat kegiatan kepemudaan dan fasilitas olahraga terus dilakukan untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam aktivitas positif. Stadion, gelanggang olahraga, serta ruang kreatif bagi komunitas pemuda telah diperbaiki dan diperluas agar dapat menjadi wadah pengembangan bakat dan potensi generasi muda.

- **Pemberdayaan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda**

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda, Kabupaten Tangerang telah melaksanakan berbagai program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan usaha mikro, serta pendampingan startup kepemudaan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi wirausaha muda agar dapat bersaing dalam ekonomi berbasis inovasi.

- **Penguatan Kepemimpinan dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan**

Melalui program Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Penguatan Organisasi Kepemudaan, Kabupaten Tangerang terus membangun kapasitas pemuda sebagai agen perubahan. Berbagai kegiatan seperti forum kepemimpinan, seminar kebangsaan, dan pelatihan advokasi sosial telah digelar untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.

- **Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat**

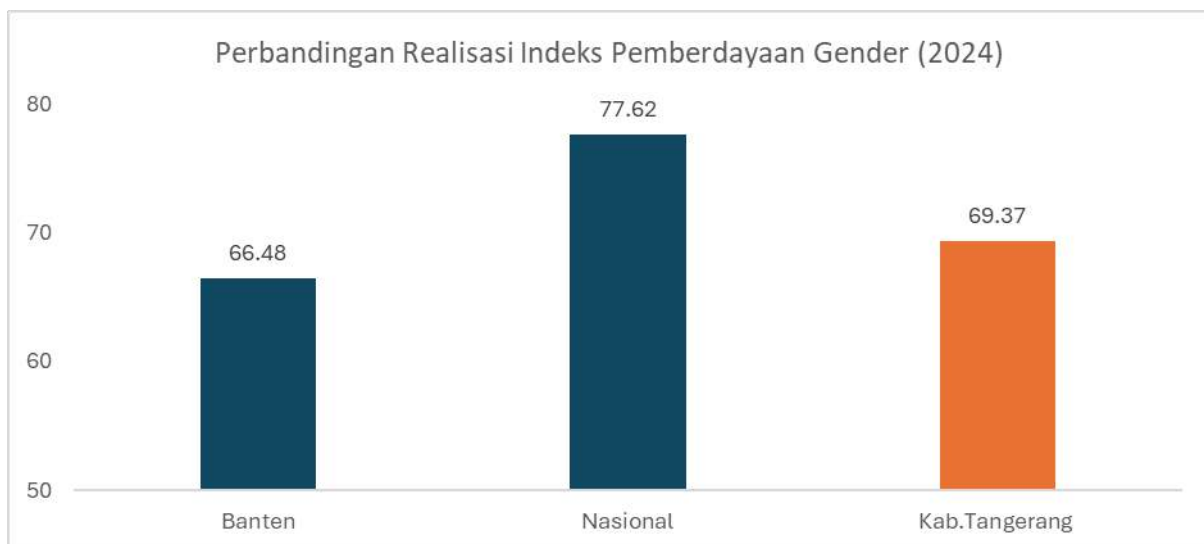
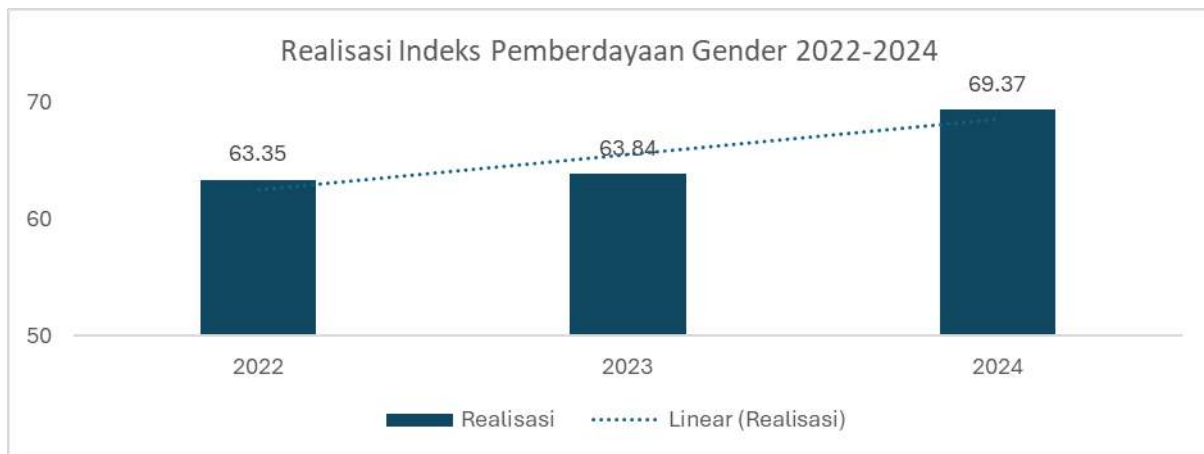
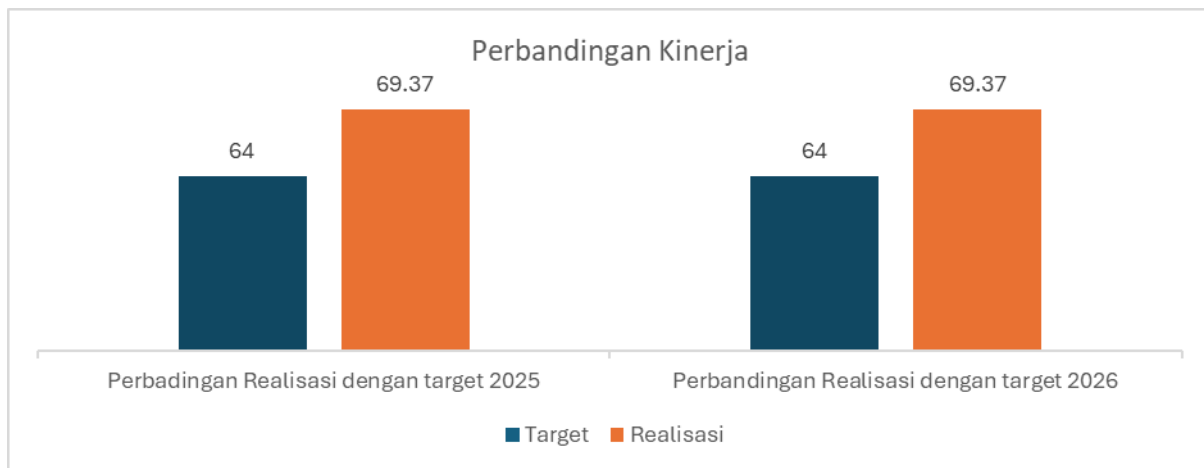
Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas pemuda menjadi kunci dalam peningkatan IPP. Program kemitraan dengan perusahaan untuk mendukung magang dan peningkatan keterampilan kerja, serta kerja sama dengan organisasi kepemudaan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan inovasi, turut berkontribusi pada pencapaian target IPP 2025.

Meskipun capaian tahun ini telah melampaui target, tantangan masih tetap ada. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan ke depan mencakup pengurangan angka pengangguran pemuda, peningkatan keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi kreatif, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi.

SASARAN 04 MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
64	69,37*	108,4%	64



Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 64, realisasi yang digunakan berdasarkan data tahun 2024 tercatat sebesar 69,37 sehingga capaian kinerja mencapai

108,4%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan telah melampaui target yang direncanakan, sekaligus telah memenuhi target akhir RPD Tahun 2026 yang juga sebesar 64. Capaian ini mencerminkan kondisi yang positif dalam aspek pemberdayaan gender, khususnya dalam hal keterlibatan perempuan pada sektor ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kontribusi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Jika dilihat dari tren perkembangan selama tiga tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan peningkatan yang konsisten, yaitu dari 63,35 pada tahun 2022 menjadi 63,84 pada tahun 2023, dan meningkat signifikan menjadi 69,37 pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mengindikasikan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam mendorong kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tangerang. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun terakhir juga menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender mulai memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas partisipasi perempuan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Banten sebesar 66,48, nilai Kabupaten Tangerang berada di atas rata-rata provinsi, yang menunjukkan posisi daerah relatif lebih baik dalam aspek pemberdayaan gender. Namun demikian, dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 77,62, masih terdapat selisih yang menunjukkan adanya ruang perbaikan agar kualitas pemberdayaan gender di Kabupaten Tangerang dapat lebih meningkat dan mendekati rata-rata nasional. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kinerja yang positif dan progresif, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan agar peningkatan yang telah dicapai dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan secara konsisten pada periode pembangunan berikutnya.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang diikuti oleh operator perencanaan dari berbagai perangkat daerah. Tujuan kegiatan ini adalah agar perspektif gender terintegrasi dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lain dapat diakomodasi dalam kebijakan dan anggaran daerah.

2. Pengarusutamaan Gender sebagai Komitmen Kebijakan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah sebagai upaya mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga keadilan manfaat bagi perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

3. Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Lingkungan Kerja

Dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap hak kesehatan dan kesejahteraan perempuan pekerja, DPPPA Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di sejumlah perusahaan. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya penyediaan fasilitas ramah perempuan di tempat kerja seperti ruang laktasi, izin khusus bagi ibu hamil, serta kebijakan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan perempuan. Upaya ini diharapkan mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas perempuan dalam ranah ekonomi.

4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

DPPPA Kabupaten Tangerang secara aktif mengencakan kampanye dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta instansi pemerintahan dan sektor swasta. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan berbasis gender, yang merupakan bagian penting dari pemberdayaan perempuan.

5. Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Inspiratif dan Apresiasi

Program seperti pemilihan “Perempuan Inspiratif Kabupaten Tangerang” juga dilaksanakan sebagai langkah pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi inspirator dan agen perubahan di komunitasnya, sekaligus menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

6. Keterlibatan dalam Komunitas dan Ormas untuk Kesadaran Gender

Selain program pemerintah, pejabat daerah juga mengajak organisasi masyarakat seperti Fatayat NU untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap isu gender, khususnya pencegahan kekerasan berbasis gender. Upaya komunikasi dan kolaborasi seperti ini memperluas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender.

RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatkan Akses Perempuan ke Sumber Daya Ekonomi

- Mendorong pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan memperluas akses mereka terhadap permodalan.
- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam industri berbasis teknologi dan digital.

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemimpinan

- Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kebijakan afirmatif.

- Memberikan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan untuk mendukung peran mereka dalam pengambilan keputusan.

Memperkuat Pendidikan dan Kesehatan untuk Perempuan

- Menyediakan lebih banyak program pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan perempuan di berbagai sektor.
- Memperluas akses layanan kesehatan reproduksi dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Mengubah Pola Pikir Sosial tentang Peran Perempuan

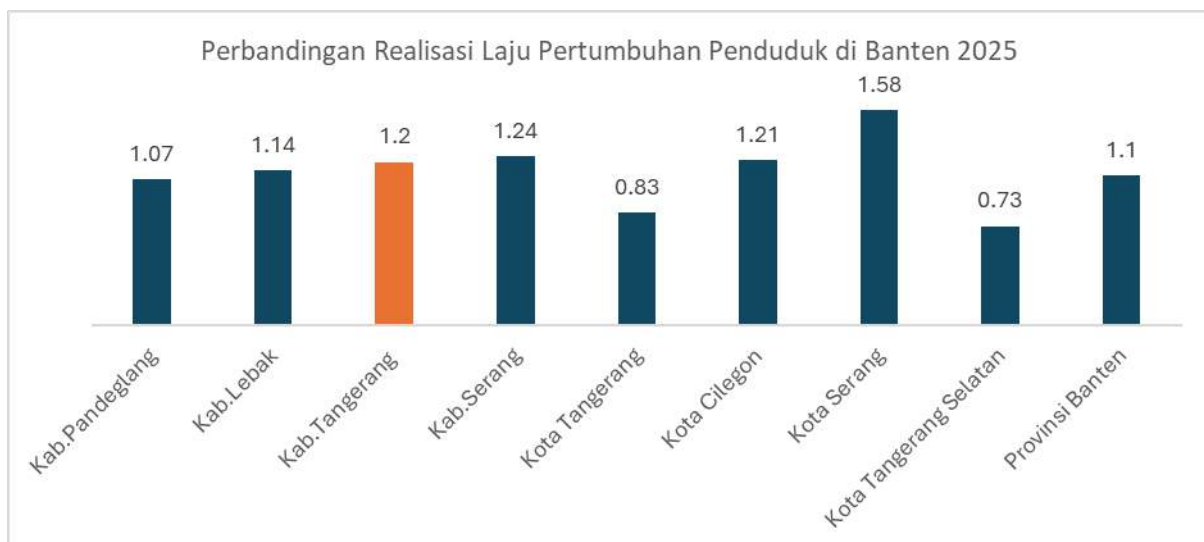
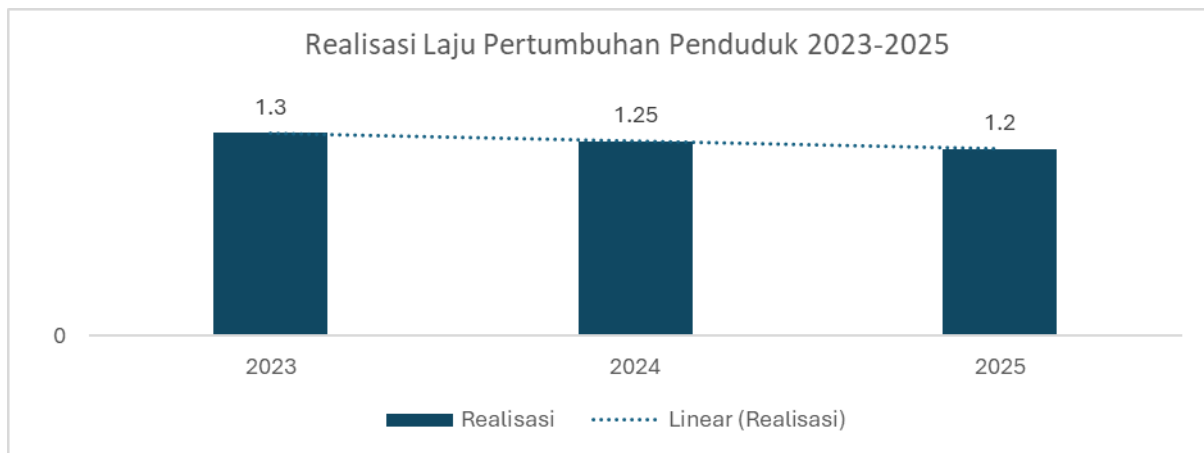
- Melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

SASARAN 05 MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENDUDUK

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1.15	1.20	95,83%	1.05





Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025, realisasi tercatat sebesar 1,20 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,15, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 95,83%. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk masih memerlukan penguatan agar dapat sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian dalam rangka mendukung terciptanya pertumbuhan penduduk yang selaras dengan daya dukung wilayah dan perencanaan pembangunan daerah.

Jika dilihat dari tren tahun sebelumnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang menunjukkan kecenderungan yang positif, yaitu mengalami penurunan dari sebesar 1,30 pada tahun 2023 menjadi 1,25 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 1,20 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilaksanakan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk dalam rangka mendukung pencapaian target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 1,05.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten sebesar 1,10, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang masih berada pada tingkat yang relatif lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang berkembang pesat dan memiliki daya tarik tinggi terhadap mobilitas dan aktivitas penduduk. Kondisi tersebut

menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menunjukkan tren yang membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan terintegrasi untuk semakin mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Tingginya arus urbanisasi dan perpindahan penduduk ke Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki perkembangan kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi yang pesat. Kondisi ini menarik perpindahan penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan bekerja di Kabupaten Tangerang, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk relatif lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

2. Pertumbuhan kawasan permukiman dan pembangunan perumahan yang cukup pesat

Perkembangan kawasan perumahan dan permukiman baru di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang turut mendorong peningkatan jumlah penduduk, baik melalui pertumbuhan alami maupun perpindahan penduduk. Ketersediaan hunian yang semakin luas meningkatkan daya tarik wilayah sebagai tempat tinggal, sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

3. Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan dan keluarga berencana

Pelaksanaan program pengendalian pertumbuhan penduduk, termasuk program keluarga berencana, masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengendalikan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Hal ini mempengaruhi capaian laju pertumbuhan penduduk yang masih berada di atas target yang telah ditetapkan.

4. Tingginya mobilitas penduduk sebagai dampak perkembangan ekonomi wilayah

Perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa di Kabupaten Tangerang mendorong meningkatnya mobilitas penduduk yang masuk ke wilayah tersebut untuk bekerja dan menetap. Kondisi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelaksanaan program keluarga berencana melalui peningkatan sosialisasi, pelayanan, dan pembinaan kepada masyarakat guna mengendalikan angka kelahiran.

2.Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk

Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam perencanaan dan pengendalian pertumbuhan penduduk agar sejalan dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

3.Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pertumbuhan penduduk

Upaya sosialisasi akan ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

4.Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan jumlah penduduk

Pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pengendalian pertumbuhan penduduk.

5.Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah akan diselaraskan dengan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk guna menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya serta infrastruktur.

SASARAN 06 MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KONDUSIF, AMAN, DAN TERTIB

INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1	1	100%	2,38

Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tangerang menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, target indeks ketentraman dan ketertiban untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,00, dan realisasi yang dicapai adalah 1,00. Dengan hasil tersebut, capaian kinerja mencapai 100%, yang mengindikasikan adanya efektivitas dalam penyelesaian permasalahan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tangerang.

Perhitungan indeks ini didasarkan pada persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilaporkan. Pada tahun 2025, jumlah penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah 79 kasus, yang juga merupakan jumlah total pelanggaran yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang terjadi telah berhasil diselesaikan sepenuhnya.

Namun, dalam dokumen perencanaan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2026, terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan Target Akhir RPD 2026, di mana angka yang tercantum adalah 2,38. Seharusnya, nilai target akhir ini lebih kecil dari target tahun 2024, mengingat

bahwa indeks ini dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, semakin kecil nilai indeks, semakin baik capaian ketertiban dan ketentraman di daerah tersebut.

Komposisi penyusun indeks ini mencakup aspek-aspek seperti penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, laporan jumlah kriminalitas di tingkat kabupaten, serta faktor konflik sosial. Keberhasilan dalam peningkatan indeks ketentraman dan ketertiban diukur dengan membandingkan nilai indeks tahun berjalan (tahun n) dengan tahun sebelumnya (tahun n1). Apabila nilai indeks lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Secara keseluruhan, pencapaian indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Tangerang tahun 2024 telah menunjukkan progres yang baik. Namun, tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di tahun-tahun mendatang guna mencapai target akhir RPD 2026.

Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK). Berikut beberapa langkah yang telah diambil:

1. Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2022: Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Perda ini untuk mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Perda ini mencakup kebijakan, kewenangan, dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.
2. Sosialisasi Perda kepada Masyarakat: Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketertiban umum, sosialisasi Perda dilakukan di berbagai kecamatan. Misalnya, pada Oktober 2024, Kecamatan Gunung Kaler mengadakan sosialisasi yang melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat guna membahas strategi menjaga ketertiban di wilayah tersebut.
3. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas): Pemerintah Kabupaten Tangerang memberdayakan Satlinmas dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan. Upaya ini bertujuan memaksimalkan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan,
4. Kolaborasi Antar Pihak: Pencapaian kinerja Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencakup perumusan kebijakan, implementasi, serta pengawasan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Upaya dilakukan melalui optimalisasi implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2022, disertai peningkatan kapasitas aparat Satpol PP serta penerapan sanksi yang tegas guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui kampanye ketertiban umum dan penguatan kegiatan siskamling berbasis komunitas, serta menjalin sinergi dengan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

3.Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi diperkuat melalui pemasangan CCTV, pengembangan aplikasi pelaporan, serta sistem monitoring digital. Selain itu, dilakukan analisis data secara berkala untuk mendeteksi potensi kerawanan secara lebih cepat dan tepat.

4.Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan, pemberdayaan generasi muda, serta program rehabilitasi sosial guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.

5.Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan

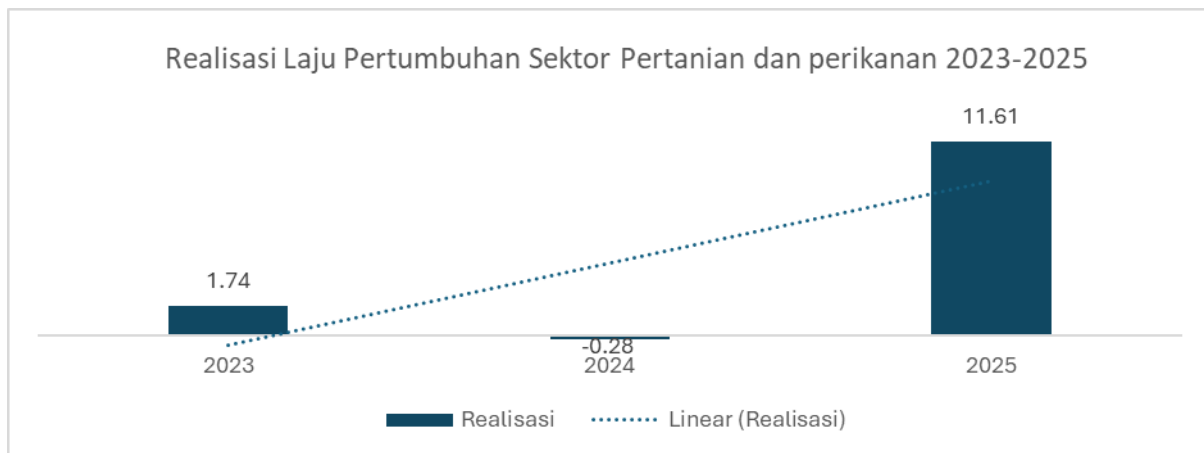
Diperlukan sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan, termasuk benchmarking dengan daerah lain serta penyesuaian dan peningkatan dukungan anggaran agar kebijakan yang dijalankan semakin efektif dan tepat sasaran.

SASARAN 07 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEKTOR UNGGULAN

LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,48%	11,61%	333,62%	3,88%





Sumber BPS Kabupaten Tangerang 2025

Laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat signifikan, yakni sebesar 11,61%. Angka ini jauh melampaui target tahunan 2025 yang ditetapkan sebesar 3,48% dan juga melampaui target akhir RPD tahun 2026 sebesar 3,88%. Capaian ini mengindikasikan adanya lonjakan kinerja sektor pertanian dan perikanan yang tidak hanya memenuhi ekspektasi perencanaan, tetapi juga menunjukkan akselerasi yang kuat dalam satu tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terjadi perubahan tren yang sangat tajam. Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor ini tercatat negatif sebesar -0,28%, yang menandakan adanya kontraksi atau penurunan kinerja sektor. Sementara itu, pada tahun 2023, pertumbuhan masih berada pada level positif namun relatif rendah yaitu sebesar 1,74%. Dengan demikian, capaian 11,61% pada tahun 2025 mencerminkan pemulihan yang sangat cepat sekaligus peningkatan produktivitas yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Kinerja yang melonjak ini dapat mengindikasikan adanya berbagai faktor pendukung, seperti perbaikan kondisi cuaca, peningkatan produktivitas lahan dan hasil tangkapan, optimalisasi program bantuan dan subsidi sektor pertanian serta perikanan, hingga membaiknya distribusi dan permintaan pasar. Selain itu, kemungkinan adanya intervensi kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran juga turut mendorong peningkatan kinerja sektor ini secara signifikan.

Dari sisi pencapaian target, realisasi 2025 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPD tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya relatif konservatif dibandingkan dengan potensi riil sektor di lapangan. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan target perencanaan berikutnya agar lebih adaptif dan realistis terhadap dinamika ekonomi sektoral.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 3,88%, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kondisi aktual dan arah kebijakan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terfokus. Strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, peningkatan produktivitas melalui mekanisasi dan inovasi teknologi, penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, serta stabilisasi harga melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan offtaker.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan pemulihan yang sangat kuat dari kondisi sebelumnya, sekaligus memperlihatkan performa yang jauh melampaui target perencanaan. Hal ini menjadi indikasi adanya akselerasi yang signifikan, yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui kebijakan dan program yang konsisten agar kinerja positif ini dapat dipertahankan pada periode perencanaan berikutnya.

Faktor keberhasilan pencapaian target

1. Kondisi cuaca dan musim yang lebih mendukung
Pemberitaan sektor pertanian dan perikanan tahun 2025 banyak menyoroti kondisi iklim yang relatif lebih stabil dibanding tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, serta hasil tangkapan perikanan. Stabilitas musim tanam dan musim melaut turut mengurangi risiko gagal panen dan gagal tangkap.
2. Penguatan program bantuan dan sarana produksi
Pemerintah daerah secara aktif menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, hingga sarana budidaya kepada kelompok tani di berbagai kecamatan. Bantuan alsintan dalam jumlah besar serta sarana produksi hortikultura terbukti mempercepat proses produksi, menekan biaya, dan meningkatkan hasil panen petani.
3. Dukungan nyata terhadap produktivitas sektor perikanan
Di sektor perikanan, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan sarana tangkap serta dukungan operasional seperti bahan bakar bagi nelayan. Program tersebut secara langsung menekan biaya melaut dan meningkatkan frekuensi serta hasil tangkapan, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan nelayan.
4. Pengembangan komoditas dan perluasan kawasan produksi
Berbagai pemberitaan menunjukkan adanya pengembangan komoditas unggulan seperti jagung, semangka, dan hortikultura lainnya, termasuk pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi lahan budidaya baru. Perluasan areal tanam dan diversifikasi komoditas ini meningkatkan volume produksi serta memperluas basis ekonomi sektor pertanian.
5. Sinergi program pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani/nelayan
Keberhasilan panen dan peningkatan produksi yang diberitakan juga menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, penyuluh lapangan, serta kelompok tani dan nelayan. Sinergi ini mempercepat adopsi teknologi, inovasi budidaya, serta memastikan bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara efektif di lapangan.

RENCANA TINDAK LANJUT

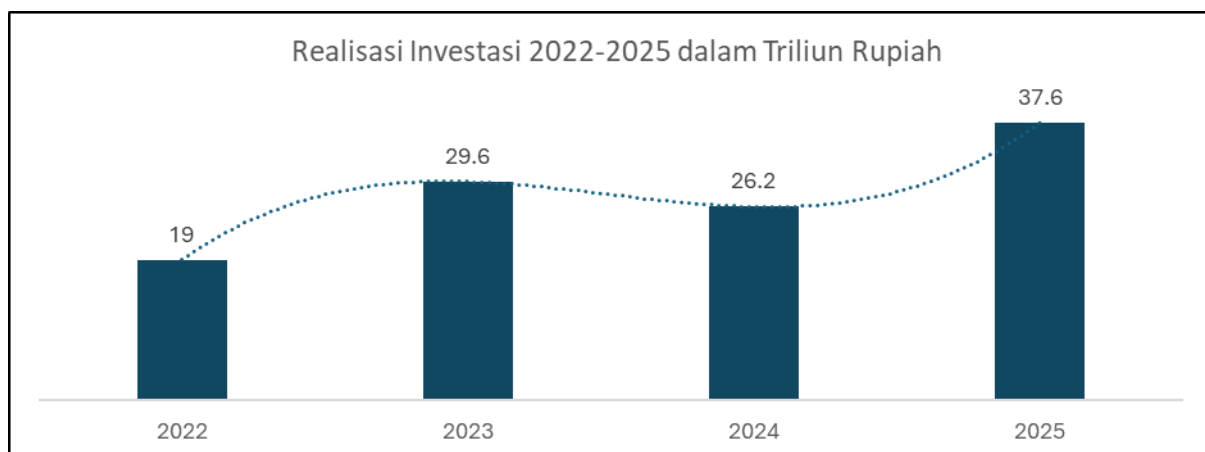
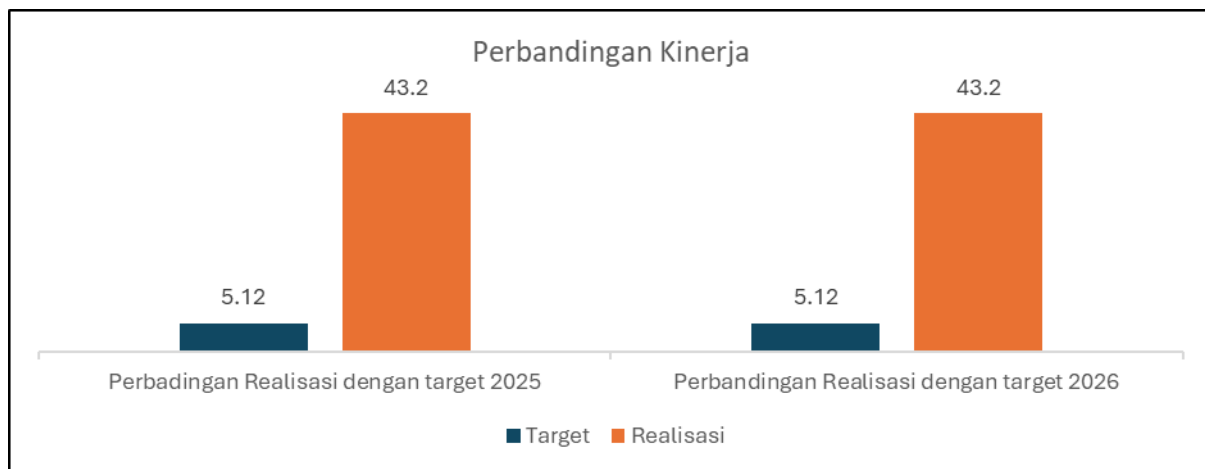
1. Memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan regulasi tata ruang dan pengawasan berbasis digital.
2. Melakukan revitalisasi dan normalisasi jaringan irigasi serta meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air pertanian dan tambak.
3. Membangun sistem stabilisasi harga dan memperkuat rantai distribusi melalui kemitraan dengan offtaker, penguatan koperasi, serta pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

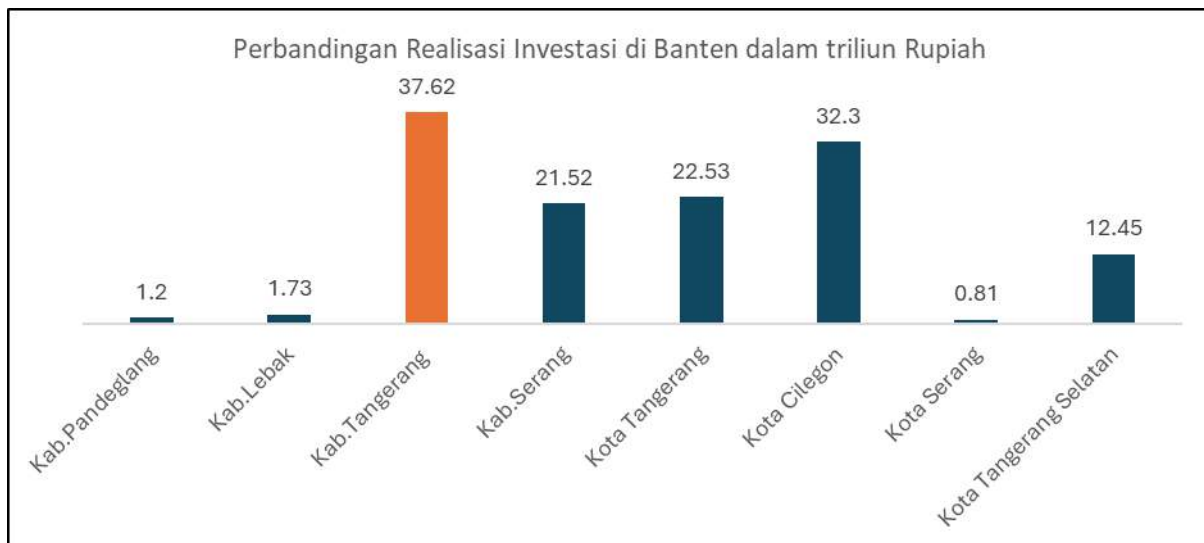
4.Mendorong modernisasi sektor melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), teknologi budidaya perikanan, serta pelatihan peningkatan kapasitas petani dan nelayan.

5.Mengembangkan program adaptasi perubahan iklim, termasuk penggunaan varietas tahan cuaca ekstrem, asuransi pertanian/perikanan, serta sistem peringatan dini berbasis data cuaca.

PERSENTASE REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN)

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
5,12%	43,2%	843,7%	5,12%





Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan data realisasi investasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 15 Januari 2026, Pencapaian realisasi investasi Kabupaten Tangerang periode Oktober – Desember (Triwulan IV) Tahun 2025 mencapai Rp. 9.08 Triliun. Menurun 23,86% dari periode Triwulan III Tahun 2025, namun meningkat 21,67% dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan IV Tahun 2024, yang hanya mencapai Rp 7,4 Triliun.

Secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang Tahun 2025 menunjukkan pencapaian pertumbuhan yang sangat positif dengan total pencapaian realisasi investasi Rp. 37,6 Triliun, atau meningkat 43,20% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang hanya mencapai 26,2 Triliun. Dengan pencapaian ini realisasi investasi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah mencapai 154% dari target investasi 2025 sebesar Rp 24,4 Triliun dan mencatat pencapaian realisasi investasi tertinggi sepanjang masa Kabupaten Tangerang.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 DPMPSTP Kabupaten Tangerang mencatat jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berjumlah 12.156 pelaku usaha/proyek dan secara keseluruhan jumlah pelaku usaha/proyek Tahun 2025 yang melaporkan LKPM meningkat secara signifikan sebesar 80,31% atau berjumlah 47.456 pelaku usaha/proyek dibandingkan dengan Tahun 2024.

Realisasi Investasi pada periode Triwulan IV Tahun 2025 masih menunjukkan dominasi Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan komposisi 56% atau senilai Rp. 5,08 Triliun dengan jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan LKPM 7.201, sedangkan Pemilik Modal Asing (PMA) mencapai 44 % atau senilai Rp. 4,00 Triliun dari total investasi. Tren PMDN yang terus menguat dan mendominasi sejak tahun sebelum-sebelumnya menunjukkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri yang semakin kuat dan tumbuh terhadap perekonomian nasional dan menunjukkan ketahanan ekonomi yang mandiri di tengah tantangan global yang masih diwarnai ketidakpastian, mulai dari pelambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fragmentasi perdagangan internasional. Kontribusi PMA pada Tahun 2025 yang meningkat 27,21 % dibandingkan Tahun 2024, Capaian ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor juga global tetap terjaga ditengah dinamika ekonomi dunia

sebagaimana disampaikan diatas dan beberapa proyek baru dan perluasan telah mulai terealisasi. Berdasarkan asal Negara PMA, realisasi investasi periode Tahun 2025 mencatat terdapat 61 Negara asal PMA yang melakukan pelaporan LKPM, Negara R.R. Tiongkok menjadi negara dengan realisasi investasi paling tinggi dengan pencapaian (Rp.3,61 Triliun), diikuti oleh Singapura (Rp. 2,83 Triliun), Korea Selatan (Rp. 2,50 Triliun), Jepang (Rp. 763 Miliar) dan Hongkong (Rp. 747 Miliar).

Berdasarkan sektor usaha, pada Tahun 2025 lima besar realisasi investasi berasal dari PMDN masih konsisten dari sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp. 9,73 Triliun), Perdagangan dan Reparasi (Rp. 3,31 Triliun), Industri Kimia dan Farmasi (Rp. 2,47 Triliun), Industri Makanan (Rp. 1,78 Triliun) dan Jasa Lainnya (Rp. 1,32 Triliun). Sedangkan, lima besar realisasi investasi yang menjadi kontribusi dari PMA ada pada Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp. 2,03 Triliun), Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam (Rp. 1,75 Triliun), Industri Lainnya (Rp. 1,55 Triliun), Perdagangan dan Reparasi (Rp. 1,58 Triliun) serta Jasa Lainnya (Rp. 913 Miliar).

Faktor Keberhasilan :

1.Digitalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS dan SIPINTER

Salah satu faktor keberhasilan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang adalah penerapan digitalisasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SIPINTER yang dikembangkan oleh DPMPSTP Kabupaten Tangerang. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pada tahun 2025, pemerintah daerah berhasil menerbitkan sebanyak 12.413 Nomor Induk Berusaha (NIB) serta 1.799 izin melalui sistem SIPINTER. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif mempermudah proses legalitas usaha. Kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan ini menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang.

2.Percepatan penerbitan izin usaha dan sertifikat standar bagi pelaku usaha

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga secara aktif mempercepat penerbitan izin usaha dan sertifikat standar sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan investasi. Pada tahun 2025, pemerintah daerah berhasil menerbitkan sebanyak 4.944 izin dan sertifikat standar kepada pelaku usaha. Selain itu, tercatat sebanyak 31.350 rencana proyek usaha yang didaftarkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tangerang. Penerbitan izin tersebut memberikan kepastian hukum kepada investor untuk menjalankan kegiatan usaha dan merealisasikan rencana investasi mereka. Dengan adanya kepastian hukum dan kemudahan perizinan, investor dapat segera melakukan pembangunan fasilitas usaha, membuka kegiatan produksi, dan mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Tangerang.

3.Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan kepada investor dan pelaku usaha

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan kepada investor dan pelaku usaha untuk membantu proses perizinan dan kegiatan investasi. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan perizinan, prosedur investasi, dan tahapan yang harus dilakukan dalam merealisasikan investasi. Pendampingan ini membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam proses perizinan dan mempercepat proses realisasi investasi. Dengan adanya dukungan dan

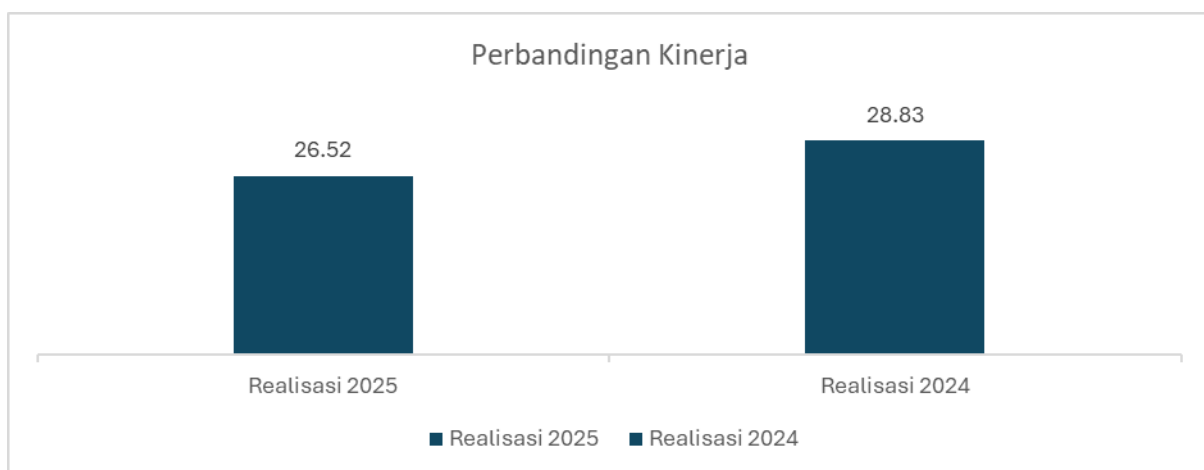
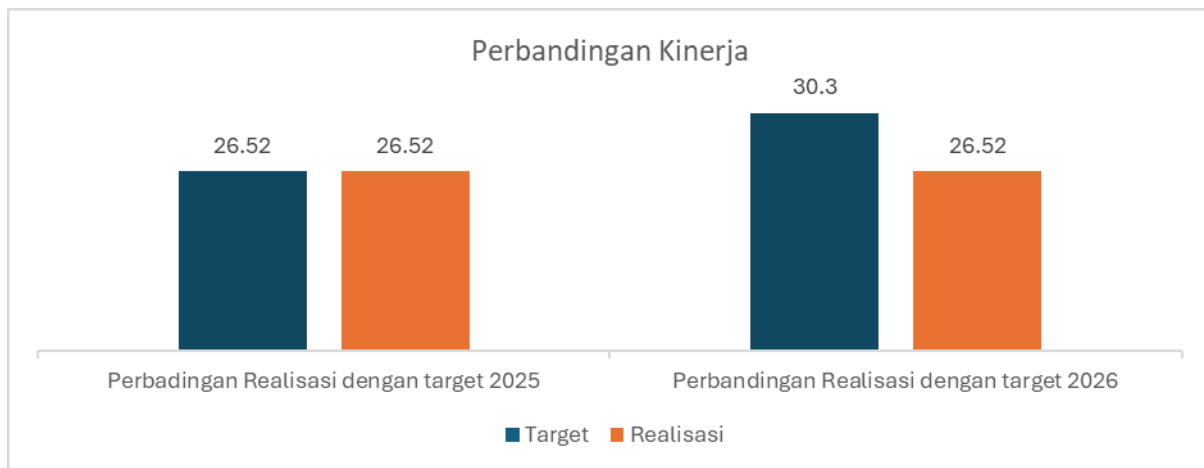
pendampingan dari pemerintah daerah, pelaku usaha menjadi lebih mudah dalam menjalankan kegiatan usaha dan merealisasikan investasi mereka di Kabupaten Tangerang.

RENCANA TINDAK LANJUT

- 1.Meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan perizinan berusaha agar investor dapat segera merealisasikan kegiatan investasinya.
- 2.Melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap investor yang telah memperoleh izin untuk memastikan investasi benar-benar direalisasikan.
- 3.Melakukan pendampingan kepada investor dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi selama proses pembangunan dan operasional usaha.
- 4.Menyediakan dan memastikan ketersediaan kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan siap digunakan untuk kegiatan investasi.
- 5.Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur pendukung investasi, khususnya di kawasan industri dan wilayah yang memiliki potensi investasi.
- 6.Meningkatkan kegiatan promosi potensi investasi daerah untuk menarik investor baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 7.Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan administrasi dan teknis terkait investasi.
- 8.Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian realisasi investasi untuk memastikan target investasi dapat tercapai

PERSENTASE DAYA SAING PRODUK UNGGULAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
26,52%	26,52%	100%	30,30%



Sumber: LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Tujuan sudah sesuai target yang diharapkan, adapun indikator pendukung dari tujuan yaitu Persentase Daya Saing Produk Usaha Mikro dengan definisi operasional yaitu jumlah Produk yang keluar daerah. Dimana pada tahun 2025 jumlah produk Usaha Mikro yang berhasil dipasarkan ke luar daerah sebanyak 159 produk unggulan usaha mikro atau 26,52% dari target. Sedangkan target akhir di tahun 2026 yang harus dicapai yaitu sebanyak 600 produk unggulan yang dipasarkan ke luar daerah.

Fasilitasi pemasaran luar daerah dilakukan melalui pameran yang diikuti oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diantaranya :

No.	Pameran Luar Daerah	Produk Usaha Mikro
1	Pameran UMKM Bali	85
2	Dekranasda Balikpapan	74
Total		159

Target ini tercapai karena adanya proses kurasi terhadap produk usaha mikro sehingga produk unggulan yang layak dipasarkan ke luar daerah. Dari 236 produk unggulan yang dilakukan kurasi hanya 159 yang layak untuk dipasarkan keluar, selebihnya sebanyak 77 produk yang gagal kurasi dilakukan pembinaan dan pendampingan lanjutan, sehingga layak untuk dipasarkan ke luar daerah.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro

Keberhasilan peningkatan daya saing produk usaha mikro didukung oleh adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, pengemasan, serta kemampuan manajemen usaha, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif di pasar.

2. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha mikro

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui kegiatan promosi, pameran, dan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro. Melalui kegiatan tersebut, produk usaha mikro menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing dengan produk lainnya.

3. Dukungan pengembangan kualitas produk usaha mikro

Upaya peningkatan kualitas produk, termasuk perbaikan kemasan dan standarisasi produk, turut berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk usaha mikro. Produk yang memiliki kualitas baik dan kemasan yang menarik lebih mudah diterima oleh pasar dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

4. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha mikro

Melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan usaha, pelaku usaha mikro menjadi lebih mampu mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas ini berdampak pada peningkatan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan.

1. Ekspansi Pasar ke Level Nasional dan Internasional

- Meningkatkan partisipasi dalam pameran dan expo bertaraf internasional.
- Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan kementerian terkait untuk membuka akses pasar lebih luas.
- Memanfaatkan platform perdagangan digital global untuk memperkenalkan produk unggulan ke luar negeri.

2. Optimalisasi Digital Marketing dan E-Commerce

- Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pemasaran digital melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
- Membangun platform e-commerce lokal atau bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas jangkauan produk.
- Menggunakan strategi iklan digital yang lebih efektif, seperti pemasaran melalui media sosial, influencer, dan iklan berbayar.

3. Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk

- Memastikan produk unggulan memiliki standar kualitas yang sesuai dengan pasar nasional dan internasional.
- Mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, BPOM, dan SNI untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
- Meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk agar lebih kompetitif di pasar.

4. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

- Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pelaku usaha besar, ritel modern, dan eksportir.
- Mendorong kerja sama dengan instansi pendidikan dan pusat riset untuk meningkatkan inovasi produk.
- Memperkuat kolaborasi dengan komunitas bisnis dan asosiasi industri guna meningkatkan daya saing bersama.

5. Peningkatan Promosi dan Branding Produk Unggulan

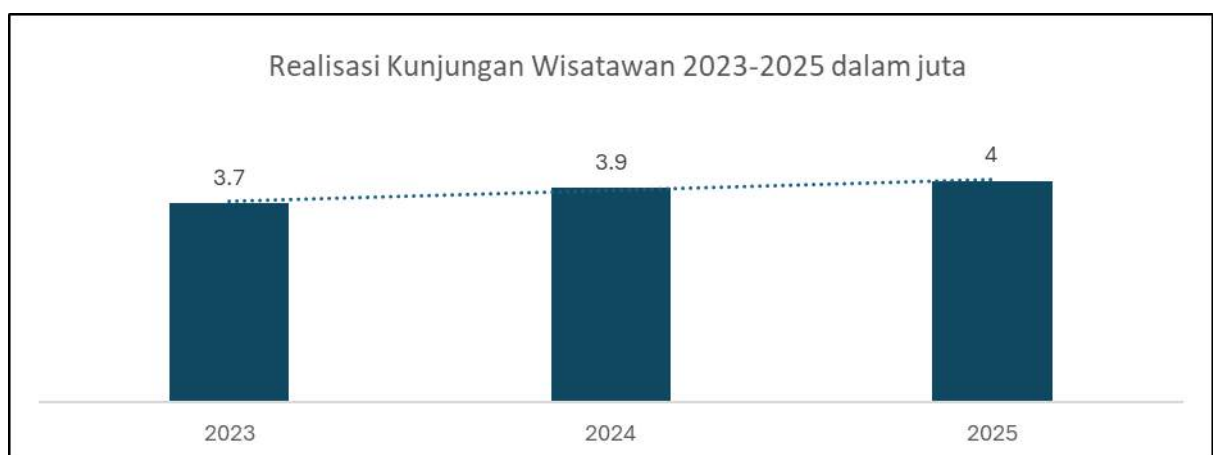
- Menyelenggarakan kampanye promosi terintegrasi yang mengangkat keunikan dan nilai tambah produk lokal.
- Mengembangkan konsep branding daerah yang kuat agar produk unggulan lebih dikenal secara luas.
- Mengadakan festival produk unggulan secara rutin untuk menarik lebih banyak pembeli dan investor.

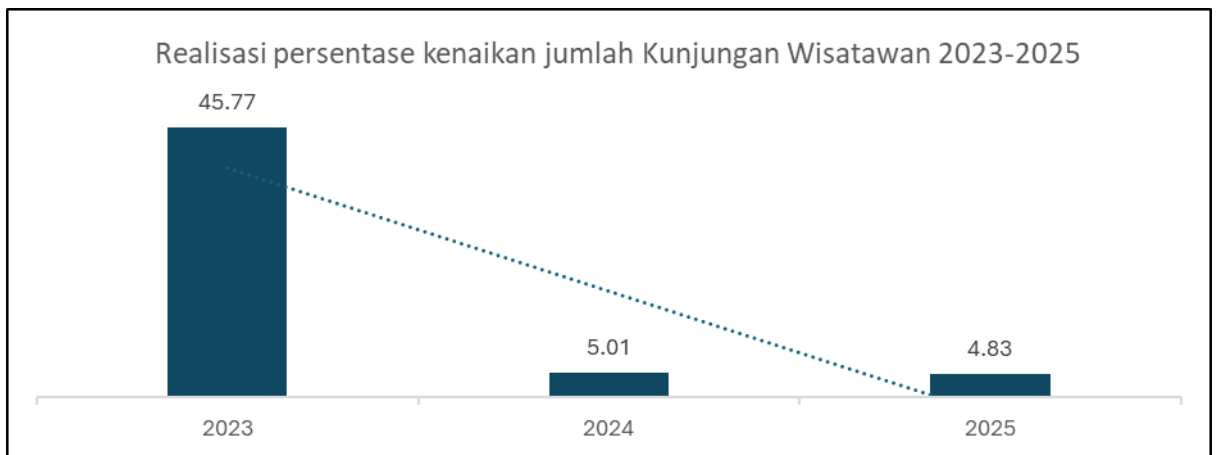
6. Optimalisasi Infrastruktur dan Regulasi Pendukung

- Mempermudah perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kredibilitas produk.
- Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti pusat distribusi, gudang penyimpanan, dan sistem logistik yang efisien.
- Memberikan insentif dan bantuan modal bagi UMKM yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing lebih kuat

PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,57%	4,83%	135,29%	3,73%





Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2025

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 3,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.900.961 kunjungan dan meningkat menjadi 4.090.171 kunjungan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 189.210 kunjungan atau sekitar 4,85%, sehingga melampaui target kenaikan yang telah ditetapkan sebesar 3,57%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara telah berjalan dengan baik dan efektif.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan dari 37.403 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 38.653 kunjungan pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 1.250 kunjungan atau sekitar 3,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Tangerang, meskipun peningkatannya masih relatif moderat dibandingkan wisatawan nusantara.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan sektor pariwisata telah memberikan hasil yang positif. Capaian ini mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Tangerang serta efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas destinasi wisata, sarana dan prasarana pendukung, serta promosi pariwisata guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan periode 2023–2025, terlihat bahwa meskipun jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun persentase kenaikannya menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebesar 45,77%, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,01%. Selanjutnya, pada tahun 2025 persentase

kenaikan kembali mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 4,83%. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan persentase kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun jumlah wisatawan masih bertambah, tingkat pertumbuhannya tidak setinggi periode sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mulai stabilnya jumlah kunjungan wisatawan setelah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode sebelumnya, serta perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang lebih optimal dalam pengembangan dan promosi pariwisata guna meningkatkan kembali laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan pada periode selanjutnya.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Penguatan promosi pariwisata melalui pelatihan dan peningkatan kualitas konten promosi

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata telah melaksanakan kegiatan workshop fotografi dan desain grafis yang melibatkan komunitas pariwisata dan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata daerah melalui media visual yang lebih menarik dan profesional. Upaya ini memberikan dampak nyata berupa meningkatnya eksposur destinasi wisata Kabupaten Tangerang di media digital dan media sosial, sehingga mempermudah wisatawan dalam memperoleh informasi destinasi wisata dan mendorong peningkatan minat kunjungan wisatawan.

2. Dukungan kebijakan yang mendorong wisata lokal di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang

Kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Banten yang mendorong kegiatan wisata lokal, seperti pembatasan study tour ke luar daerah, secara langsung memberikan dampak pada peningkatan kunjungan wisata di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang. Kebijakan ini menyebabkan sekolah dan masyarakat lebih memilih destinasi wisata lokal sebagai tujuan rekreasi dan edukasi, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik. Kondisi ini memberikan kontribusi positif terhadap capaian target kunjungan wisatawan di Kabupaten Tangerang, khususnya dari segmen wisatawan nusantara.

3. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan destinasi wisata untuk menghadapi lonjakan wisatawan

Pemerintah daerah bersama pengelola destinasi wisata terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk aspek kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan. Upaya ini penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang positif dan meningkatkan kepuasan wisatawan. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan dan kesiapan destinasi, wisatawan menjadi lebih tertarik untuk berkunjung kembali maupun merekomendasikan destinasi wisata di Kabupaten Tangerang kepada orang lain, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

4. Pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan komunitas pariwisata lokal

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melibatkan komunitas pariwisata seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Generasi Pesona Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata. Keterlibatan komunitas ini membantu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, memperkuat promosi berbasis komunitas, serta menciptakan daya tarik wisata yang lebih beragam. Dampaknya, destinasi wisata menjadi lebih aktif, dikenal luas, dan mampu menarik lebih banyak wisatawan

RENCANA TINDAK LANJUT

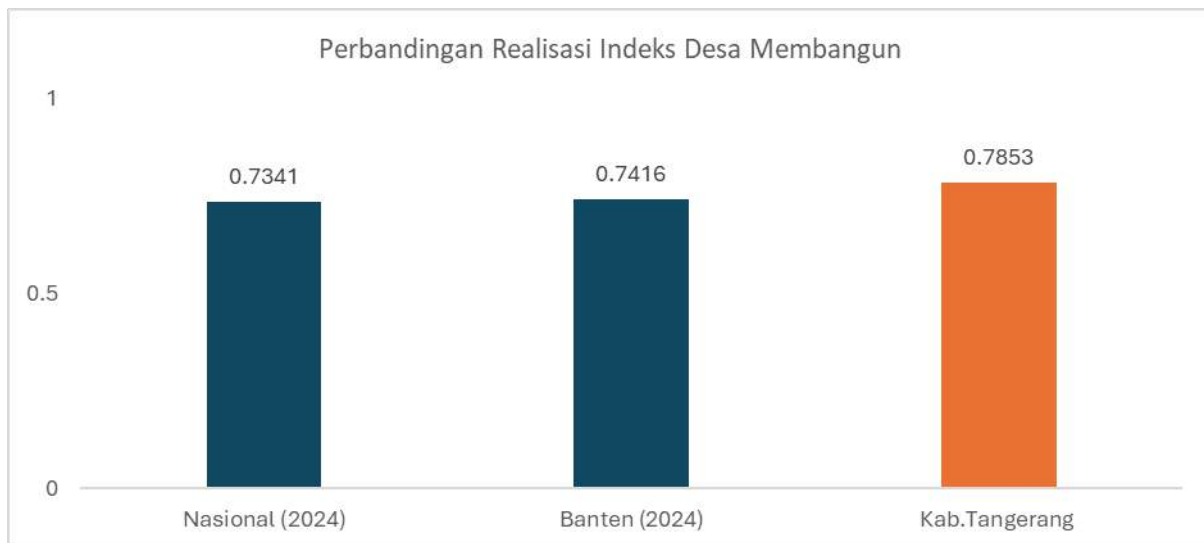
1. Meningkatkan promosi destinasi wisata Kabupaten Tangerang melalui media digital, media sosial, dan kegiatan promosi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata, seperti fasilitas umum, akses jalan, area parkir, dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Menyelenggarakan event pariwisata secara rutin, seperti festival budaya, kegiatan seni, dan kegiatan hiburan masyarakat untuk menarik minat kunjungan wisatawan.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata melalui pembinaan dan pelatihan kepada pengelola wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
5. Meningkatkan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan destinasi wisata guna memberikan pengalaman yang positif bagi wisatawan.
6. Mengembangkan potensi wisata lokal, termasuk wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata buatan, sebagai daya tarik tambahan bagi wisatawan.
7. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan pelaku usaha dalam pengembangan dan promosi pariwisata daerah.
8. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pariwisata

SASARAN 08 MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA

INDEKS DESA MEMBANGUN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0.7853	0.7853	100%	0.7507





Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2025

Indeks Desa Membangun terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

IDM dihitung dengan menggunakan rumus :

Keterangan :

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan (Ekologi).

Perhitungan Indeks Desa Membangun memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pembangunan desa
2. Menjadi alat evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan pembangunan desa
3. Memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat desa
4. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran

IDM selanjutnya digunakan dalam pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri Desa Maju Desa Berkembang Desa Tertinggal Desa Sangat Tertinggal. Adapun progress status Desa di Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

TAHUN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2020	1 DESA	50 DESA	195 DESA	0 DESA	0 DESA
2021	1 DESA	55 DESA	190 DESA	0 DESA	0 DESA
2022	5 DESA	114 DESA	127 DESA	0 DESA	0 DESA
2023	36 DESA	167 DESA	43 DESA	0 DESA	0 DESA
2024	78 DESA	143 DESA	25 DESA	0 DESA	0 DESA
2025	105 DESA	116 DESA	25 DESA	0 DESA	0 DESA

Pada tahun 2025, Kabupaten Tangerang berhasil mencapai target kinerja yang sangat signifikan dalam meningkatkan pembangunan desa melalui peningkatan jumlah desa mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, capaian desa mandiri mencapai 42,68 % atau sebanyak 105 desa dari total 246 desa di Kabupaten Tangerang. Angka telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 42,68 % atau 105 desa, dengan capaian sebesar 100%, yang tergolong sangat baik.

Peningkatan signifikan dalam jumlah desa mandiri bukan hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun, yang menjadi ukuran utama dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan desa di Indonesia. Target Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0.7853, dengan realisasi mencapai target, yaitu 0.7853. Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pembangunan desa dibandingkan dengan perencanaan awal.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1.Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah)

Program unggulan Pemkab Tangerang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal di desa.

2.Program Desa Mandiri Pangan

Program pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan di sejumlah desa untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi desa.

3.Program Pengentasan Kemiskinan di 50 Desa

Program kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak (akademisi dan swasta) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan inovasi produk lokal.

4.Desas Awards Kabupaten Tangerang

Program penghargaan bagi desa berprestasi untuk mendorong inovasi desa, tata kelola pemerintahan desa, desa digital, BUMDes, dan pelayanan publik desa.

5.Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

Program peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar pembangunan desa lebih efektif.

6.Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Desa dan UMKM

Program pembangunan pusat pemberdayaan UMKM dan industri kecil (IKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

7.Program Pasar Murah di Setiap Kecamatan

Program stabilisasi ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau secara berkala.

RENCANA TINDAK LANJUT

1.Melanjutkan dan memperluas program pemberdayaan ekonomi desa

Program pemberdayaan ekonomi desa terus dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan usaha produktif di desa.

2.Peningkatan peran BUMDes

Penguatan dan pengembangan BUMDes dilakukan agar dapat menjadi penggerak perekonomian desa serta meningkatkan pendapatan desa.

3.Pelatihan dan pembinaan perangkat desa

Pelatihan dan pembinaan bagi perangkat desa terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.

4. Pengembangan pelayanan desa berbasis digital

Pemanfaatan teknologi digital di desa terus didorong untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi administrasi desa.

5. Pengembangan potensi dan produk unggulan desa

Potensi lokal desa terus dikembangkan, termasuk peningkatan kualitas dan pemasaran produk unggulan desa agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

6. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak

Kerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan berbagai lembaga lainnya terus diperkuat guna mendukung pembangunan dan pengembangan desa.

8. Pemberian penghargaan kepada desa berprestasi

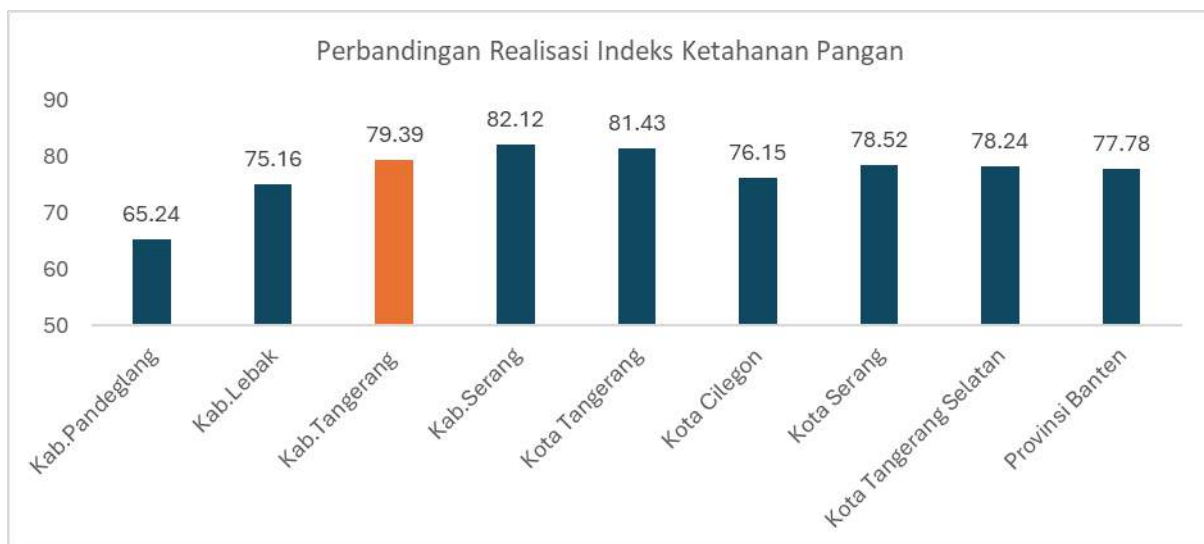
Pemberian penghargaan dan dukungan kepada desa yang menunjukkan kinerja baik dilakukan untuk mendorong desa lain meningkatkan pembangunan dan mencapai status desa mandiri.

SASARAN 09 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
78	79,39	101,78%	78,50

INDEKS KETAHANAN PANGAN





Sumber: Lumbung Data Provinsi Banten berdasarkan Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 78, realisasi indeks pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,39 sehingga capaian kinerja mencapai 101,78%. Capaian ini tidak hanya berhasil melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 78,50. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program ketahanan pangan daerah telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir, indeks ketahanan pangan Kabupaten Tangerang menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023 nilai indeks tercatat sebesar 76,49, kemudian meningkat menjadi 77,60 pada tahun 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi 79,39 pada tahun 2025. Kenaikan yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata pada aspek ketersediaan, akses, dan

pemanfaatan pangan. Peningkatan tersebut juga mengindikasikan bahwa berbagai intervensi program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang optimal.

Dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2025 yang telah melampaui target akhir RPD Tahun 2026 menunjukkan percepatan kinerja pembangunan sektor ketahanan pangan. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan daerah. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tangerang berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara struktural, peningkatan indeks ketahanan pangan tidak terlepas dari penguatan pada tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan relatif terjaga melalui penguatan cadangan pangan daerah serta kelancaran distribusi antarwilayah. Dari sisi akses, daya beli masyarakat yang relatif stabil turut mendukung kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang cukup. Sementara itu, pada aspek pemanfaatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi dan beragam turut mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Meskipun capaian tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi. Urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi risiko terhadap ketersediaan pangan lokal, sementara ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi. Selain itu, faktor perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan juga berpotensi memengaruhi stabilitas ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian yang telah diraih.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, melampaui target, dan berada pada tren yang meningkat. Ke depan, penguatan produksi pangan lokal, peningkatan efisiensi distribusi, penguatan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan daerah agar tetap kuat dan berdaya saing.

Faktor Keberhasilan pencapaian target

1. Kerja sama pengelolaan cadangan pangan daerah (CPPD): Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjalin kerja sama dengan Perum Bulog Cabang Tangerang untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). Kerja sama ini bertujuan menjaga ketersediaan beras sebagai cadangan pangan daerah untuk menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga, atau keadaan darurat. Realisasi cadangan beras pemerintah daerah hingga tahun 2025 terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

2. Distribusi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani: Pemkab Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendistribusikan 140 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di 27 kecamatan. Bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pengolahan tanah, mengurangi biaya produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, serta meningkatkan hasil panen yang pada akhirnya memperkuat produktivitas pangan di tingkat lokal. Penyaluran Bantuan Pangan Beras Fortifikasi: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menyalurkan beras fortifikasi ke 18 desa yang rentan rawan pangan. Tujuannya adalah menurunkan jumlah desa rentan rawan pangan dan gizi di Kabupaten Tangerang.

3. Penyelenggaraan Tangerang Agro Festival sebagai upaya inovasi pertanian : Pemerintah daerah menyelenggarakan Tangerang Agro Festival 2025 yang mendorong inovasi pertanian, regenerasi petani, dan penguatan ketahanan pangan. Festival ini menjadi wadah pembelajaran teknologi pertanian, kolaborasi antarstakeholder, serta pengembangan wirausaha pangan. Kegiatan ini memperkuat partisipasi masyarakat terutama generasi muda dalam sektor pertanian.

4. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM): Pemkab Tangerang mengadakan Lomba Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan tujuan meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pangan berbasis komunitas. LPM diarahkan menjadi pilar ketahanan pangan di tingkat lokal dengan strategi pengelolaan cadangan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Penyaluran bantuan pangan kepada kelompok rentan: Pemerintah daerah juga melakukan penyaluran beras bantuan pangan kepada warga di desa-desa yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Bantuan ini penting untuk memastikan keluarga berpendapatan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar pangannya, terutama pada kelompok desa yang memiliki kerawanan pangan lebih tinggi.

6. Penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk kelompok rentan masyarakat: Kabupaten Tangerang bersama Bulog menyelesaikan 100% penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juni–Juli 2025. Penyaluran ini mencakup ribuan keluarga penerima manfaat yang mendapat alokasi beras sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat dan kebutuhan pokok mereka.

7. Sosialisasi penanganan kerawanan pangan di desa/kelurahan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan kerawanan pangan berdasarkan pemetaan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Forum ini melibatkan lintas OPD untuk menyusun rekomendasi intervensi seperti pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lumbung pangan desa.

Seiring dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2025 yang telah melampaui target dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa tantangan strategis yang tetap perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja tersebut ke depan antara lain:

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kabupaten Tangerang terus mengalami urbanisasi yang pesat, menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi area pemukiman dan industri. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya produksi pangan lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah semakin meningkat.

2. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Produksi Pangan

Faktor cuaca dan perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Intensitas hujan yang tinggi, kekeringan, serta perubahan pola musim dapat mengganggu produksi pangan lokal. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan dan berkurangnya ketersediaan bahan pangan pokok.

3. Kualitas Gizi dan Diversifikasi Pangan

Meskipun ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang relatif stabil, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan gizi yang cukup. Diversifikasi pangan dan peningkatan konsumsi bahan pangan lokal yang bernutrisi tinggi perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal

- Mendorong program pertanian berkelanjutan dengan penggunaan teknologi modern, seperti pertanian hidroponik dan pertanian berbasis digital.
- Meningkatkan insentif dan dukungan kepada petani lokal untuk memperluas area pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan yang ada.
- Memanfaatkan lahan-lahan marginal untuk dijadikan lahan produktif guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

2. Penguatan Distribusi dan Akses Pangan

- Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan infrastruktur distribusi pangan agar harga tetap stabil dan akses pangan merata di seluruh wilayah.
- Mengembangkan pasar pangan lokal yang dapat mendukung petani dan produsen pangan dalam memasarkan hasil panennya.

- Mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah-daerah yang rawan pangan.

3. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

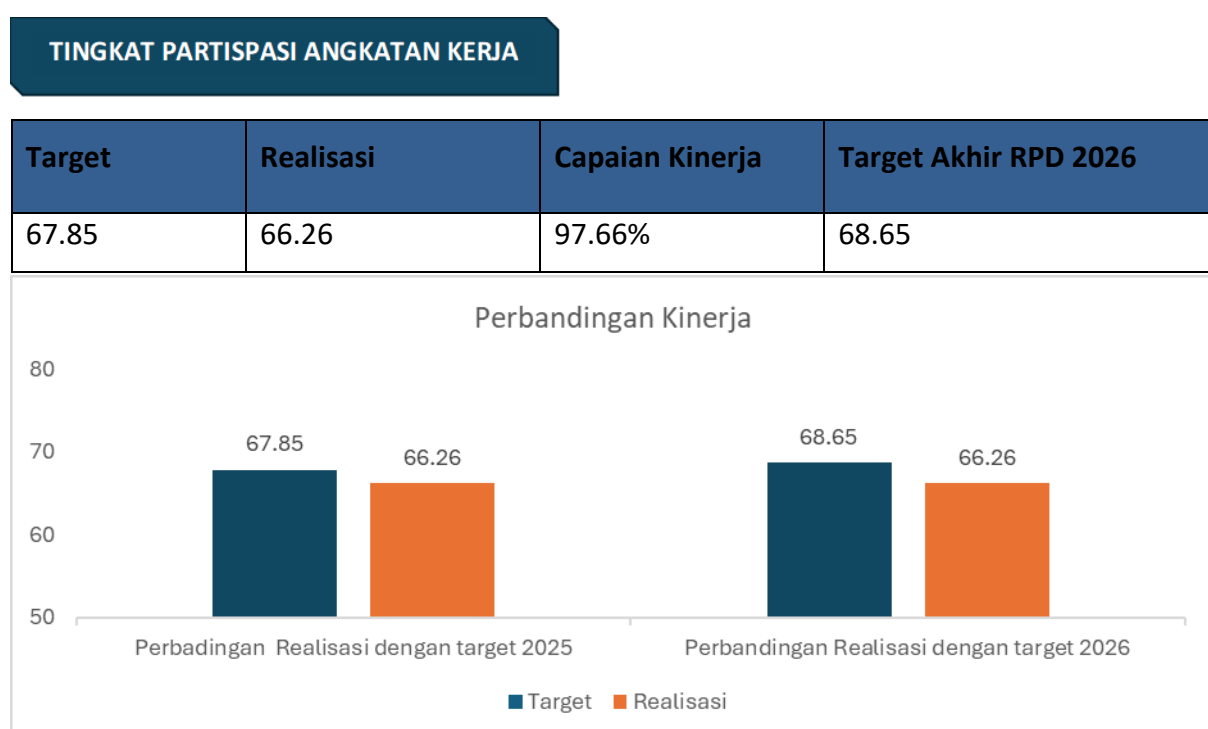
- Mengembangkan sistem pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
- Memanfaatkan sistem irigasi yang lebih efisien untuk mengantisipasi risiko kekeringan.
- Menggalakkan program penghijauan dan konservasi lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

4. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- Mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan diversifikasi pangan.
- Menedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan mendorong pemanfaatan pangan lokal yang lebih beragam.
- Mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, seperti kebun pangan rumah tangga dan urban farming.

SASARAN 10 MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA

MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA





Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja dalam dunia kerja. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total jumlah penduduk usia kerja. Secara rinci rumus tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$$TPAK = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100\%$$

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2025 dari target sebesar 68,25 % terealisasi 66,26% dengan capaian kinerja sebesar 97,08 %. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2025 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	1.110.105	618.837	1.728.942
1.1	Bekerja	1.047.459	578.768	1.626.227
1.2	Pengangguran	62.646	40.069	102.715
2	Bukan Angkatan Kerja	217.085	663.205	880.290
	Jumlah	1.327.190	1.272.042	2.609.232
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,64	6,47	5,94
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,64	48,27	66,26

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Selama 3 tahun terakhir 2023-2025 angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dimana tahun 2025 sebesar 66,26 % naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 65,88% ini menggambarkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 66 hingga 67 orang yang aktif secara ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian baik mereka yang bekerja maupun mereka yang mencari pekerjaan.

TPAK Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar 66,26 % di sedangkan TPAK Provinsi Banten sebesar 64,66% dan Nasional 70,59% %. Tingginya TPAK Kabupaten Tangerang dibanding rata-rata Banten menunjukkan bahwa wilayah ini adalah menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Banten.

Hasil survei angkatan kerja nasional (sakernas) Oleh BPS mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang mencapai 66,26 %. Mengindikasikan besarnya persentase penduduk yang aktif secara ekonomi, dari 2.609.232 jumlah penduduk usia kerja produktif (15-64 tahun) hanya 66,26 % atau 1.728.942 juta orang yang bekerja dan sedang menganggur yang aktif secara ekonomi dan masih terdapat 33,74 % atau 880.290 ribu orang usia produktif yang tidak aktif secara ekonomi dimana mayoritas dari mereka adalah mengurus rumah tangga dan masih sekolah.

Upaya yang dilaksanakan dalam optimalisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Sebagai Berikut :

1. Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat. Tahun 2025 UPT Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat bagi pencari kerja berjumlah 1760 Orang.

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat

No	Program	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Bahasa Inggris	8	8	16
2	Bahasa Jepang	5	11	16
3	Bahasa Korea	8	24	32
4	Bahasa Mandarin	7	9	16
5	Barista	31	17	48
6	Basic Office	37	75	112
7	Cleaning Service	13	3	16
8	Desain Grafis	25	7	32
9	Digital Marketing	17	15	32
10	Instalasi Listrik Rumah Sederhana	48		48
11	Kuliner		64	64
12	Las Pabrikasi	16		16
13	Membatik	3	29	32
14	Menjahit Alas Kaki	69	91	160
15	Menjahit Garment	12	36	48
16	Menjahit Kebutuhan Rumah Tangga	3	29	32
17	Menjahit Pakaian	30	306	336
18	Multimedia	7	25	32
19	Operator Forklift	160		160
20	Otomotif Sepeda Motor	224		224
21	Pangkas Rambut	16		16
22	Pemeliharaan Ac	48		48
23	Pengolahan Tempe	11	5	16
24	Sablon	28	4	32
25	Smaw 2F	96	16	114
26	Tata Rias Wajah		48	48
27	Teknisi AC	16		16
	Grand Total	940	822	1760

Selain menggunakan dana APBD Dinas Tenaga Kerja melakukan kerjasama pelatihan dengan Lembaga atau organisasi berjumlah

60 orang Kerjasama pelatihan dengan lembaga terkait seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Kerjasama Pelatihan dengan Lembaga/Organisasi tahun 2025

No	Nama Pelatihan	Sumber Dana	Jumlah
1.	Pelatihan satuan pengamanan (satpam)	CSR PIK 2	50
2.	Pelatihan Service Ac	CSR PIK 2	20

2. Melalui Perluasan Kesempatan Kerja

Selain melaksanakan pelatihan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 melaksanakan perluasan kesempatan kerja Melalui kegiatan Pembentukan wira usaha baru

Tabel 2.8
Pembentukan Wira Usaha Baru

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjahit	4	16	1	Sindang Asih Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
2	Menjahit	4	16	1	Desa Mekar Jaya Kec. Panongan	Panongan
3	Menjahit	4	16	1	Desa Kebun cau dan Desa Teluk Naga	Teluk Naga
4	Menjahit	4	16	1	Yayasan Nurul Ihsan Desa Rancailat Kresek	Kresek
5	Menjahit	4	16	1	Kp. Waru Desa Sukaharja	Sukamantri Pasarkemis
6	Menjahit	4	16	1	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Pakuhaji
7	Menjahit	4	16	1	Desa Cikuya Kec. Solear	Solear
8	Menjahit	4	16	1	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	Rajeg

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
9	Menjahit	4	16	1	Desa Daon Kec. Rajeg	Rajeg
10	Menjahit	4	16	1	Kampung Besar Kec. Teluknaga	Teluknaga
11	Menjahit	4	16	1	Desa Ranca Gede Kec. Gunung Kaler	Gunung Kaler
12	Menjahit	4	16	1	Sindang Sono Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
13	Menjahit	4	16	1	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Sepatan Timur
14	Menjahit	4	16	1	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	Rajeg
15	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	Rajeg
16	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Paku haji
17	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Sepatan Timur
18	Bengkel Otomotif	4	16	1	Sindang Sono Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
19	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Ranca Gede Kec. Gunung Kaler	Gunung Kaler
20	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Sindang Asih Kec. Sindang Jaya	Sindang Jaya
21	Bengkel Otomotif	4	16	1	Kp. Gelam Timur Rt. 006/003 Desa Gelam Jaya	Pasarkemis
22	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Daon Kec. Rajeg	Rajeg
23	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Tanjakan Mekar Kec. Rajeg	Rajeg

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
24	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Mekar Jaya Kec. Panongan	Panongan
25	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Sukamurni Kec. Balaraja	Balaraja
26	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Jati Mulya Kec. Sepatan Timur	Sepatan Timur
27	Bengkel Otomotif	4	16	1	Desa Rawa Kidang Kec. Sukadiri	Sukadiri
28	Las Listrik	8	16	1	Desa Jambu Karya Kec. Rajeg	Rajeg
29	Las Listrik	8	16	1	Desa Cibugel Kecamatan Cisoka	Cisoka
30	Las Listrik	8	16	1	Desa Surya Bahari Kec. Pakuhaji	Paku haji
31	Las Listrik	8	16	1	Desa Kohod Kec. Pakuhaji	Paku haji
32	Membatik	8	16	1	Desa Cikuya Kec. Solear	Solear
33	Pemeliharaan AC	8	16	1	Kampung Besar Kec. Teluknaga	Teluknaga
34	Kuliner Tataboga	4	16	1	Desa Daon Kec. Rajeg	Rajeg
35	Kuliner Tataboga	4	16	1	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	Rajeg
36	Sablon Printing	1	16	1	Desa Sodong kec. Tigaraksa	Tigaraksa
37	Sablon Printing	4	16	1	Kp. Salembaran Desa Cengklong	Kosambi
38	Pembuatan Tempe	4	16	1	Disabilitas	Cikupa
39	Rias kecantikan	8	16	1	Rancagede	Gunung Kaler
40	Membatik	4	16	1	Rajeg Mulya	Rajeg
41	Kuliner	4	16	1	Waliwis	Mekar Baru
42	Kuliner	4	16	1	Waliwis	Mekar Baru

No.	Bidang	Jumlah Kelompok	Peserta	Angkatan	Lokasi/Pelatihan	Kecamatan
43	Menjahit	4	16	1	Rajeg Mulya	Rajeg
	JUMLAH	197	688	43		

Faktor kegagalan pencapaian

1. Perubahan Struktur Ekonomi

- Berkurangnya peluang kerja di sektor padat karya (misalnya industri manufaktur yang mengalami otomatisasi).
- Pergeseran dari sektor formal ke informal yang tidak tercatat dalam survei ketenagakerjaan.

2. Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi

- Kabupaten Tangerang memiliki kawasan industri yang cukup besar, namun persaingan kerja yang ketat serta dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memengaruhi angka TPAK.
- Tingginya kebutuhan keterampilan baru akibat perubahan industri menyebabkan tidak semua tenaga kerja dapat bersaing.

3. Faktor Sosial dan Demografi

- Bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif atau meningkatnya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- Meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak bekerja karena kondisi sosial-ekonomi.

4. Kurangnya Akses dan Peluang Kerja bagi Masyarakat Lokal

- Tidak meratanya informasi terkait peluang kerja dan pelatihan keterampilan.
- Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

1. Penguatan Program Pelatihan dan Upskilling

Meningkatkan akses pelatihan keterampilan berbasis industri 4.0, seperti digital marketing, data analytics, dan manufaktur modern serta kolaborasi dengan perusahaan di Tangerang untuk program magang dan rekrutmen tenaga kerja lokal.

2. Mendorong Sektor UMKM dan Wirausaha

Memberikan dukungan modal dan pendampingan bagi UMKM agar lebih banyak menciptakan lapangan kerja serta mempermudah akses permodalan bagi pengusaha kecil dan startup lokal.

3. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dan Generasi Muda di Pasar Kerja

Program kerja fleksibel bagi perempuan yang ingin bekerja sambil mengurus keluarga dan Pelatihan kerja bagi anak muda agar lebih siap memasuki dunia kerja.

4. Peningkatan Investasi dan Insentif bagi Perusahaan

Menarik lebih banyak investasi di sektor manufaktur dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru serta Insentif pajak bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

5. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja

Optimalisasi platform digital dan bursa kerja online untuk menjembatani pencari kerja dengan perusahaan serta mengadakan job fair rutin dan memperluas layanan bimbingan karir.

SASARAN 11

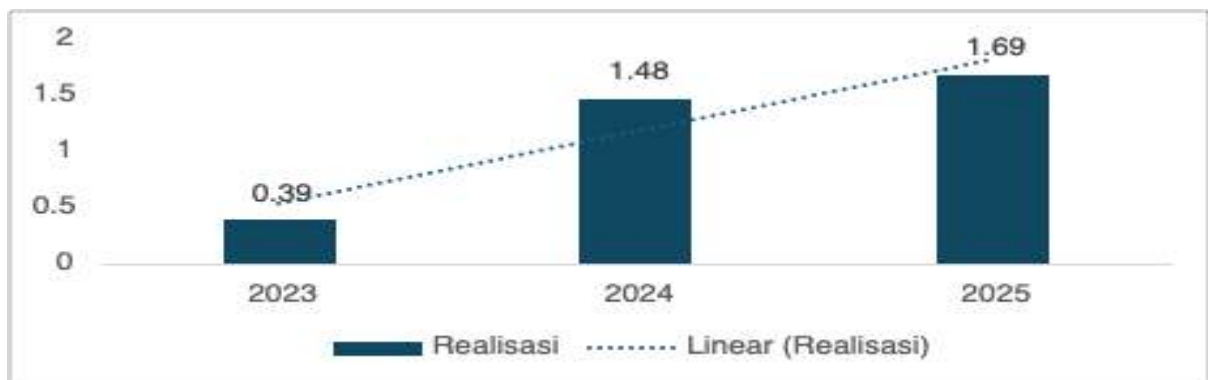
MENINGKATNYA CAKUPAN PENANGANAN PPKS

PERSENTASE PPKS YANG BERDAYA

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
1.69	1.69	100.00%	1.87



Perbandingan Realisasi PPKS yang Berdaya Tahun 2023 - 2025



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2025

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberdayaan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa kelompok rentan di masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai kesempatan ekonomi, pendidikan, serta layanan sosial.

PPKS mencakup berbagai kelompok rentan, seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, korban tindak kekerasan, warga miskin, serta fakir miskin. Berdasarkan data terbaru, jumlah total PPKS desil 1 yang

terdaftar di wilayah ini mencapai 61.685 orang. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya agar sebanyak mungkin dari mereka dapat berdaya secara ekonomi dan sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan.

Capaian indikator telah memenuhi target tahun berjalan sebesar 100%, dengan realisasi 1,69 dari target 1,69 atau sejumlah 1.044 orang. Namun demikian, untuk mencapai target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 1,87, masih diperlukan peningkatan sebesar 0,18 poin. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan dan penguatan program/kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan indikator dimaksud agar target akhir dapat tercapai sesuai waktu yang ditetapkan. Namun, jika di lihat dari realisasi pertahun menunjukkan tren positif atas ketercapaian target kinerja. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, bantuan sosial produktif, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Faktor Keberhasilan pencapaian

1. Penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan bagi PPKS

Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan organisasi masyarakat menyalurkan bantuan kepada kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial masyarakat rentan, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan sosial agar PPKS dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi di masyarakat.

2. Program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kemandirian Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melaksanakan berbagai program pemberdayaan sosial yang bertujuan mendorong masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Melalui dukungan program pemberdayaan dan pendampingan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu keluar dari permasalahan sosial dan menjadi masyarakat yang berdaya.

3. Penanganan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pemerintah daerah juga melakukan penertiban dan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya. Penanganan ini bertujuan memberikan pembinaan, rehabilitasi sosial, serta pendampingan agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

4. Penyaluran bantuan dan dukungan bagi PPKS di berbagai wilayah

Sepanjang tahun 2025, berbagai bantuan sosial dan program dukungan bagi PPKS terus disalurkan di wilayah Kabupaten Tangerang. Program ini menjangkau ratusan penerima manfaat di berbagai kecamatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, memberikan akses bantuan, serta mendorong kemandirian kelompok rentan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memastikan lebih banyak PPKS yang dapat berdaya, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Meningkatkan Akses Pelatihan dan Pendidikan Vokasi

- Menyediakan pelatihan keterampilan berbasis industri, teknologi, dan kewirausahaan bagi PPKS agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk menyediakan program magang dan sertifikasi bagi kelompok rentan.

2. Mendorong Kewirausahaan Sosial bagi PPKS

- Memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan bagi PPKS yang ingin memulai usaha kecil dan menengah (UMKM).
- Mengembangkan program inkubasi bisnis yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta untuk membantu PPKS mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan Peran Dunia Usaha dan Industri

- Mendorong kebijakan rekrutmen inklusif di perusahaan-perusahaan agar lebih banyak PPKS yang mendapatkan kesempatan bekerja di sektor formal.

- Memberikan insentif pajak atau subsidi kepada perusahaan yang aktif mempekerjakan dan memberdayakan PPKS.

4. Memperkuat Program Pendampingan dan Monitoring

- Membentuk tim pendamping sosial yang secara aktif membantu PPKS dalam proses transisi menuju kemandirian.
- Mengembangkan sistem monitoring berbasis data untuk memastikan bahwa PPKS yang telah diberdayakan tetap berada dalam kondisi yang stabil dan mandiri.

5. Optimalisasi Program Bantuan Sosial Produktif

- Mengubah pola pemberian bantuan sosial dari yang bersifat konsumtif menjadi bantuan yang lebih produktif, seperti modal usaha, alat kerja, dan akses pembiayaan mikro.

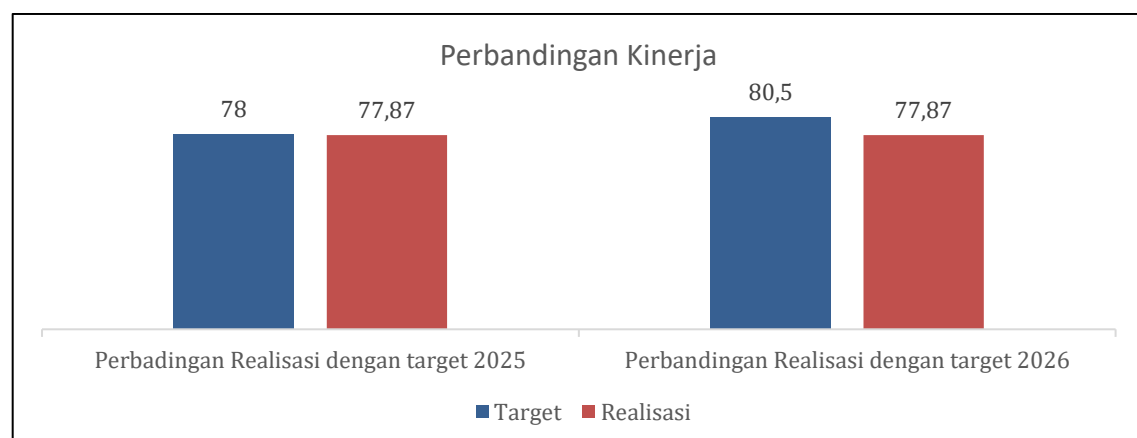
Memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang dan tidak hanya menyelesaikan masalah dalam waktu singkat.

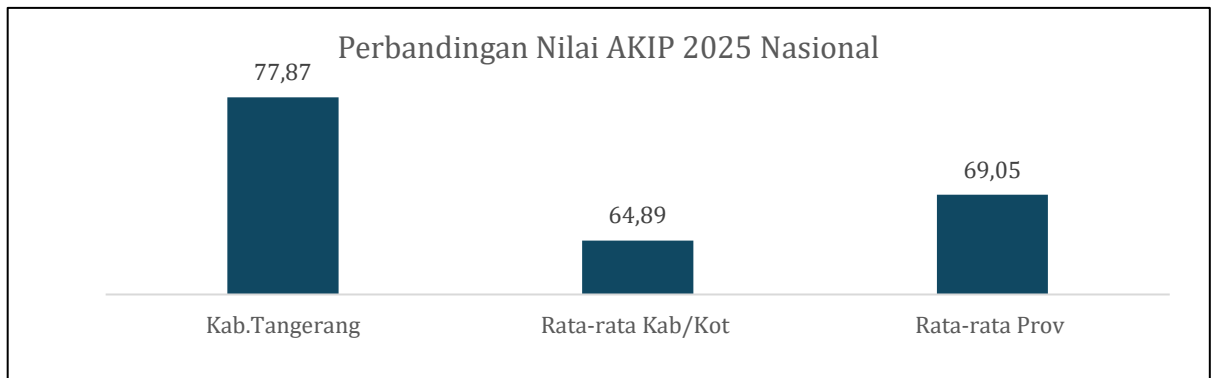
SASARAN 12

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH

NILAI SAKIP

arget	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
78	77,87	99,8%	80,5





Sumber: LHE SAKIP Kementerian PANRB, 2026

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi akip yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada setiap instansi pemerintah, Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Realisasi nilai SAKIP pada tahun ini mencapai 77,87, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 78. Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi target, capaian kinerja masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 99,8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai target yang lebih tinggi. Ke depan, dengan target akhir RPD sebesar 80,5, diperlukan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa nilai sebesar **77.87 (sumber. KemenPANRB RI)** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik". yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama. namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja

Faktor Kegagalan pencapaian target

Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 78 pada tahun pelaporan belum sepenuhnya tercapai, dengan realisasi sebesar 77,87. Selisih yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa catatan perbaikan, antara lain penyempurnaan indikator kinerja agar lebih selaras dengan sasaran strategis, peningkatan keterpaduan dokumen perencanaan dan dokumen kinerja tahunan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar

dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal juga masih perlu ditingkatkan guna memperkuat kualitas implementasi manajemen kinerja.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih relevan dan berorientasi pada outcome.

Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja, khususnya pada indikator yang belum secara langsung mengukur hasil atau dampak pembangunan. Indikator kinerja harus disesuaikan agar mampu merepresentasikan pencapaian sasaran strategis secara lebih akurat, sehingga pengukuran kinerja dapat mencerminkan keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Menyelaraskan dokumen perencanaan jangka menengah dengan dokumen perencanaan tahunan

Pemerintah daerah perlu memastikan keselarasan antara dokumen RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan Perjanjian Kinerja tahunan. Hal ini dapat dilakukan melalui reviu dokumen perencanaan secara berkala, sehingga seluruh sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dapat terakomodasi secara konsisten dalam dokumen perencanaan tahunan.

3. Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja agar lebih menantang dan mendorong peningkatan kinerja

Perangkat daerah perlu menetapkan target kinerja yang realistis namun tetap menantang, dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta potensi peningkatan kinerja yang dapat dicapai. Hal ini bertujuan agar target kinerja dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan tidak hanya mempertahankan capaian sebelumnya.

4. Melengkapi definisi operasional indikator kinerja utama (IKU)

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh indikator kinerja utama memiliki definisi operasional yang jelas, termasuk metode pengukuran, sumber data, dan satuan pengukuran. Hal ini penting untuk meningkatkan konsistensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

5. Meningkatkan capaian kinerja unit kerja yang belum memenuhi target

Perangkat daerah perlu melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang capaian kinerjanya masih di bawah target, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlu dilakukan langkah perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan capaian kinerja.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan Keputusan

Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan target kinerja pada periode berikutnya. Hal ini bertujuan agar perencanaan kinerja lebih berbasis pada hasil evaluasi dan data kinerja yang telah dicapai sebelumnya.

7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal secara tepat waktu

Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memastikan bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal, khususnya dari Inspektorat, ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Tindak lanjut ini penting untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi SAKIP dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara keseluruhan.

8. Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SAKIP di seluruh perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen SAKIP telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0,53	0,605	114,20%	0,53



Sumber: LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 0,605, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,53 dengan capaian kinerja sebesar 114,20%. Capaian ini juga telah memenuhi target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 0,53, sehingga secara kuantitatif menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebesar 0,605 menempatkan daerah pada kategori “**Mandiri**” ($0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$). Capaian ini tidak hanya melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,53, tetapi juga menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah telah berada pada level yang relatif kuat dalam menopang pembiayaan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konseptual, nilai tersebut mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah telah cukup dominan, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat semakin terkendali dan ruang fleksibilitas fiskal daerah semakin luas.

Apabila dilihat dari tren tahun sebelumnya, indeks kemandirian fiskal Kabupaten Tangerang menunjukkan pola yang relatif stabil pada periode 2022–2024 (0,5376 pada 2022; 0,5515 pada 2023; dan 0,5324 pada 2024), sebelum mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 0,605. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah, serta semakin berkurangnya ketergantungan relatif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara struktural, indeks kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah dari sumber-sumber pendapatan sendiri. Dengan nilai 0,605, Kabupaten Tangerang berada pada kategori kemandirian fiskal yang kuat, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh struktur pembiayaan daerah telah didukung oleh PAD. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pengelolaan pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta optimalisasi sumber pendapatan lainnya yang sah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, posisi Kabupaten Tangerang (0,605) berada di atas Kota Tangerang (0,484) dan Kota Tangerang Selatan (0,523), meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten (0,735). Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki kapasitas fiskal yang relatif

kompetitif di tingkat regional, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat daya saing fiskal agar mendekati tingkat kemandirian fiskal provinsi secara keseluruhan.

Peningkatan signifikan pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, antara lain optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak, serta

perbaikan tata kelola pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, pengendalian belanja dan peningkatan efisiensi anggaran juga turut berkontribusi dalam memperkuat rasio kemandirian fiskal.

Namun demikian, meskipun capaian tahun 2025 telah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa kemandirian fiskal bukan hanya soal peningkatan angka rasio, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan struktur pendapatan dan kualitas belanja daerah. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan PAD bersifat berkelanjutan, tidak bergantung pada sumber pendapatan yang fluktuatif, serta tetap memperhatikan prinsip keadilan dan daya beli masyarakat.

Selain itu, struktur ekonomi daerah yang dinamis, perkembangan investasi, dan pertumbuhan sektor usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah. Oleh karena itu, penguatan basis pajak, perluasan objek retribusi yang potensial, serta pengembangan kerja sama pemanfaatan aset daerah perlu terus didorong agar kemandirian fiskal dapat meningkat secara progresif.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang berada pada arah yang positif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ke depan, strategi peningkatan kemandirian fiskal akan diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan, serta peningkatan kualitas belanja agar setiap rupiah yang dihimpun mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor Keberhasilan pencapaian

1. Sampai akhir 2025, realisasi PAD Kabupaten Tangerang telah mencapai 93,32% dari target Rp5,148 triliun, dengan sisa gap yang masih optimis akan terpenuhi sebelum akhir tahun fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa daerah secara konsisten meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, retribusi, dividen, dan kekayaan daerah lainnya, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur fiskal daerah.
2. Kabupaten Tangerang aktif melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari

pemerintah pusat sebesar Rp620 miliar. Pendekatan ini menunjukkan strategi yang responsif dalam memperkuat basis penerimaan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak atau retribusi.

3. Realitas investasi di Kabupaten Tangerang menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif pada Triwulan IV 2025, dengan realisasi investasi sebesar Rp37,62 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa lingkungan usaha lokal cukup menarik dan mampu menarik investasi PMDN dan PMA.
4. Pelayanan OSS (Online Single Submission) berbasis risiko di Kabupaten Tangerang berjalan efektif, dengan penerbitan 2.595 Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai November 2025. Mayoritas pengguna NIB berasal dari usaha mikro dan kecil menengah, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong legalitas dan formalisasi UMKM.
5. Kabupaten Tangerang meraih beberapa penghargaan pada Digiwara Award 2025 termasuk kategori penggunaan pembayaran digital tertinggi untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencapaian ini menunjukkan transformasi digital yang berhasil diterapkan dalam sistem pembayaran dan penerimaan daerah

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melanjutkan dan memperluas intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, integrasi data lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan data sektoral (perizinan, investasi, pertanahan, dan usaha) guna meningkatkan akurasi potensi PAD.
2. Memperkuat digitalisasi penerimaan daerah dengan optimalisasi kanal pembayaran non-tunai, integrasi sistem pajak daerah dengan perbankan dan sistem OSS, serta peningkatan literasi digital bagi wajib pajak untuk mendorong kepatuhan dan kemudahan transaksi.
3. Melakukan diversifikasi sumber PAD agar tidak bergantung pada satu atau dua jenis pajak dominan, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan pengembangan skema kerja sama pemanfaatan aset yang produktif.
4. Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada outcome, sehingga pertumbuhan PAD berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing ekonomi daerah.

5. Memperkuat iklim investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, kepastian regulasi, dan percepatan layanan usaha guna memperluas basis ekonomi dan meningkatkan potensi pajak daerah secara berkelanjutan.
6. Mengantisipasi risiko fiskal dengan menyusun proyeksi pendapatan berbasis skenario (scenario planning), memperkuat cadangan fiskal, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi penurunan penerimaan akibat perlambatan ekonomi atau perubahan kebijakan pusat.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap rasio kemandirian fiskal untuk memastikan tren peningkatan bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan temporer.

OPINI BPK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
WTP	WTP	100%	WTP

Tahun	Opini BPK
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP
2024	WTP
2025	-

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten, 2024

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan dan direalisasikan sebesar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian kinerja 100%. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, opini WTP berhasil dipertahankan secara konsisten selama empat tahun berturut-turut. Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2025 opini masih dalam proses karena hasil pemeriksaan belum diterbitkan.

Konsistensi opini WTP selama empat tahun menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, serta tidak terdapat salah saji material yang mempengaruhi kewajaran laporan. Hal ini mencerminkan stabilitas dalam sistem pelaporan keuangan, penatausahaan anggaran, serta pengendalian administrasi keuangan daerah.

Namun demikian, keberlanjutan opini WTP perlu dianalisis secara lebih substantif. Meskipun opini tetap WTP, masih terdapat temuan berulang dalam tiga tahun terakhir serta catatan terkait pengelolaan aset. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan secara sistemik. WTP menilai kewajaran penyajian laporan secara material, bukan berarti tidak terdapat kelemahan pengendalian atau kekurangan administratif.

Keberadaan temuan berulang menunjukkan adanya celah pengendalian yang belum sepenuhnya tertutup, baik pada aspek kepatuhan, penatausahaan, maupun proses bisnis tertentu. Sementara itu, catatan terkait aset menandakan bahwa pengelolaan, pencatatan, dan pengamanan aset daerah masih memerlukan penguatan agar lebih tertib, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Area aset seringkali menjadi sektor yang kompleks karena melibatkan inventarisasi fisik, legalitas kepemilikan, rekonsiliasi nilai, serta konsistensi pencatatan antar unit.

Di sisi lain, target mempertahankan opini WTP hingga tahun 2026 menunjukkan komitmen terhadap kesinambungan tata kelola keuangan yang baik. Tantangan ke depan tidak hanya mempertahankan label WTP, tetapi memastikan bahwa kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko semakin matang, terutama seiring meningkatnya kapasitas fiskal dan kompleksitas transaksi keuangan daerah.

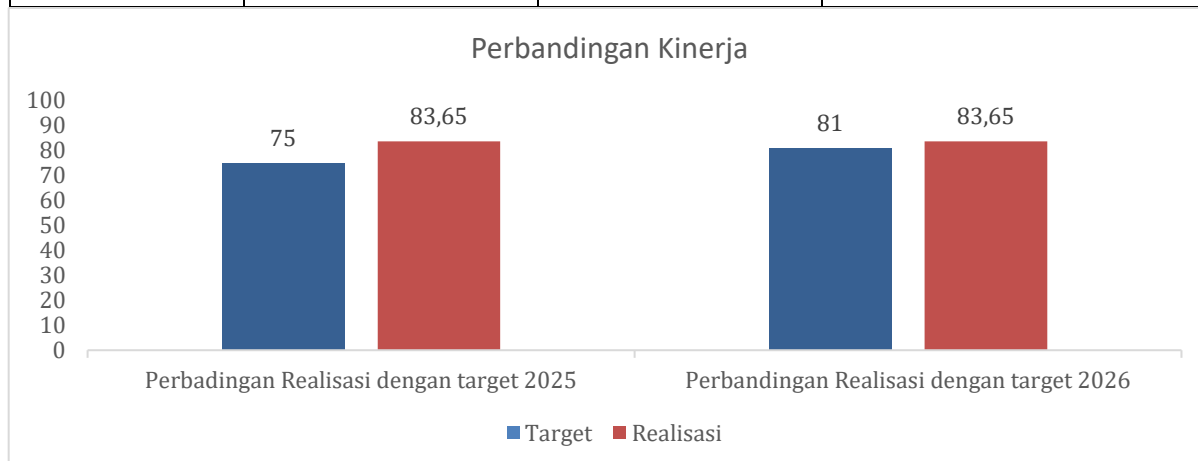
Dengan demikian, tren opini WTP selama empat tahun berturut-turut mencerminkan fondasi tata kelola yang stabil. Namun untuk menjaga keberlanjutan kualitas tersebut, diperlukan penguatan penyelesaian temuan berulang secara tuntas, pembenahan sistem pengelolaan aset, serta peningkatan efektivitas pengendalian intern agar kualitas laporan keuangan tidak hanya wajar secara material, tetapi juga kuat secara substantif dan berkelanjutan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan evaluasi menyeluruh atas temuan tiga tahun terakhir untuk mengidentifikasi penyebab mendasar, bukan hanya memperbaiki dampaknya. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan prosedur, revisi SOP, atau penguatan sistem pengendalian agar tidak kembali terulang pada periode audit berikutnya.
2. Meningkatkan efektivitas pengendalian pada area berisiko tinggi seperti belanja modal, pengadaan barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial. Termasuk di dalamnya peningkatan fungsi monitoring dan reвью internal sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan.
3. Melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi aset secara berkala, mempercepat penyelesaian legalitas aset (sertifikasi), memperbaiki sistem pencatatan berbasis aplikasi yang terintegrasi, serta memperkuat pengawasan fisik dan administrasi aset tetap.
4. Membentuk mekanisme monitoring berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi, termasuk penetapan batas waktu yang jelas dan penanggung jawab pada setiap perangkat daerah, sehingga tidak terjadi akumulasi temuan.
5. Melakukan pelatihan teknis akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset, dan manajemen risiko agar kualitas penyusunan laporan keuangan semakin akurat serta adaptif terhadap perubahan regulasi.
6. Mengintegrasikan identifikasi risiko ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga potensi kesalahan administrasi atau ketidakpatuhan dapat dicegah sebelum menjadi temuan audit.
7. Melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh sebelum audit BPK untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung, rekonsiliasi, dan pengungkapan laporan telah sesuai standar dan bebas dari potensi koreksi material.

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
75	83,65	111,53%	81



Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2026

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan indikator penting dalam mengukur kompetensi, kinerja, serta dedikasi ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Profesionalisme ASN yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Tangerang telah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan data terbaru, realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 mencapai **83,65**, melampaui target tahun 2025 yang hanya ditetapkan pada **75**. Capaian ini setara dengan **111,53% dari target**, menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam peningkatan profesionalitas ASN.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar **81**, maka realisasi tahun 2025 sudah melampaui target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah lebih cepat mencapai standar profesionalisme ASN yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).'

Faktor Keberhasilan pencapaian

1. Penghargaan bagi ASN Berprestasi: Pada tahun 2025, Pemkab Tangerang mengadakan "ASN Award" sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras ASN yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan memotivasi seluruh ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Pelantikan Jabatan Fungsional: Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat kompetensi dan profesionalisme ASN, sehingga mereka dapat lebih fokus pada bidang tugasnya dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
3. Sosialisasi Penegakan Disiplin dan Etika: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan disiplin dan etika ASN. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar profesional dan kode etik yang berlaku.
4. Pengembangan Kompetensi Pegawai: Pemerintah Kabupaten Tangerang mengembangkan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
5. Layanan Kepegawaian Berbasis Digital: BKPSDM Kabupaten Tangerang menyediakan layanan kepegawaian untuk ASN, termasuk pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, promosi jabatan, serta konsultasi dan verifikasi data kepegawaian. Layanan ini mempermudah ASN dalam mengelola karier mereka dan memastikan proses administrasi berjalan efisien.

RENCANA TINDAK

1. **Peningkatan Kapasitas ASN Secara Merata**
 - Melakukan pemetaan kompetensi ASN di setiap OPD untuk mengetahui kebutuhan pelatihan yang spesifik.
 - Menyelenggarakan pelatihan teknis dan kepemimpinan berbasis kebutuhan nyata di masing-masing unit kerja.

2. Percepatan Digitalisasi dalam Tata Kelola ASN

- Mengadakan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menggunakan sistem berbasis teknologi.
- Mengembangkan aplikasi terpadu untuk mempermudah akses layanan kepegawaian secara real-time.

3. Peningkatan Sistem Redistribusi Pegawai

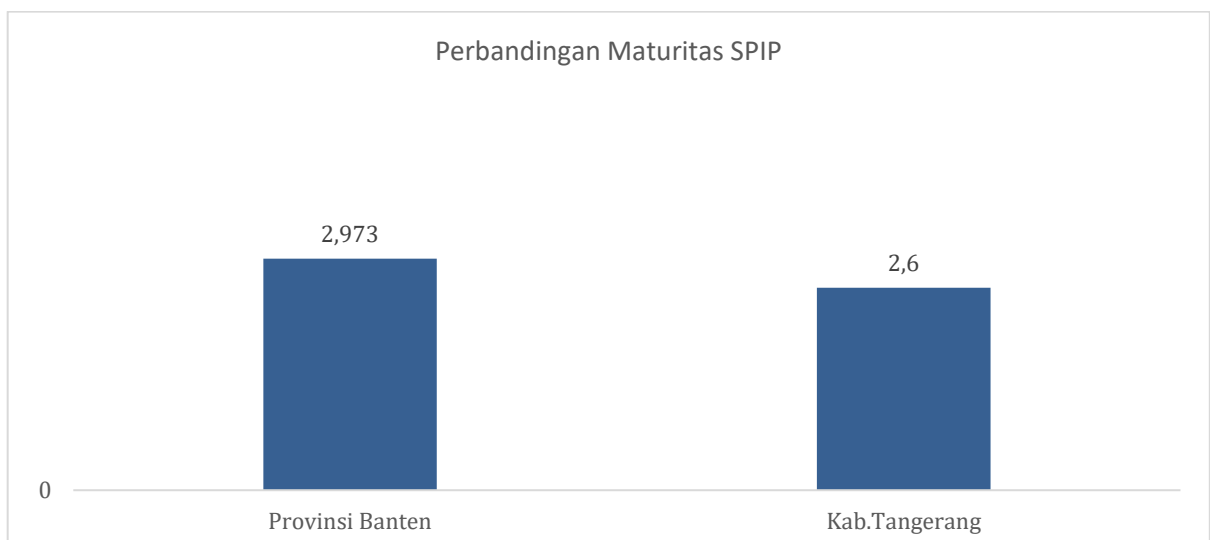
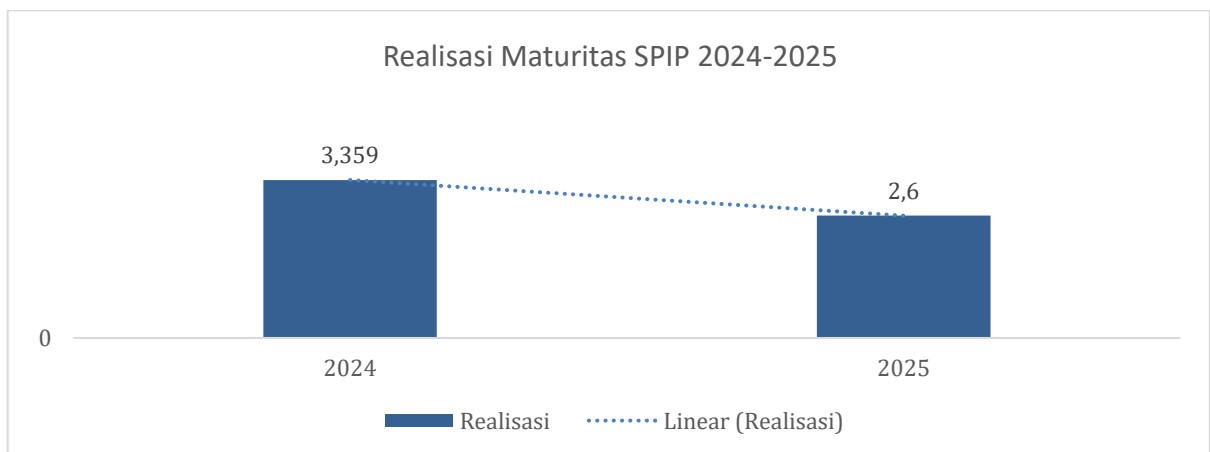
- Melakukan analisis beban kerja untuk mendistribusikan pegawai secara lebih proporsional.
- Menempatkan ASN sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki agar lebih produktif.

4. Transformasi Budaya Kerja ASN

- Mengadopsi model kerja berbasis kinerja dan hasil, bukan sekadar kehadiran fisik.
- Mendorong inovasi dan kreativitas di lingkungan ASN dengan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.

NILAI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3	2,6	67%	3



Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi Tahun 2025, Kabupaten Tangerang memperoleh nilai sebesar 2,6 dari target 3, dengan capaian kinerja sebesar 67%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai nilai 3,359, terjadi penurunan tingkat maturitas yang cukup signifikan. Grafik tren 2024–2025 menunjukkan adanya koreksi nilai yang menempatkan Kabupaten Tangerang pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus berada di bawah rata-rata Provinsi Banten yang sebesar 2,973. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas penerapan pengendalian intern belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi panel, penurunan nilai tersebut tidak semata-mata menunjukkan melemahnya praktik pengendalian intern, tetapi lebih pada belum optimalnya integrasi antar unsur SPIP, khususnya pada aspek manajemen risiko, pengendalian atas pencapaian kinerja, serta dokumentasi dan eviden pendukung yang dipersyaratkan dalam penilaian. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya menjadikan manajemen risiko sebagai dasar dalam perencanaan dan pengendalian program, sehingga keterkaitan antara risiko strategis, sasaran kinerja, dan langkah mitigasi belum tergambar secara kuat dan sistematis.

Selain itu, terdapat catatan bahwa pemanfaatan hasil evaluasi sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh seluruh unit kerja. Hal ini berdampak pada belum meratanya kualitas implementasi SPIP di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, meskipun secara administratif sistem telah berjalan, namun pada level kematangan (*maturity level*) masih memerlukan penguatan terutama dalam integrasi proses, konsistensi penerapan, dan penguatan fungsi monitoring serta evaluasi internal.

Faktor Kegagalan pencapaian target

1. Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis outcome

Meskipun indikator dan strategi pencapaian kinerja telah dirumuskan, masih terdapat sasaran dan indikator yang belum sepenuhnya merepresentasikan hasil akhir (*outcome*) serta belum didukung target yang terukur dan tepat.

2. Pengelolaan risiko belum komprehensif dan terintegrasi

Kebijakan manajemen risiko dan pengendalian telah disusun, namun belum seluruhnya mencakup risiko sektoral secara menyeluruh. Implementasi pengendalian risiko, termasuk risiko korupsi, belum merata di seluruh unit kerja dan belum dievaluasi efektivitasnya secara sistematis.

3. Efektivitas pengendalian proses bisnis utama belum optimal

Pengendalian atas program dan kegiatan telah berjalan, namun pada beberapa proses inti organisasi masih ditemukan kelemahan sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin ketercapaian tujuan strategis secara efektif.

4. Capaian kinerja belum sepenuhnya mencerminkan hasil yang optimal

Beberapa sasaran strategis dan program belum menunjukkan outcome yang kuat karena indikator yang digunakan belum sepenuhnya komprehensif dan terintegrasi dengan indikator nasional maupun standar yang lebih luas.

5. Permasalahan tata kelola dan kepatuhan masih memerlukan penguatan

Meskipun opini LKPD telah WTP, masih terdapat temuan berulang, catatan pengelolaan aset, serta aspek kepatuhan yang perlu diperbaiki guna memperkuat sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja melalui penyesuaian indikator agar lebih berorientasi pada outcome dan memenuhi prinsip SMART. Proses cascading sasaran akan diperkuat dari RPJMD hingga Perjanjian Kinerja perangkat daerah agar selaras dengan proses bisnis organisasi. Selain itu, penetapan target kinerja akan berbasis data historis dan analisis proyeksi yang realistis, disertai benchmarking dengan daerah lain dan indikator nasional. Menetapkan target indikator secara tepat dan baik serta memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound (SMART) dalam dokumen perencanaan;
2. Akan dilakukan pembaruan kebijakan manajemen risiko yang mencakup pembangunan budaya sadar risiko, penetapan risk appetite, serta integrasi risiko dalam perencanaan dan penganggaran. Seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun dan memperbarui peta risiko sektoral serta melakukan identifikasi risiko fraud pada proses bisnis utama. Evaluasi atas

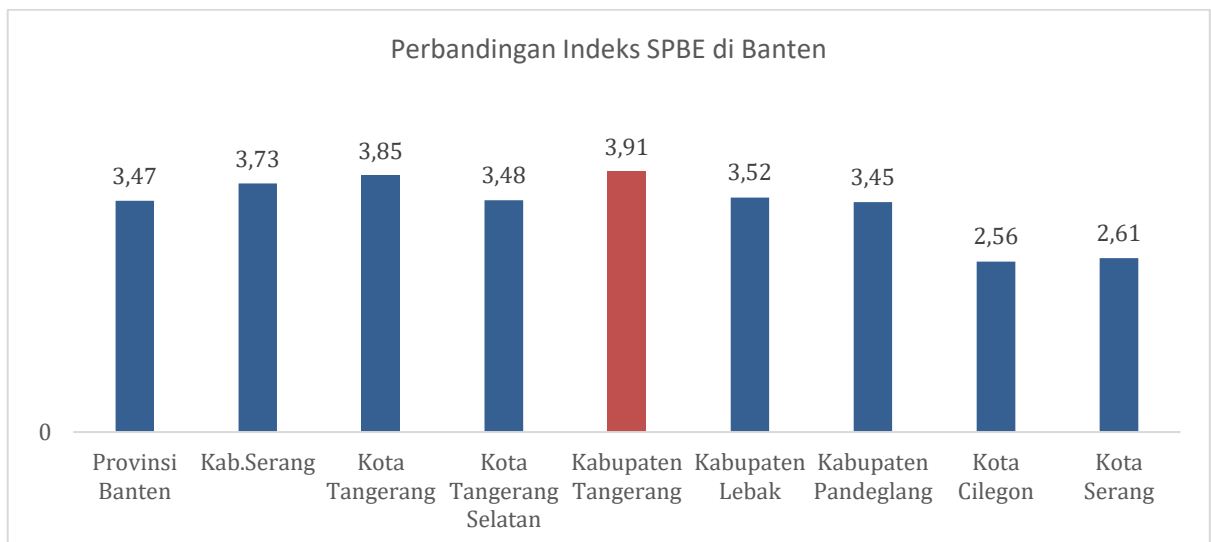
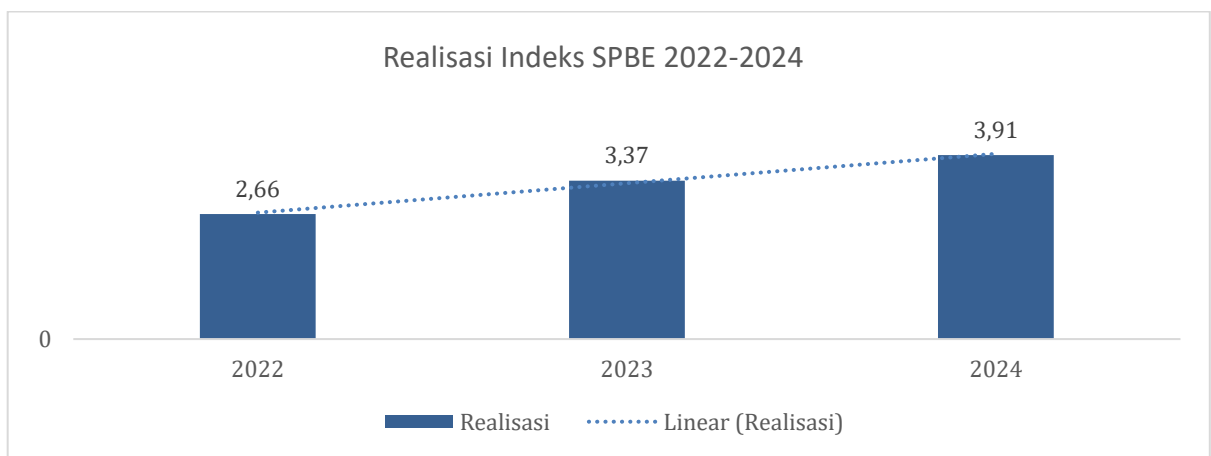
efektivitas pengendalian risiko akan dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan secara periodik. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:

3. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap SOP pada proses bisnis utama yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Penguatan fungsi pengawasan internal akan dilakukan untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian intern dan manajemen program akan menjadi prioritas melalui pelatihan dan pembinaan teknis.
4. Sistem monitoring dan evaluasi akan diarahkan pada pengukuran berbasis outcome dengan memanfaatkan integrasi data kinerja lintas perangkat daerah. Indikator kinerja akan diselaraskan dengan indikator nasional dan standar yang relevan agar capaian lebih komprehensif. Hasil evaluasi kinerja akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan perencanaan tahun berikutnya.
5. Akan dilakukan identifikasi akar penyebab temuan berulang dalam LHP BPK dan disusun langkah pengendalian yang bersifat preventif. Pengelolaan aset akan diperkuat melalui validasi dan penertiban administrasi serta peningkatan pengamanan fisik dan legal. Di samping itu, penguatan kepatuhan terhadap regulasi akan dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan guna mencegah terulangnya temuan di masa mendatang.

INDEKS SPBE

*menggunakan realisasi

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
3,19	3,91	81,59%	3,21



Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Realisasi indeks SPBE pada tahun ini mencapai angka 3,91,

yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,19. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa strategi dan kebijakan digitalisasi yang diterapkan telah berjalan dengan baik, serta adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2024 dilakukan berdasarkan instrumen yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pemantauan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Adapun rincian capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,91
Domain Kebijakan SPBE	3,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,50
Domain Tata Kelola SPBE	3,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,88
<i>Audit TIK</i>	2,67
Domain Layanan SPBE	4,75
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

Faktor Pendukung Capaian Target

1. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya Kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit dan Tim Koordinasi SPBE.
2. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Perencanaan strategis SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE dan Dokumen Proses Bisnis.
3. Secara keseluruhan penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya SOP pembangunan aplikasi yang sesuai SDLC dan di konsultasikan dengan Kominfo. Juga dengan sudah digunakannya Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan oleh seluruh unit kerja.
4. Secara keseluruhan penerapan aspek Penyelenggara SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya Tim Kordinasi yang telah melaksanakan semua rencana kegiatannya dan dilakukannya kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja.
5. Secara keseluruhan penerapan Manajemen SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan dilaksanakannya penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan yang dilakukan berdasar peta rencana SPBE.
6. Secara keseluruhan pelaksanaan Audit TIK yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% , dengan adanya pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE.
7. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan adanya layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis,

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

8. Secara keseluruhan penerapan dari aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai 100%, dengan adanya layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, JDIH, dan tiga layanan Publik Sektor.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

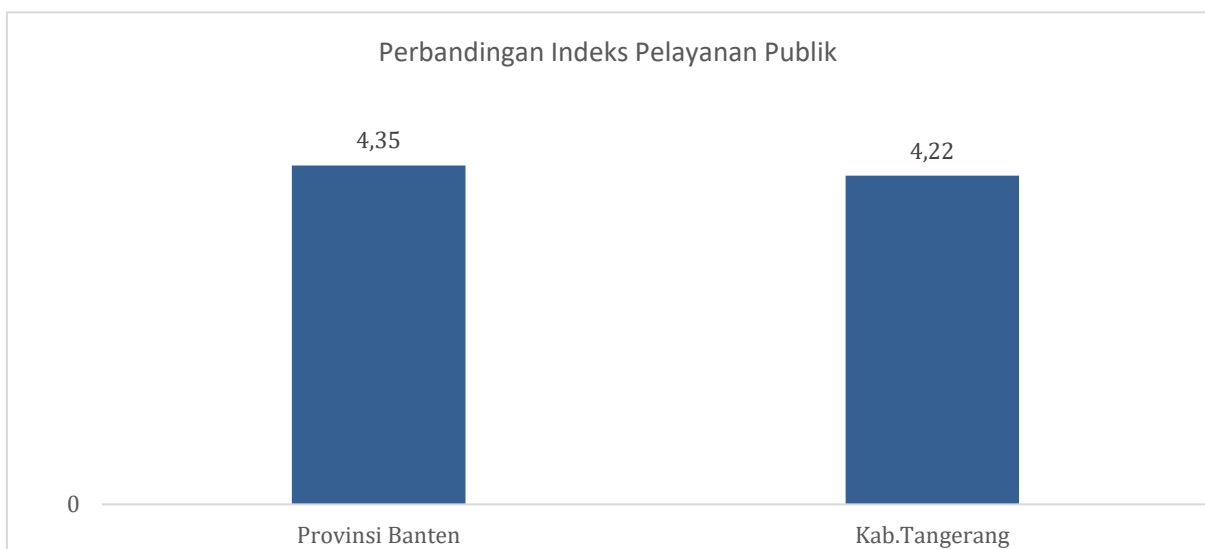
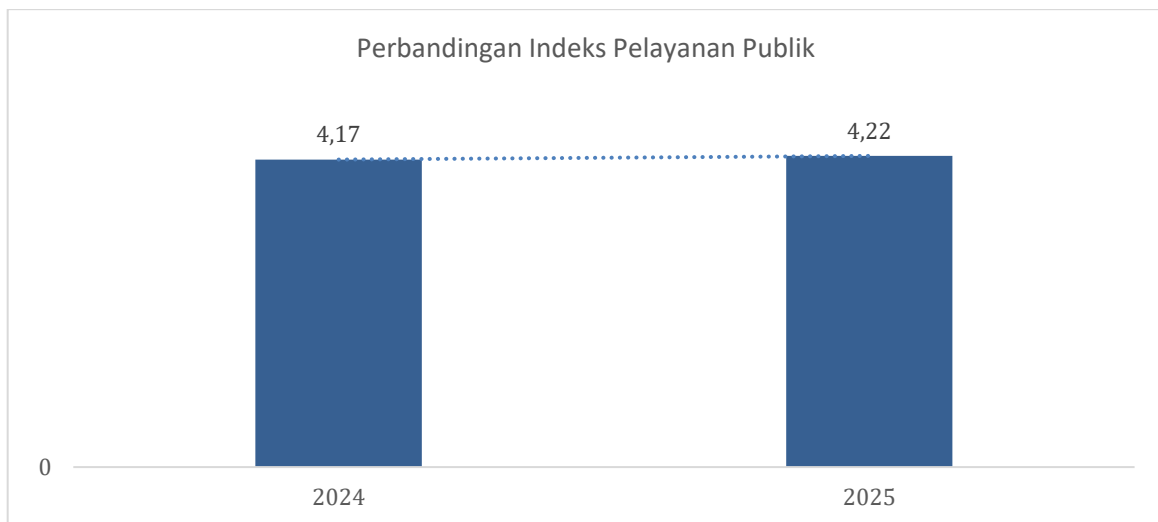
1. Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Kedua nya belum secara lengkap menyebutkan muatan-muatan yang seharusnya ada pada isi kebijakan internal.
2. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dimana belum seluruh unit kerja belanja TIK nya telah dikonsultasikan kepada Dinas Kominfo.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum lengkapnya dormasi untuk 6 bidang kompetensi, dan Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan yang belum dimanfaatkan untuk seluruh unit kerja.
4. Pelaksanaan Audit Keamanan yang belum dilakukan oleh BSSN.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu dilakukan pembaharuan Perda SPBE yang mencakup secara lengkap muatan yang diperlukan, sehingga beberapa nilai yang belum bernilai 3 akan ada di nilai standar 3 sekaligus beberapa nilai lain dapat masuk pada nilai 5. Dengan catatan, sebelumnya telah dilakukan review per indikator untuk indikator yang sudah bernilai 3.
2. Perlu dilakukan pendokumentasian secara lengkap saat adanya konsultasi anggaran semua unit kerja kepada dinas Kominfo. Sebaiknya terdapat dokumen resmi yang didalamnya terdapat persetujuan Dinas Kominfo untuk anggaran TIK.
3. Pembuatan SOP atau pedoman untuk pelaksanaan Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan. Sehingga apa yang dilaksanakan sudah berdasar pada pedoman.
4. Pengajuan Audit Keamanan kepada BSSN
5. Evaluasi aplikasi, penambahan fitur dalam aplikasi Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
4,30	4,22	98%	4,4



Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang mencatat realisasi sebesar **4,22**, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,17. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,30 dan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 4,40, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan secara lebih optimal.

Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan penguatan dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Sepanjang Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong pengawasan langsung terhadap kualitas pelayanan melalui monitoring berkala, penguatan disiplin aparatur, serta optimalisasi layanan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat.

Selain itu, berbagai inovasi pelayanan publik terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan. Transformasi digital dan integrasi sistem pelayanan menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Upaya ini turut berkontribusi terhadap peningkatan persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam meningkatkan konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah serta memperkuat efektivitas prosedur dan waktu penyelesaian layanan. Kompleksitas wilayah dan tingginya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga standar pelayanan tetap optimal dan merata.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang berada pada kategori baik dan menunjukkan tren peningkatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencapai target kinerja Tahun 2026 serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1. Belum meratanya kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah

Meskipun sebagian unit layanan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar standar pelayanan yang tinggi dapat tercapai secara merata.

2. Optimalisasi standar pelayanan yang belum sepenuhnya konsisten

Penerapan standar pelayanan, khususnya terkait kecepatan layanan, penyederhanaan prosedur, dan kepastian waktu penyelesaian, masih memerlukan penguatan agar seluruh layanan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara optimal.

3. Transformasi digital yang masih dalam tahap penguatan integrasi

Pengembangan pelayanan berbasis digital telah berjalan, namun integrasi antar sistem dan pemanfaatannya secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kemudahan akses dan efisiensi layanan.

4. Beban layanan yang tinggi akibat kompleksitas wilayah dan jumlah penduduk

Sebagai daerah dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, beban pelayanan publik relatif tinggi sehingga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya dan sistem pelayanan yang lebih adaptif.

5. Persepsi kepuasan masyarakat yang terus meningkat

Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga menjadi tantangan tersendiri. Standar pelayanan yang sebelumnya dinilai baik kini dituntut untuk mencapai kategori sangat baik secara konsisten.

Walaupun Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan inovasi pelayanan public seperti berikut :

1. Pembukaan Gerai Pelayanan Publik (GPP) untuk memudahkan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka Gerai Pelayanan Publik (GPP) Intermoda Cisauk untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi dalam satu lokasi. Layanan ini mengintegrasikan berbagai instansi seperti Dukcapil, BPN, BPJS, Samsat,

Kemenag, dan Polres sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus dokumen.

2. Penambahan gerai pelayanan publik

Pemkab Tangerang juga berencana menambah **Gerai Pelayanan Publik di Intermoda Cisauk** sebagai upaya memperluas akses pelayanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

3. Perluasan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan

Pemerintah Kabupaten Tangerang memperluas pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak langsung di kantor kecamatan. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil di Tigaraksa sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dan mudah diakses.

4. Aplikasi Tangerang Gemilang mempermudah akses layanan public

Tangerang Gemilang merupakan portal layanan digital Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu aplikasi. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti administrasi, informasi daerah, pengaduan, hingga layanan darurat secara lebih mudah melalui ponsel.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Standarisasi dan pemerataan kualitas pelayanan

Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan di seluruh perangkat daerah guna memastikan keseragaman kualitas layanan. Unit layanan yang telah mencapai kategori sangat baik akan dijadikan role model untuk direplikasi pada unit kerja lainnya.

2. Penyederhanaan prosedur dan percepatan waktu layanan

Akan dilakukan reviu terhadap prosedur layanan yang masih berpotensi menimbulkan hambatan, dengan tujuan menyederhanakan alur proses serta memastikan kepastian waktu penyelesaian layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

3. Percepatan transformasi digital pelayanan publik

Pemerintah daerah akan memperkuat integrasi sistem layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses masyarakat, mengurangi kontak langsung yang tidak perlu, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pelayanan.

4. Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur

Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik akan dilakukan melalui pelatihan teknis, pembinaan etika pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5. Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat Aplikasi Tangerang Gemilang mempermudah akses layanan publik

Sistem pengaduan akan dioptimalkan dengan memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hasil pengaduan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan Masyarakat

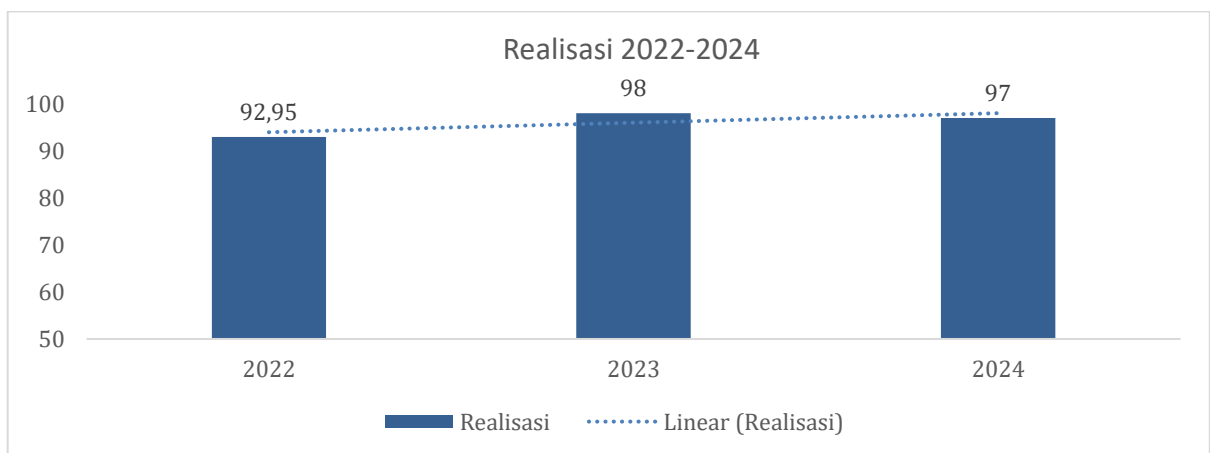
Survei Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan pada tahun berjalan.

SASARAN 13

MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

PRESENTASE INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI BAIK

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
95%	97%	102,11%	95,5%



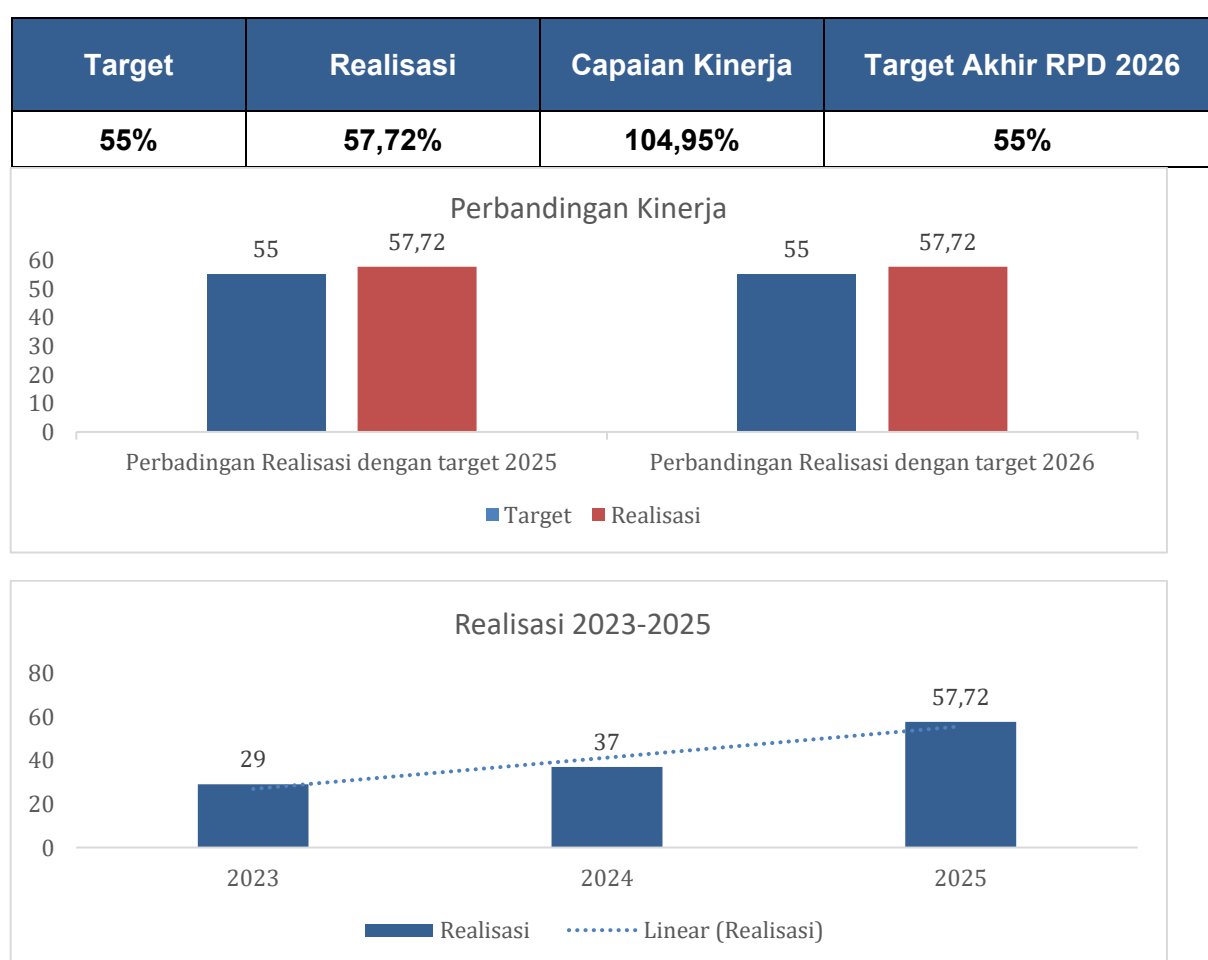
Capaian kinerja infrastruktur dalam kondisi baik merupakan salah satu indikator utama dalam memastikan layanan publik yang optimal. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 95%, dengan realisasi 2024 mencapai 97%. Meskipun terdapat sedikit selisih dari target awal, kinerja yang dicapai tetap menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur. Bahkan, capaian kinerja mencapai 102,11%, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mempertahankan infrastruktur dalam kondisi layak guna. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 terjadi penurunan kinerja sebesar 2%. Adapun rinciannya sebagai berikut : Dari 12.893 gedung dan bangunan, 12.506 nya dalam kondisi baik, sementara dari 207 rusak ringan dan 180 lainnya rusak berat.

Adapun penetapan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 ditetapkan sebesar 95,5%. Penyesuaian target ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur, seperti keterbatasan anggaran, meningkatnya biaya perbaikan, serta tantangan

lingkungan yang semakin kompleks. Selain itu, banyaknya infrastruktur yang telah berusia tua membutuhkan perhatian lebih dalam rehabilitasi, yang tidak hanya memerlukan anggaran besar tetapi juga perencanaan teknis yang lebih matang.

Dalam upaya memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pemeliharaan berkala, optimalisasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan perbaikan infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan infrastruktur dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

PRESENTASE REALISASI POLA PEMANFAATAN RUANG SESUAI RTRW



Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, 2025

Pada Tahun 2025, persentase realisasi pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang mencapai **57,72%**, melebihi target yang ditetapkan sebesar **55%**. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengendalian tata ruang dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini juga mencerminkan penguatan koordinasi pelaksanaan

perencanaan ruang secara lebih efektif dan terukur, terutama setelah kondisi pada 2024 masih menunjukkan tantangan besar dengan kesesuaian hanya **37%**.

Evaluasi tahun sebelumnya memperlihatkan tekanan terhadap kawasan lindung, di mana dari total luas **2.774 hektar**, hanya **805 hektar (29,02%)** yang benar-benar sesuai dengan RTRW. Sekitar **1.969 hektar** sisanya mengalami indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti penggunaan lahan untuk pembangunan rumah, jalan, dan infrastruktur lain yang tidak sesuai dengan peruntukan. Situasi ini menggambarkan masih tingginya tekanan pembangunan terhadap ruang lindung dan fungsi ekologis kawasan. Namun pada akhir tahun 2024, luas area yang sesuai meningkat menjadi lebih dari **1.026 hektar (37%)**, sedangkan indikasi pelanggaran menurun menjadi **1.747,62 hektar**, menunjukkan langkah awal perbaikan pola pemanfaatan ruang.

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang di 2025 tidak terlepas dari konteks penegakan aturan dan pengawasan yang lebih tegas. Sepanjang 2025, pemerintah pusat mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran tata ruang di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di kawasan pesisir, dengan pembatalan dan pencabutan puluhan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan tanpa prosedur yang sesuai — salah satunya terkait keberadaan struktur pagar laut yang tidak berizin di kawasan pesisir Tangerang dan telah ditertibkan oleh aparat. Proses pembatalan sertifikat ini menjadi sinyal penting bahwa pengawasan penggunaan ruang semakin diperketat dan dilandasi aturan yang berlaku untuk melindungi fungsi ruang strategis, termasuk wilayah pesisir dari pemanfaatan yang menyalahi peruntukan.

Perbaikan pola pemanfaatan ruang ini juga didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih luas. Salah satu langkah strategis adalah program pembangunan RTH di **29 kecamatan**, yang bertujuan mengatasi polusi udara sekaligus meningkatkan kualitas fungsi ruang urban dan kawasan lindung ekologis di Kabupaten Tangerang. Inisiatif ini memperkuat komitmen untuk memenuhi target RTH sekitar **20%** dari total luas daerah sehingga turut mendukung keteraturan pemanfaatan ruang sesuai RTRW.

Meski capaian 57,72% menunjukkan arah perbaikan, data pemberitaan juga mencatat bahwa praktik pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi di beberapa lokasi, seperti indikasi pelanggaran di kawasan Bizlink Cikupa yang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW, dan berdampak pada sistem drainase serta

akses warga. Hal ini mencerminkan bahwa dinamika tata ruang masih menghadapi tantangan operasional di lapangan meskipun tren jangka panjangnya membaik.

Secara keseluruhan, capaian di atas target tahun 2025 menggambarkan penguatan pengendalian ruang sebagai hasil dari integrasi perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan berbasis hukum. Perbaikan ini bukan hanya angka statistik, tetapi part of an ongoing effort untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan fungsi ekologis daerah demi terciptanya lingkungan hidup, ruang pemukiman, serta infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai peraturan yang berlaku.

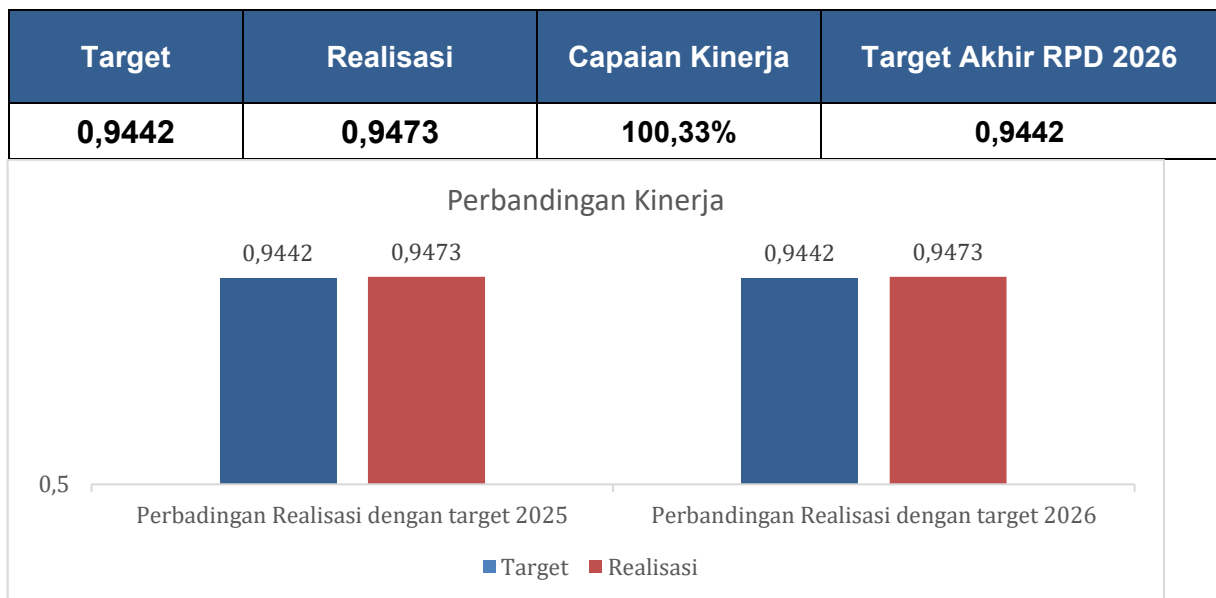
Faktor keberhasilan Capaian Target

1. **Penegakan dan penertiban perizinan ruang yang lebih tegas,**
termasuk pembatalan atau pencabutan sejumlah hak guna bangunan (HGB) dan kepemilikan sertifikat yang tidak sesuai tata ruang di kawasan pesisir, sehingga memberi efek jera dan memperkuat integritas sistem perizinan ruang.
2. **Pengawasan dan penanganan pelanggaran tata ruang yang diprioritaskan**
seperti tindak lanjut pengawasan kolaboratif antara aparat dan instansi terkait pada kasus pagar laut ilegal, sehingga semakin memperkecil ruang pelanggaran dan mendukung kesesuaian pemanfaatan ruang.
3. **Dorongan revisi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang**
termasuk arahan dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat perubahan RTRW dalam menghadapi isu perubahan lingkungan dan dinamika pembangunan, yang mendorong penataan ruang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil.
4. **Proses verifikasi dan konfirmasi peruntukan ruang yang semakin terstandarisasi,** melalui mekanisme pelayanan teknis seperti konfirmasi peruntukan ruang (PKKPR) dan site plan yang membantu memastikan setiap pembangunan sesuai dengan RTRW yang berlaku.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum tata ruang** melalui inspeksi terpadu dan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, agar tren ketidaksesuaian RTRW terus menurun secara konsisten.
2. **Mengintegrasikan sistem perizinan dengan peta RTRW berbasis digital**, sehingga setiap permohonan izin pembangunan otomatis tervalidasi kesesuaiannya sebelum diterbitkan, guna mencegah pelanggaran sejak tahap awal.
3. **Melakukan penataan dan pemulihan kawasan dengan indikasi pelanggaran**, khususnya pada kawasan lindung dan wilayah resapan air, melalui pendekatan teknis, administratif, dan kolaboratif.
4. **Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan dan memperluas ruang terbuka hijau (RTH)** untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan keberlanjutan fungsi ekologis wilayah

RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN DAN PEMAKAMAN YANG LAYAK



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, 2025

Kawasan permukiman yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan rasio luas kawasan permukiman, perumahan, dan pemakaman yang layak melalui berbagai program pembangunan dan penataan

kawasan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja hingga tahun 2025 serta membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026.

Target rasio luas kawasan permukiman, perumahan, dan pemakaman yang layak pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **0,9442**. Realisasi hingga tahun 2025 mencapai **0,9473**, yang berarti melampaui target dengan capaian kinerja **100,33%**. Target akhir RPD 2026 sebesar **0,9442**, yang berarti realisasi saat ini sudah lebih tinggi dari target jangka panjang.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan lebih baik dari proyeksi tahun 2026.

Berdasarkan rekapitulasi penanganan kawasan kumuh tahun 2025, luas kawasan kumuh yang ditangani mencapai **196 Ha**, sehingga luas kawasan permukiman layak meningkat menjadi **90.909,65 Ha**.

Tahun 2024, luas kawasan permukiman layak tercatat sebesar **90.713,65 Ha**. Tahun 2025, luas tersebut bertambah menjadi **90.909,65 Ha**. Artinya, terjadi peningkatan luas kawasan layak sebesar **196 Ha** dalam satu tahun terakhir.

Dari total luas Kabupaten Tangerang sebesar **95.961 Ha**, luas kawasan permukiman layak kini mencapai hampir **94,73%** dari total luas wilayah.

Faktor keberhasilan Capaian Target

1. Pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemerintah Kabupaten Tangerang melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.197 rumah tidak layak huni telah diperbaiki melalui program pemerintah daerah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat agar memenuhi standar hunian yang layak.

2. Dukungan anggaran daerah untuk peningkatan kualitas rumah Masyarakat

Dalam pelaksanaan program RTLH tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp35 juta untuk setiap unit rumah yang diperbaiki. Dengan dukungan anggaran tersebut, rumah masyarakat yang

sebelumnya tidak layak huni dapat direhabilitasi menjadi rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati.

3. Pemerataan pembangunan rumah layak huni di seluruh kecamatan

Program perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang, dengan jumlah yang cukup besar di wilayah pesisir seperti Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Mauk, dan Sukadiri. Pemerataan pembangunan ini bertujuan meningkatkan kualitas kawasan permukiman di berbagai wilayah sehingga semakin banyak kawasan yang memenuhi standar permukiman layak.

4. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian layak

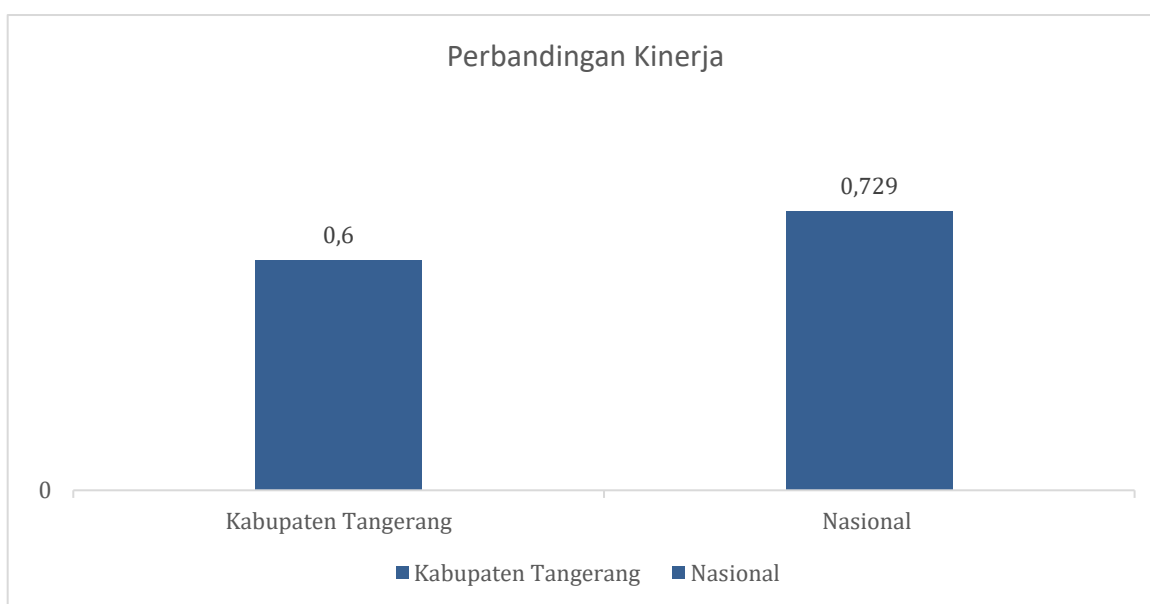
Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak huni. Program tersebut terus dilaksanakan sebagai program prioritas pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Optimalisasi Program Rehabilitasi Kawasan Kumuh:** Peningkatan alokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi.
2. **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran RTRW:** Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pembangunan tidak sesuai tata ruang.
3. **Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Perumahan Layak:** Mendorong investasi sektor swasta untuk membangun hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. **Penyediaan Infrastruktur Berbasis Smart City:** Memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan tata kota dan pemantauan perkembangan kawasan permukiman.
5. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Sosialisasi pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan permukiman.

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
0.83	0.60	72.29%	0.83



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan data ketercapaian Rasio Konektivitas Kabupaten Tangerang, realisasi tahun 2025 menunjukkan angka 0.6, yang lebih rendah dibandingkan target 0.83. Capaian kinerja hanya 72.29%, menandakan bahwa target jauh dari pencapaian optimal. Sementara itu, target akhir RPD 2026 ditetapkan sebesar 0.83, menunjukkan gap yang jauh antara target dengan capaian realisasi yang ada. Hal ini disebabkan karena perhitungan ratio konektivitas dihitung dengan pertimbangan dua komponen utama yaitu :

Rasio Konektivitas = $(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai})$

Keterangan :

A. IK1 (angkutan jalan) :

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek angkutan pedesaan.
- Jumlah kebutuhan trayek adalah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek angkutan pedesaan dalam kurun waktu tertentu.

B. IK2 (angkutan sungai, danau, dan penyebrangan)

- Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi adalah lintas perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

C. Rasio konektivitas dari angkutan sungai (persentase infrastruktur angkutan air yang tersedia dibandingkan kebutuhan ideal).

D. Bobot Angkutan Jalan adalah Proporsi angkutan jalan dalam sistem transportasi (biasanya lebih besar di daerah yang bergantung pada transportasi darat).

E. Bobot Angkutan Sungai adalah Proporsi angkutan sungai dalam sistem transportasi (biasanya lebih kecil atau nol jika tidak tersedia).

Faktor kegagalan capaian Target

Karena metode angkutan sungai tidak dimungkinkan di Kabupaten Tangerang, maka nilai IK2 dan bobot angkutan sungai menjadi nol, sehingga perhitungan rasio konektivitas hanya bergantung pada angkutan jalan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan sinkronisasi dengan rencana induk jaringan transportasi di Jabodetabek
2. Pembangunan dan perbaikan jalan utama serta jalan penghubung antar-kecamatan.

3. Peningkatan kapasitas jalan untuk mengurangi kemacetan. Dengan cara Optimalisasi Transportasi Umum
4. Penguatan jaringan angkutan umum berbasis jalan BRT, LRT dan MRT Serta Terminal Type A, C yang terintegrasi atau TOD;
5. Integrasi sistem transportasi agar lebih efisien, dengan cara Penggunaan Teknologi untuk Manajemen Lalu Lintas
6. Sistem smart traffic management untuk mengurangi bottleneck di titik rawan kemacetan.

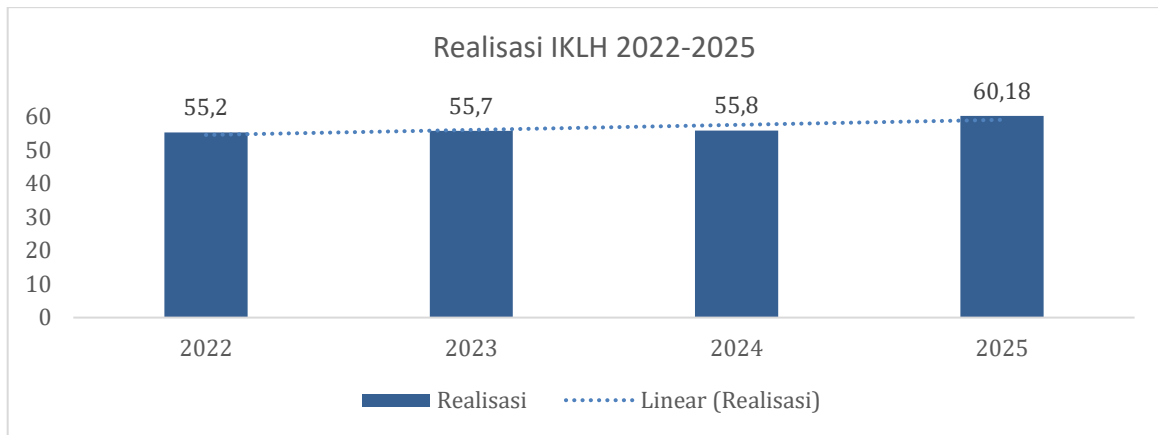
SASARAN 14

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT DAN TANGGUH TERHADAP BENCANA

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
56,89	60,18	105,78%	56,89





Sumber: Laporan IKLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

IKLH Kabupaten Tangerang dihitung dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari data hasil pemantauan kualitas air sungai di empat DAS utama (Cimanceuri, Cirarab, Cisadane, dan Cidurian), data hasil pemantauan kualitas udara di empat lokasi yang berbeda (transportasi, industri, permukiman/perumahan, dan perkantoran), dan data luas tutupan lahan. Berikut hasil perhitungan masing-masing indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2025:

- Indeks Kualitas Air (IKA) = 64,16
- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 63,55
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 47,10

Hasil perhitungan masing-masing indeks kemudian digunakan untuk menghitung IKLH berdasarkan data yang sudah terverifikasi oleh KLH, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH Kab. Tangerang} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL}) \\
 &= (0,376 \times 55,69) + (0,405 \times 73,33) + (0,219 \times 23,86) \\
 &= 55,87
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 yang mencapai 60,18 atau 105,78% dari target menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup secara umum berada pada jalur yang positif. Realisasi yang melampaui target mengindikasikan adanya konsistensi kebijakan, penguatan pengawasan, serta sinergi antar sektor dalam menjaga kualitas lingkungan di tengah dinamika pembangunan wilayah yang terus berkembang.

Secara tren, peningkatan nilai IKLH dari tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan adanya perbaikan bertahap dalam kualitas lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa program pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, serta upaya rehabilitasi dan konservasi telah memberikan dampak

yang terukur. Kinerja ini juga menunjukkan bahwa aspek perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan mulai semakin terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah.

Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu dilihat dalam konteks tantangan jangka panjang. Pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan terbangun, peningkatan aktivitas industri, dan tekanan terhadap sumber daya alam berpotensi memengaruhi stabilitas kualitas lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan melampaui target tidak boleh dimaknai sebagai kondisi akhir, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan preventif, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan demikian, capaian IKLH Tahun 2025 dapat dinilai sebagai indikator kinerja yang baik dan progresif, namun tetap memerlukan penguatan strategi pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang, adaptif terhadap dinamika pembangunan, dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Faktor keberhasilan Capaian Target

1. Penguatan kebijakan industri hijau melalui penyusunan dan sosialisasi pedoman penghargaan industri ramah lingkungan, yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah dan pengendalian emisi.
2. Intensifikasi pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan (air dan udara) secara berkala, sehingga pengendalian pencemaran dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan kolektif seperti aksi bersih lingkungan dan kampanye peduli sampah yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah.
4. Penguatan program pengelolaan sampah terintegrasi, termasuk pengembangan bank sampah, aksi bersih pantai, dan edukasi pengurangan sampah dari sumbernya.
5. Kegiatan rehabilitasi dan penanaman pohon/mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga tutupan lahan dan menekan laju degradasi lingkungan.

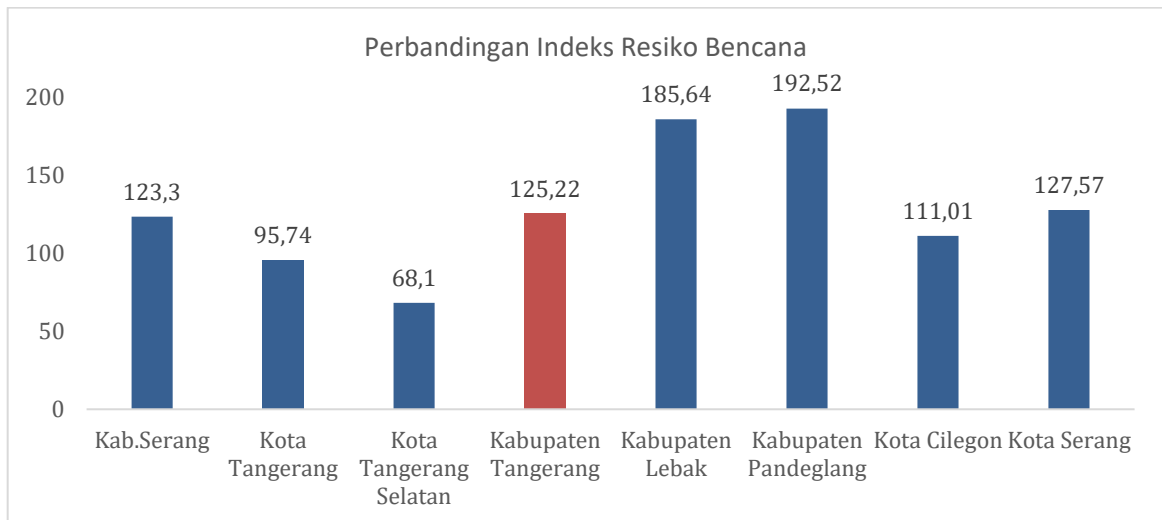
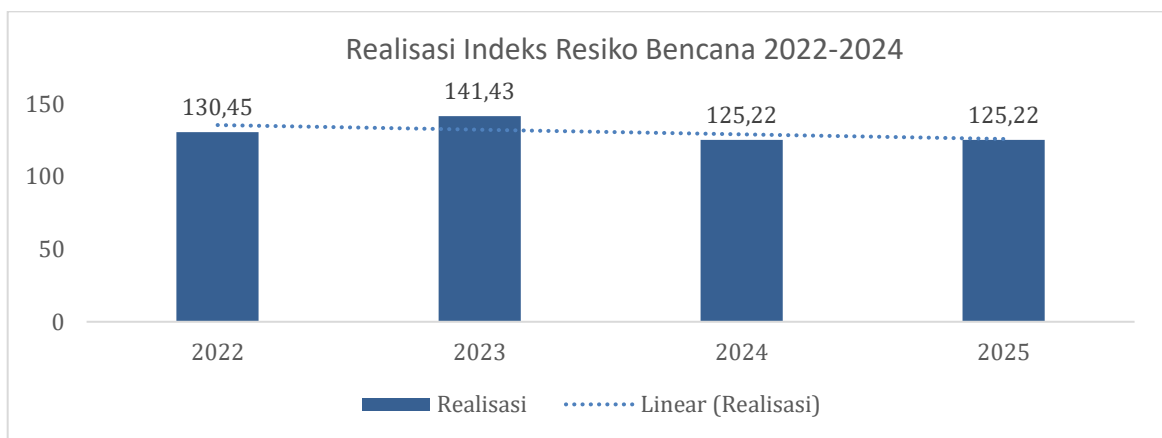
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Konsistensi pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Memperkuat pengendalian pencemaran air melalui peningkatan pengawasan limbah industri dan domestik, optimalisasi IPAL komunal, serta penertiban pembuangan limbah ke badan air.
2. Meningkatkan pengendalian kualitas udara dengan pengetatan uji emisi kendaraan, pengawasan emisi industri, serta mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.
3. Melakukan percepatan rehabilitasi dan perlindungan tutupan lahan melalui penambahan ruang terbuka hijau, penanaman pohon, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.
4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, termasuk penguatan bank sampah, pengurangan sampah dari sumber, serta peningkatan kapasitas pengolahan di tingkat lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan cakupan pemantauan lingkungan berbasis data, termasuk integrasi sistem pelaporan dan verifikasi agar pengambilan kebijakan lebih akurat dan responsif.
6. Memperluas edukasi dan partisipasi masyarakat dalam gerakan peduli lingkungan agar perubahan perilaku menjadi faktor pendukung keberlanjutan kualitas lingkungan.
7. Mengintegrasikan kebijakan perlindungan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan investasi daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan.

INDEKS RESIKO BENCANA

Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir RPD 2026
115	125,22	91,84%	115



Sumber: Website Inarisk BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2025, target IRBI ditetapkan sebesar 115, namun realisasi menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 125,22 (*sumber, buku IRBI Tahun 2025, BNPB*). Hal ini mengindikasikan bahwa risiko bencana yang terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, yang dapat disebabkan oleh peningkatan kejadian bencana, tingkat kerentanan masyarakat, atau belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Adapun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Meskipun demikian, capaian kinerja yang tercatat sebesar 95,8 menunjukkan bahwa berbagai langkah penanggulangan dan pengurangan risiko telah dilakukan secara efektif. Namun, untuk memastikan penurunan risiko yang lebih signifikan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026

sebesar 115. Target ini mencerminkan komitmen dalam menurunkan tingkat risiko bencana melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas mitigasi, penguatan infrastruktur tahan bencana, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Faktor ketidaktercapaian Capaian Target

1. Peningkatan Ancaman Bencana

- Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan kejadian bencana, seperti banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan.
- Dampak perubahan iklim memperburuk kondisi cuaca ekstrem dan mengintensifkan frekuensi serta skala bencana.

2. Peningkatan Kerentanan Masyarakat

- Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.
- Tata ruang yang belum optimal dalam mengakomodasi prinsip mitigasi bencana, seperti alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman dan industri.
- Ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar, seperti sistem drainase, air bersih, dan layanan kesehatan, yang memperbesar dampak bencana.

3. Kurangnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat

- Program peningkatan kapasitas masyarakat, seperti edukasi mitigasi, simulasi bencana, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), belum berjalan optimal.
- Keterbatasan sumber daya dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, sehingga respon terhadap kejadian bencana masih rendah.
- Kesiapan kelembagaan daerah dalam penanggulangan bencana masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek koordinasi dan pengelolaan data kebencanaan.

4. Keterbatasan Anggaran untuk Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana.

- Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengurangan kerentanan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk infrastruktur, edukasi, serta kesiapsiagaan.
- Dana yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk penanganan darurat bencana, dibandingkan dengan investasi pada upaya pencegahan dan mitigasi jangka panjang.

- Keterbatasan sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pendanaan serta implementasi program mitigasi bencana.

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat resiko bencana Kabupaten Tangerang, dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana

- Memperluas program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dengan edukasi, pelatihan, dan simulasi berkala.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi lokal dalam sistem peringatan dini dan respons cepat bencana.
- Menyediakan media informasi kebencanaan berbasis digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peringatan dini.

Optimalisasi Tata Kelola dan Infrastruktur Pengurangan Risiko

- Memperbaiki sistem drainase, tanggul, dan kawasan resapan air untuk mengurangi risiko banjir.
- Menyusun regulasi yang lebih ketat terkait pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana.
- Meningkatkan sinergi dengan lembaga terkait seperti BPBD, BNPB, BMKG, dan akademisi dalam perencanaan mitigasi berbasis data dan kajian risiko.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang telah dicapai

Tabel 2.9
Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,70	0,66	94,29	924.109.136.395,00	894.391.504.211,00	96,78	-
2	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,860	0,856	99,53	657.352.245.179,00	648.176.862.502,00	98,60	-
3	Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks pembangunan Pemuda	53	58	108,49	36.957.775.420,00	36.433.684.140,00	98,58	9
4	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	64	69,37	108,39	5.223.508.510,00	5.121.108.736,00	98,04	10
5	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	1,20	95,83	28.425.872.653,00	28.131.744.461,00	98,97	-
6	Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1	1	100,00	25.681.788.840,00	25.233.252.508,00	98,25	2
7	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	3,48	11,61	333,62	85.822.141.521,00	81.679.850.052,00	95,17	73
		Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	5,12	43,20	843,74				

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
		Persentase Daya saing produk unggulan lokal	26,52	26,52	100				
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3,57	4,83	135,29				
8	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks desa membangun	0,7853	0,7853	100,0	44.457.481.816,00	41.303.488.574,00	92,91	7
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	78,00	79,39	101,78	9.523.414.830,00	9.072.110.547,00	95,26	6
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,85	66,26	97,66	21.740.759.590,00	20.382.290.415,00	93,75	-
11	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang berdaya	1,69	1,69	100,00	62.126.040.154,00	61.362.158.603,00	98,77	1
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Sakip	78	77,87	100	5.728.095.791.260,32	5.495.239.964.300,00	95,93	9
		Nilai indeks kemandirian fiskal	0,525	0,605	115,24				
		Opini BPK	WTP	WTP	100				
		Indeks profesionalitas ASN	75	83,65	111,53				
		Maturitas SPIP terintegrasi	3	2,60	86,67				
		Indeks SPBE	3,19	3,91	122,57				
		Indeks Pelayanan publik	4,3	4,22	98,14				
13	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Presentase infrastruktur dalam kondisi baik	95	97	102,11	1.350.572.953.238,68	1.299.644.091.559,00	96,23	-
		Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW	55	57,72	104,95				

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	9 = (7*6%-8)/(7*6%)*100
		Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak	0,9442	0,9473	100,33				
		Rasio konektivitas kabupaten	0,83	0,60	72				
14	Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,89	60,18	105,78	167.139.492.328,00	155.952.791.641,00	93,31	-
		Indeks resiko bencana (IRBI)	115	125,22	91,84				

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Target Kinerja

Pada aspek anggaran secara umum program yang dilaksanakan untuk mencapai 14 sasaran strategis pada tahun 2025 telah cukup baik. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.408.515.776,00	8.735.774.844,00	92,85
2	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	135.128.174.640,00	125.972.194.670,00	93,22
3	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN / KOTA	84.960.378.138,00	80.097.599.109,00	94,28
4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	43.831.968.850,00	33.237.508.480,00	75,83
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.005.920.400,00	2.885.782.750,00	96
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	42.312.200.692,50	42.305.487.000,00	99,98
7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.263.265.900,00	5.054.229.856,00	96,03
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.735.441.650,00	13.594.769.160,00	98,98
9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.319.346.070,00	5.228.640.320,00	98,29
10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.910.481.040,00	13.808.160.827,00	92,61
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.134.289.460,00	1.129.497.660,00	99,58
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	865.999.100,00	863.316.300,00	99,69
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.078.630,00	28.755.950,00	98,89
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	796.912.700,00	787.881.500,00	98,87

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	16.233.167.200,00	16.205.418.986,00	99,83
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.767.747.840,00	2.460.311.120,00	88,89
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	32.508.122.990,00	30.030.672.660,00	92,38
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.722.413.117,00	9.675.284.087,00	99,52
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.421.324.748,70	86.220.502.168,00	98,63
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.337.130.850,00	5.328.679.410,00	99,84
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.835.965.390,00	5.631.970.661,00	96,5
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.653.947.290,00	3.599.409.790,00	98,51
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	306.969.000,00	278.030.880,00	90,57
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	908.372.000,00	896.560.000,00	98,7
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.781.128.091,00	10.573.902.915,00	98,08
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.712.591.910,00	1.685.481.028,00	98,42
27	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	911.567.200,00	894.549.600,00	98,13
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	634.058.703.362,00	625.317.285.365,00	98,62

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
29	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	128.135.088.733,00	104.751.094.136,00	81,75
30	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.278.314.000,00	1.246.232.259,00	97,49
31	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.104.600.940,00	1.039.124.170,00	94,07
32	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	274.043.500,00	267.269.548,00	97,53
33	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.831.400,00	1.471.400,00	16,66
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.172.723.550,00	2.129.352.339,00	98
35	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.472.598.000,00	27.925.186.365,00	94,75
36	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	377.350.576.234,00	354.126.278.535,00	93,85
37	PROGRAM PENATAAN DESA	1.888.039.840,00	1.884.985.850,00	99,84
38	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	123.760.446.490,00	119.411.762.766,00	96,49
39	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	174.500.000,00	174.500.000,00	100
40	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.360.880.000,00	8.240.773.882,00	98,56
41	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	8.604.136.550,00	8.596.457.175,00	99,91
42	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	594.802.730,00	593.661.890,00	99,81
43	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	242.836.920,00	241.846.920,00	99,59
44	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.897.284.100,00	3.885.393.300,00	99,69
45	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.738.517.120,00	3.602.828.488,00	96,37
46	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.809.877.260,00	1.798.247.060,00	99,36

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
47	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	130.451.700,00	127.451.700,00	97,7
48	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	134.489.500,00	125.242.250,00	93,12
49	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	43.639.498.780,00	43.212.963.329,00	99,02
50	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	995.310.600,00	984.435.310,00	98,91
51	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.802.671.725,00	13.612.201.236,00	91,96
52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.480.157.541,50	18.922.094.703,00	97,14
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.701.981.639,80	60.541.743.014,00	96,55
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	122.193.399.230,00	120.317.460.661,00	98,46
55	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	484.387.700,00	484.387.650,00	100
56	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	813.280.360,00	807.331.360,00	99,27
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.596.770.400,00	8.502.490.409,00	98,9
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20.595.268.361,00	20.093.036.083,00	97,56
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.022.970.481.207,00	968.782.717.811,00	94,7
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.373.959.350,00	10.963.468.810,00	96,39
61	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	921.170.951.605,00	891.667.854.793,00	96,8
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.523.629.846,00	10.247.348.946,00	97,37
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.763.550.030,00	7.465.027.411,00	96,15
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	127.720.430.829,00	117.497.081.003,00	92
65	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	69.180.000,00	68.866.500,00	99,55

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
66	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.339.800,00	40.339.800,00	100
67	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	950.496.200,00	866.965.900,00	91,21
68	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	137.993.446.653,00	131.853.392.731,00	95,55
69	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.529.167.800,00	1.477.056.100,00	96,59
70	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	401.622.790,00	399.318.400,00	99,43
71	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	606.202.467,00	579.952.628,00	95,67
72	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	792.034.100,00	790.409.100,00	99,79
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	30.337.124.620,00	29.956.853.500,00	98,75
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.620.650.800,00	6.476.830.640,00	97,83
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.899.556.560,00	1.848.959.200,00	97,34
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	385.548.000,00	224.363.000,00	58,19
77	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.051.672.000,00	1.048.946.700,00	99,74
78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.341.032.000,00	5.676.545.635,00	89,52
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.143.688.600,00	1.124.991.700,00	98,37
80	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.704.648.836,00	9.975.650.653,00	93,19
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	95.227.740,00	90.290.240,00	94,82
82	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	115.190.600,00	109.790.600,00	95,31
83	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	2.363.639.310,00	2.269.894.048,00	96,03

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	302.000.680,00	301.987.360,00	99,996
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.488.295.748,00	4.326.744.771,00	96,4
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.411.577.362,00	1.352.422.560,00	95,81
87	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	245.242.150,00	220.143.500,00	89,77
88	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	289.224.400,00	288.470.800,00	99,74
89	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	769.020.000,00	755.892.395,00	98,29
90	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.059.888.912,00	4.960.389.390,00	98,03
91	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.189.805.420,00	7.079.357.799,00	98,46
92	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	139.964.800,00	139.964.800,00	100
93	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	348.070.500,00	344.972.309,00	99,11
94	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.755.156.590,00	6.430.688.027,00	95,2
95	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.658.278.500,00	12.281.761.500,00	97,03
96	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	652.803.210,00	652.055.220,00	99,89
97	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.487.452.900,00	6.324.488.847,00	97,49
98	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	3.191.841.020,00	3.049.931.562,00	95,55

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
99	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	612.065.120,00	611.077.000,00	99,84
100	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.107.404.800,00	7.095.032.800,00	99,83
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	124.637.528.460,00	123.267.902.504,00	98,9
102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	39.552.000,00	39.552.000,00	100
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.864.630.985.423,58	3.729.453.233.323,00	96,5
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.309.376.000,00	5.898.697.597,00	93,49
105	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17.718.415.380,00	16.324.274.732,00	92,13
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	350.416.345.484,88	342.568.229.292,00	97,76
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	78.651.921.103,00	75.590.709.262,00	96,11
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	419.355.669.461,04	416.032.188.568,00	99,21
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.786.585.380,00	4.633.482.130,00	96,8
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.837.508.400,00	6.769.979.497,00	99,01
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8.143.592.173,00	7.377.136.236,00	90,59

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.117.626.800,00	1.108.783.355,00	99,21
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.327.614.680,00	8.264.705.101,00	99,24
114	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.975.989.980,00	2.923.631.183,00	98,24
115	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.066.493.600,00	2.916.062.325,00	95,09
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	940.960.950,00	929.308.890,00	98,76
117	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.356.633.600,00	2.274.320.500,00	96,51
118	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	56.762.400,00	56.762.400,00	100
119	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.879.983.019,00	5.718.877.120,00	97,26
120	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	52.947.463.920,00	52.309.666.920,00	98,8
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	429.180.480,00	261.569.080,00	60,95
122	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	847.072.700,00	823.373.550,00	97,2
123	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.002.586.430,00	953.521.726,00	95,11
124	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.322.596.200,00	3.983.314.700,00	92,15
125	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	341.600.580,00	338.135.580,00	98,99
126	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.554.299.984,00	2.476.108.614,00	96,94
127	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	912.850.200,00	902.531.550,00	98,87
128	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.127.827.400,00	2.123.033.914,00	99,77
129	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	904.955.280,00	849.659.300,00	93,89

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	JUMLAH ANGGARAN	9.495.608.430.263,00	9.135.062.008.322,00	96,20

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan, baik berupa tugas pembantuan yang diberikan maupun tugas pembantuan yang diterima.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan dasar urusan pendidikan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2025
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	2025
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2025

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.51%	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					98.87%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) <i>Tidak Masuk ke dalam Perhitungan</i>	Persentase	68.03	68.03	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	75069	75069	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.87%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.33%	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	Persentase	49.06	48.64	0.42	99.14%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	mendapatkan minimal akreditasi B						
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	60.25	53.93	6.32	89.51%	
2 .	Pendidikan Dasar					<u>99.67%</u>	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD <i>Tidak Masuk ke dalam Perhitungan</i>	Persentase	99.68	99.68	0	100.00%	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP <i>Tidak Masuk ke dalam Perhitungan</i>	Persentase	98.22	98.22	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	515703	515703	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.67%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.37%	
	SD (2025)					98.61%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	58.67	64.89	-6.22	100.00%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	53.82	64.03	-10.21	100.00%	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.53	72.62	0.91	98.76%	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68.7	67.7	1	98.54%	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.18	56.67	2.51	95.76%	
	SMP (2025)					98.12%	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	67.95	66.93	1.02	98.50%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	62.01	65.35	-3.34	100.00%	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.2	66.7	1.5	97.80%	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.63	66.62	1.01	98.51%	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.14	54.74	2.4	95.80%	
3 .	Pendidikan Kesenjangan					<u>100.00%</u>	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN <i>Tidak Masuk ke dalam Perhitungan</i>	Persentase	14.19	14.19	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16004	16004	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM)					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	14.19	14.19	0	100.00%	

Sumber : Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2026

4.1.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	APBD KAB.TANGERANG	9.525.608.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2.185.432.039.821	22,94%		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.056.448.260.743		11,09%	48,34%
	APBD	1.056.448.260.743			
	A. ABBD MURNI	566.099.069.379			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	1.671.571.364			
	D. APBD DAK NON FISIK	488.677.620			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD				
	A. CSR	0			
	APBN	0			
	B. APBN - DEKOSENTRASI	0			
	C. APBN -TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber : Buku Penyusunan Laporan SPM Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2026

4.1.5 Dukungan Personil

Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terdiri atas jabatan struktural dan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pegawai struktural terdiri dari ASN dan Non ASN. Pegawai struktural terdiri atas pegawai Eselon II, III, IV dan Non Eselon. Pegawai fungsional dalam hal ini adalah pengawas dan penilik.

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal. Tugas Pokok penilik adalah melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pegawai Dinas Pendidikan lainnya adalah kelompok jabatan pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan (non guru) baik ASN maupun Non ASN yang tersebar di seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Dukungan Personil Urusan Pendidikan

No	Jabatan	Analisis Beban Kerja	Tersedia	Proyeksi Pegawai Pensiun	Kebutuhan Pegawai
1	Kepala Dinas	1	1	0	0
2	Sekretaris Dinas	1	1	0	0
3	Kepala Bidang	4	3	1	2
4	Kepala Sub Bagian	1	1	0	0
5	Kepala Seksi	8	8	1	1
6	Jabatan Fungsional Lainnya	743	92	26	625
7	Jabatan Fungsional Guru	11.605	3.992	476	7.137
8	Pelaksana	1.135	68	2	1.065
9	PPPK	4.708	4.708	0	0
	JUMLAH	18.206	8.874	506	8.830

Sumber : Buku Penyusunan Laporan SPM Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan

No.	Permasalahan Penerapan SPM	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA - Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data yang sesuai standar - Belum adanya koordinasi lebih lanjut terhadap pemerintahan terkecil seperti di tingkat desa/kelurahan - Kesulitan mendapatkan data dukung yang bersumber dari data sektoral seperti Provinsi, BPS dan Kementerian Agama - Belum validnya data yang terintegrasi - Adanya perbedaan pemahaman tentang SPM antara Permendagri No. 59 Tahun 2021 dengan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 sehingga terdapat perbedaan dalam pengumpulan data	Melakukan kerja sama/MoU terkait pemenuhan data mulai dari level kelurahan, provinsi dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga memudahkan dalam memperoleh data sesuai standar Mengkomunikasikan kepada kementerian terkait
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis data dan kesenjangan yang meliputi data sarana prasarana, data pendidik dan tenaga kependidikan serta data kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah - Daftar anak usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan diperlukan agar Pemda mengetahui jumlah anak dan alasan mengapa anak tidak sekolah - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan - Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku dan Pemda perlu memastikan kecukupan tersebut - Belum tersedianya data yang valid mengenai jumlah anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak	Merekrut atau menugaskan SDM dalam hal ini tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam melakukan analisis data meliputi sarana dan prasarana, data pendidik dan tenaga kependidikan serta data kebutuhan sekolah lainnya Melakukan kerja sama/MoU terkait pemenuhan data mulai dari level kelurahan, provinsi dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga memudahkan dalam memperoleh data sesuai standar Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
		mendapatkan layanan pendidikan dan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan dari Pemda sebagai calon peserta pendidikan kesetaraan f. Penentuan indikator pengukuran kebutuhan data SPM berbeda antara Kemendagri dengan Kemendikbud	Melakukan kerja sama/MoU terkait pemenuhan data mulai dari level kelurahan, provinsi dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga memudahkan dalam memperoleh data sesuai standar Mengkomunikasikan kepada kementerian terkait
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	a. Alokasi anggaran yang tersedia saat ini sebagian besar adalah untuk pemenuhan gaji dan tunjangan, baik PNS maupun non PNS (termasuk di dalamnya guru dan tenaga kependidikan) sehingga memiliki keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan dasar b. Kemampuan SDM dalam menganalisis rapor pendidikan ke dalam program kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SPM masih terbatas	Mengupayakan sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD, yaitu dari DAK, Bantuan Keuangan dan CSR Melakukan pelatihan dan pembelajaran secara berkelanjutan
4.	PELAKSANAAN	Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan	Menentukan batas waktu pelaksanaan kegiatan

Sumber : Buku Penyusunan Laporan SPM Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2026

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan urusan kesehatan di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Pencapaian

Tabel 4.6
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	2025
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2025
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2025

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.7
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.94%	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	65077	65077	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	6508	6508	0	100.00%	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	11713860	11713860	0	100.00%	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	61571	61571	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	61450	61450	0	100.00%	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	46850	46850	0	100.00%	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	10000	10000	0	100.00%	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	61571	61571	0	100.00%	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	26963	26963	0	100.00%	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	26104	26104	0	100.00%	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	112	112	0	100.00%	
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	1025	1025	0	100.00%	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	243	243	0	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	1041	1041	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1332	1332	0	100.00%	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	257	257	0	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	102	102	0	100.00%	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	62119	62119	0	100.00%	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	62119	62119	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM)					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
	1 . Formulir partograph	Formulir	36953	36953	0	100.00%	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	26963	26963	0	100.00%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	26104	26104	0	100.00%	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	103	103	0	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	243	243	0	100.00%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1041	1041	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1332	1332	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	257	257	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	102	102	0	100.00%	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99.62%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	59161	59161	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.62%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.09%	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	59161	43377	15784	73.32%	
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	15948	15948	0	100.00%	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	55500	55500	0	100.00%	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	30970	30970	0	100.00%	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	177485	177485	0	100.00%	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	26104	26104	0	100.00%	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	44	44	0	100.00%	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	243	243	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1041	1041	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1332	1332	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	257	257	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	104	104	0	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00%	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	11722	11722	0	100.00%	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					99.73%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	243841	243841	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.73%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.65%	
	1 . Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau	Formulir	186449	186449	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	instrumen standar lain yang berlaku						
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	194397	194397	0	100.00%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	26104	26104	0	100.00%	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	14000	14000	0	100.00%	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	180000	180000	0	100.00%	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	50902	50902	0	100.00%	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	201754	201754	0	100.00%	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	100568	71965	28603	71.56%	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	150852	150852	0	100.00%	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	50284	50284	0	100.00%	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	51030	51030	0	100.00%	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	51030	51030	0	100.00%	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	172114	172114	0	100.00%	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	44	44	0	100.00%	
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	20160	20160	0	100.00%	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	243	243	0	100.00%	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1041	1041	0	100.00%	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1332	1332	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	104	104	0	100.00%	
	20 . Guru PAUD	Orang	2594	2594	0	100.00%	
	21 . Kader kesehatan	Orang	11722	11722	0	100.00%	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					99.93%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	565940	565940	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.93%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.63%	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	111389	111389	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	111389	111389	0	100.00%	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	565940	565940	0	100.00%	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	2332	2332	0	100.00%	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	30	30	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	7389616	7389616	0	100.00%	
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	68	68	0	100.00%	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	42478	42478	0	100.00%	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	44	44	0	100.00%	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	256977	239914	17063	93.36%	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	243	243	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1041	1041	0	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1332	1332	0	100.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00%	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	257	257	0	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	104	104	0	100.00%	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	4740	4740	0	100.00%	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	11722	11722	0	100.00%	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	2328163	2328163	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	223	223	0	100.00%	
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	44	44	0	100.00%	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	287	287	0	100.00%	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	507	507	0	100.00%	
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	61	61	0	100.00%	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	2328163	2328163	0	100.00%	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	44	44	0	100.00%	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	18200	18200	0	100.00%	
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	44	44	0	100.00%	
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	44	44	0	100.00%	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	0	160	-160	100.00%	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	87	87	0	100.00%	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	73	73	0	100.00%	
	c. Vasektomi set	Unit	0	0	0	0.00%	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	44	44	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	6888	6888	0	100.00%	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	212	212	0	100.00%	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	812	812	0	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	329	329	0	100.00%	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	82	82	0	100.00%	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	58	58	0	100.00%	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1968	1968	0	100.00%	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	251306	251306	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	62	62	0	100.00%	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	44	44	0	100.00%	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	44	44	0	100.00%	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	59700	59700	0	100.00%	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	180900	180900	0	100.00%	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	6018	6018	0	100.00%	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	0	100.00%	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	243	243	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1041	1041	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1332	1332	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	102	102	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	104	104	0	100.00%	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	11722	11722	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	760275	760275	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	88	88	0	100.00%	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	760275	760275	0	100.00%	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	834	834	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	44	44	0	100.00%	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	77	77	0	100.00%	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	210	210	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	812	812	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	329	329	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	82	82	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	65	65	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	72	72	0	100.00%	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	48749	48749	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	48749	48749	0	100.00%	
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	575	575	0	100.00%	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	48749	48749	0	100.00%	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	44	44	0	100.00%	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	142	142	0	100.00%	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	209	209	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	802	802	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	329	329	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	58	58	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	90	90	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	92	92	0	100.00%	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	4498	4498	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	44	44	0	100.00%	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	4498	4498	0	100.00%	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	44	44	0	100.00%	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	44	44	0	100.00%	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	44	44	0	100.00%	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	77	77	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	29	29	0	100.00%	
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	3	3	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	11	11	0	100.00%	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	48578	48578	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	73	73	0	100.00%	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	607	607	0	100.00%	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	972	972	0	100.00%	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	Paket	97156	97156	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering						
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	38862	38862	0	100.00%	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	48578	48578	0	100.00%	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	73	73	0	100.00%	
	8 . Tuberkulin	Vial	485	485	0	100.00%	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	73	73	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	73	73	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	73	73	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	73	73	0	100.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	29	29	0	100.00%	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	44	44	0	100.00%	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	83065	83065	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	0	100.00%	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	83065	83065	0	100.00%	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	83065	83065	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	83065	83065	0	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	73	73	0	100.00%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	73	73	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	73	73	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	73	73	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0	100.00%	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	44	44	0	100.00%	

Sumber : Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2026

4.2.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.8
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	APBD KAB.TANGERANG	9.525.608.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	495.808.912.227	5,21%		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	35.878.346.470		0,38%	7,24%
	APBD	34.790.347.470			
	B. ABBD MURNI	14.695.367.270			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	20.094.980.200			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	D. CSR	0			
	APBN	1.087.999.000			
	E. APBN - DEKOSENTRASI	1.087.999.000			
	F. APBN -TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber : Buku Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, 2026

4.2.5 Dukungan Personil

Tabel 4.9
Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Status kepegawaian				
-	ASN	:	1.734	Orang
	Total		1.734	Orang
SDM Kesehatan				
-	Dokter	:	302	Orang
-	Bidan	:	889	Orang

-	Perawat	:	366	Orang
-	Tenaga Kefarmasian	:	141	Orang
-	Tenaga Gizi	:	89	Orang
-	Tenaga Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku	:	62	Orang
-	Tenaga Lainnya	:	1.261	Orang
-	Tenaga Kesehatan Masyarakat	:	25	Orang
-	Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kesehatan Jiwa	:	19	Orang
-	Tenaga Lain Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa	:	20	Orang
-	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	:	97	Orang
	Total	:	2.010	Orang

Sumber : *Buku Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, 2026*

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.10

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
1.	PERMASALAHAN LINTAS LAYANAN DASAR	a. Pergantian penanggung jawab (Pj) program di Puskesmas b. Koordinasi lintas program di Puskesmas belum berjalan optimal c. Dukungan lintas program Puskesmas dalam peningkatan layanan masih terbatas d. Dukungan lintas sektor dalam perluasan sasaran pelayanan belum optimal	Pemberian on the job training kepada Pj program baru Monitoring, evaluasi, dan pembinaan langsung ke Puskesmas Pelaksanaan pertemuan advokasi lintas program dan lintas sektor
2.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	a. Beban kerja bidan desa relatif tinggi karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan b. Alokasi vaksin Td belum memenuhi jumlah kebutuhan yang diajukan	Penerapan skala prioritas terhadap beban kerja bidan desa Koordinasi lanjutan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
3.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN, BAYI BARU LAHIR,	Beban kerja bidan desa relatif tinggi karena banyaknya	Penerapan skala prioritas terhadap beban kerja bidan desa

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
	BALITA, USIA PENDIDIKAN DASAR, USIA LANJUT	kegiatan yang harus dilaksanakan	
4.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Alokasi vaksin IPV belum memenuhi jumlah kebutuhan yang diajukan	Koordinasi lanjutan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
5.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR	a. Aplikasi Satu Sehat CKG terkadang mengalami kendala akses b. Alokasi vaksin BIAS belum sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diajukan	Pelaksanaan input data Satu Sehat CKG langsung di Puskesmas Koordinasi lanjutan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
6.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF	a. Pelayanan usia produktif merupakan layanan lintas prigram yang memerlukan koordinasi intensif b. Alokasi vaksin Td kurang dari jumlah permintaan yang diajukan	Koordinasi berkala antar program pengampu indikator SPM Koordinasi lanjutan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS	Prasarana penunjang pemeriksaan laboratorium belum seluruhnya tersedia alat otomatis	Pembinaan dan mendorong Puskesmas dalam penyediaan alat
8.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN JIWA (ODGJ BERAT)	a. Kendala penginputan dan pelaporan pada aplikasi SIMKESWA b. Peran lintas sektor dalam proses evakuasi ODGJ berat masih terbatas	Monitoring dan evaluasi penginputan serta pelaporan Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait
9.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	a. Keterlambatan pelaporan akibat beban pencatatan dan pelaporan b. Prasarana dalam pengiriman sampel dahak	Monitoring berkala pencatatan dan pelaporan Pengajuan kerja sama (PKS) dengan jasa pengiriman
10.	PERMASALAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV	a. Beban pencatatan dan pelaporan di Puskesmas cukup tinggi b. Lokasi hotspot populasi kunci bersifat dinamis dan beralih ke transaksi daring	Monitoring rutin oleh Dinas Kesehatan dan koordinasi melalui WAG Peningkatan koordinasi dengan mitra penjangkauan dan pemutakhiran data pemetaan

Sumber : Buku Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, 2026

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan serta melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum pada Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2025
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2025

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.12
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	7940	14540	-6600	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7940	14540	-6600	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM)					100.00%	

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
	JARINGAN PERPIPAAN					100.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	635	635	0	100.00%	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	635	635	0	100.00%	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1350	3000	-1,650	100.00%	
Kualitas SPAM							

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	1350	3000	-1,650	100.00%	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					<u>100.00%</u>	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	9908	19460	-9552	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9908	19460	-9552	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	KUANTITAS SPALD					100.00%	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	2477	4865	-2388	100.00%	
	KUALITAS SPALD					100.00%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	100	150	-50	100.00%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun	Rumah Tangga	1000	3338	-2,338	100.00%	

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota						
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1377	1377	0	100.00%	

Sumber : Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2026

4.3.4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. TANGERANG	9.525.608.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	454.048.678.738	4,77%		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	141.770.764.271		1,49%	31,22%
	APBD	141.770.764.271			
	A. APBD MURNI	141.770.764.271			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK				
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD				
	CSR	0			
	APBN	0			
	APBN – DEKOSENTRASI	0			
	APBN –TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum 2025, 2026

4.3.5 Dukungan Personil

Tabel 4.14
Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS)	30 Orang
2.	PPPK	61 Orang
3.	Non PNS	45 Orang
	Total	136 Orang

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum 2025, 2026

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.15
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	a. Data sasaran penerima layanan air minum belum sinkron b. Data sasaran penerima layanan air limbah belum sinkron	Melakukan sinkronisasi data dengan semua penyedia layanan air minum (Perumdam, Aetra dan mitra lainnya) tentang jaringan perpipaan yang sudah sesuai dengan form Permendagri terkait SPM Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Kesehatan terkait kebutuhan data air limbah (BABS)
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Data yang tersedia belum ter-update, masih memerlukan perubahan jumlah data penduduk (menyesuaikan dengan	Secara berkala melakukan updating data. Untuk data dari Dukcapil bisa diupdate setiap 6 bulan setelah rilis Data Konsolidasi Bersih

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
		data terbaru milik BPS/DUKCAPIL). Data milik Perumdam atau pihak ketiga lainnya belum sesuai dengan form SPM, perlu ada penyesuaian data untuk mendapat hasil hitungan yang akurat.	
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Dalam memenuhi target capaian kabupaten, anggaran yang dimiliki dinas masih jauh dari kata cukup untuk dapat berdiri sendiri dalam pemenuhan target yang ada.	a. Memberikan prioritas penganggaran terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung penerapan SPM b. Melakukan optimalisasi sumber pembiayaan yang lain, seperti TSLP
4.	PELAKSANAAN	Dalam pelaksanaannya, terutama kegiatan Bukan Jaringan Perpipaan milik dinas kesulitan dalam mencari lahan untuk pembangunan. Hal ini kerap kali menjadi kendala dikarenakan anggaran yang ada belum termasuk penggantian lahan yang dipakai dalam proses kegiatan.	Melakukan perhitungan kebutuhan lahan secara cermat disesuaikan dengan target sasaran penerima layanan

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum 2025, 2026

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan urusan perumahan rakyat di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan serta melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat pada Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

4.4.2 Target Pencapaian

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2025
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2025

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.17
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%		
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%		
	Bencana Meliputi :							
	a) Letusan gunung berapi;							
	b) Gempa bumi;							
	c) Tanah longsor;							
	d) Gelombang pasang;							
	e) Banjir bandang; dan/atau							
	f) Bencana lainnya.							
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat							
	Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan <u>3603-20260114104018SK Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah - 23052025 BU ELMY.pdf</u>							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%		
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40	40	0	100.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%		
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10	10	0	100.00%		
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%		
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%		
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%		
2 .	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					<u>100.00%</u>		
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi :							
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;							
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;							
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;							
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau							
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)							
	Ada Relokasi Program Pemerintah							

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Terjadi (Lampirkan SK Relokasi) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%		
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum			
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	42	42	0	100.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%		
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	162	162	0	100.00%		
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	60	60	0	100.00%		
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	60	60	0	100.00%		
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	42	42	0	100.00%		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)							
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	0	0.00%		

Sumber : Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2026

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. TANGERANG	9.525.609.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	454.048.678.738	4,77%		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	500,000,000		0,01%	0,11%
	APBD	500,000,000			
	ABBD MURNI	500,000,000			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD				
	CSR	0			
	APBN	0			
	APBN DEKOSENTRASI -	0			
	APBN -TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat 2025, 2026

4.4.5 Dukungan Personil

Tabel 4.19
Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24 Orang
2.	PPPK	33 Orang
3.	Non PNS	-
Total		57 Orang

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat 2025, 2026

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.20
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	Terdapat data-data yang belum optimal ditampilkan, antara lain data kebencanaan, jumlah korban bencana, penyediaan SK Bencana, data sosial ekonomi, dll	Melakukan koordinasi secara intens dengan perangkat daerah/instansi lain, misal melakukan koordinasi dengan BPBD terkait data kebencanaan dan jumlah korban bencana, terutama penyediaan SK Bencana, koordinasi dengan BPS terkait data sosial dan ekonomi

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	a. Kurangnya data luasan valid dalam perhitungan kebutuhan SPM b. Membutuhkan data valid terutama rincian data spasial terdampak bencana	Melakukan updating data dan mulai mengembangkan sistem database yang komprehensif
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	a. Alokasi anggaran dan kegiatan/program yang belum sesuai dengan SPM Bidang Pera b. Perlu adanya perubahan/penambahan alokasi anggaran namun terbentur dengan RPJMD yang ada.	Mempedomani tagging program/kegiatan SPM Bidang Pera dan memberikan prioritas penganggarannya
4.	PELAKSANAAN		
5.	LAIN-LAIN	a. Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan kegiatan Rehabiltasi RTLH (rumah tidak layak huni) pada perumahan dan kawasan permukiman kumuh namun fokus Lokus tidak termasuk dalam SPM.	Memperhatikan tagging program/kegiatan yang mendukung SPM dan memberikan prioritas penganggarannya

No.	Permasalahan Penerapan SPM	Solusi
	b. Pemerintah Kabupaten Tangerang Melaksanakan kegiatan relokasi (ganti aset pada kegiatan pembangunan seperti jalan/sekolah) bukan termasuk fokus SPM.	

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat 2025, 2026

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengampu SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengampu SPM sub urusan bencana dan kebakaran.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan polisi pamong praja, mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengacu kepada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

Tabel 4.21
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	2025
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	2025
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	2025
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2025
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	2025

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.22
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM – TUNTAS PARIPURNA						100.00%	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	350	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	1710	1710	0	100.00%	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	19	19	0	100.00%	
	Data Dukung : 3603-20251120023202SOP Satpol PP Kab Tangerang.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	500	500	0	100.00%	
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00%	
	Data Dukung : 3603-20250325103431perencanaan.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Komadina Diupload.						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100.00%	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100.00%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN – TUNTAS PARIPURNA						100.00%	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	163283	163283	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00%	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	100.00%	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	91	91	0	100.00%	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	91	91	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00%	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	6	6	0	100.00%	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	111000	111000	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	0	100.00%	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	2	0	100.00%	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00%	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	100.00%	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	55	55	0	100.00%	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00%	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	56	56	0	100.00%	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00%	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	17	17	0	100.00%	
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	270	270	0	100.00%	
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00%	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	3	3	0	100.00%	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	14	14	0	100.00%	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	215	215	0	100.00%	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	0	100.00%	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	14	14	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00%	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00%	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	132	132	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	132	132	0	100.00%	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	132	132	0	100.00%	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	132	132	0	100.00%	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100.00%	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
Download SK Yang Telah Di Upload 3603-20251231114233Penetapan Status Tanggap Darurat.pdf							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	300	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	215	215	0	100.00%	
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	192	192	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	64	64	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	11	11	0	100.00%	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi	dokumen	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	korban (sesuai dengan kebutuhan)						
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	215	215	0	100.00%	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	215	215	0	100.00%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR – TUNTAS PARIPURNA						100.00%	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2400	2400	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	300	300	0	100.00%	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	4	4	0	100.00%	
	Data Dukung : 3603-20260102112346SOP Bidang PP 2025.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	741	741	0	100.00%	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	235	235	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	3	3	0	100.00%	
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	300	300	0	100.00%	

Sumber : Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2026

4.5.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.23

Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Sub Urusan Trantibum

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. TANGERANG	9.525.608.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	36.388.143.877	0,38%		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6.487.452.900		0,07%	17,83%
	APBD	6.487.452.900			
	A. APBD MURNI	6.487.452.900			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD				
	A. CSR	0			
	APBN	0			
	B. APBN - DEKOSENTRASI	0			
	C. APBN -TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025, 2026

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. TANGERANG	9.525.608.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH				
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	10.533.603.550		0,11%	
	APBD	10.533.603.550			
	A. APBD MURNI	10.533.603.550			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD				
	A. CSR	0			
	APBN	0			
	D. APBN - DEKOSENTRASI	0			
	E. APBN -TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2025, 2026

4.5.5 Dukungan Personil

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, ada beberapa indikator untuk menentukan jumlah kebutuhan Polisi Pamong Praja di tingkat Kabupaten Tangerang. Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu Kriteria Umum dan Kriteria Khusus.

Kriteria Umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. **Kriteria Khusus** terdiri dari klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik, dan kondisi geografis.

Untuk perhitungan kebutuhan jumlah personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.25
Perhitungan Kebutuhan Personil Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tangerang

URAIAN		NILAI	SKOR	JUMLAH
1		2	3	4
KRITERIA UMUM	a.jumlah penduduk	400	24	128
	b.luas wilayah	400	24	
	c.jumlah APBD	1000	40	
	d.rasio belanja aparatur	1000	40	
KRITERIA TEKNIS	a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah	700	105	635
	b. jumlah peraturan daerah	700	105	
	c. jumlah peraturan kepala daerah	1000	150	
	d. jumlah desa/kelurahan	1000	100	
	e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan	700	70	
	f. jumlah kecamatan	1000	50	
	g. aspek Karakteristik	700	35	

URAIAN		NILAI	SKOR	JUMLAH
1		2	3	4
	h. kondisi geografis	400	20	
	TOTAL			763

Berdasarkan skor, maka jumlah kebutuhan personil polisi pamong praja Kabupaten Tangerang adalah 351 s.d. 450 pegawai. Sedangkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, jumlah kebutuhan personil Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 351 pegawai. Saat ini ada sebanyak 280 pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 71 orang. Adapun rincian dari pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sebanyak 280 orang, terdiri dari:

PNS : 70 Orang
 PPPK : 210 Orang
 Jumlah : 280 Orang

b. Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan Pangkat dan Golongan

IV/c : 0 Orang
 IV/b : 2 Orang
 IV/a : 3 Orang
 III/d : 10 Orang
 III/c : 2 Orang
 III/b : 17 Orang
 III/a : 23 Orang
 II/d : 3 Orang
 II/c : 0 Orang
 II /b : 0 Orang
 II/a : 10 Orang
 PPPK : 210 Orang
 Jumlah : 280 Orang

c. Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2 : 12 Orang
 S1 : 69 Orang
 D-IV : 0 Orang
 D-III : 2 Orang
 SMA : 197 Orang
 SMP : 0 Orang

SD : 0 Orang
Jumlah : 280 Orang

Sub Urusan Kebencanaan dan Kebakaran

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sebanyak 307 orang, terdiri atas ASN (PNS dan PPPK Paruh Waktu) 176 Orang; ASN Paruh Waktu 120 orang dan Honorer 11 orang.

dimana Pasukan Damkar berjumlah 238 Orang dan Administrasi pendukung 69 Orang.

Jumlah relawan pemadam kebakaran (Redkar) sebnagak 170 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.26
Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	a. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan b. Masih kurangnya kualitas SDM di lapangan dalam mengumpulkan dan mengelola data secara akurat c. Dinamisnya sasaran pemenuhan pelayanan dasar sehingga tidak dapat menentukan angka yang pasti dalam perhitungan kebutuhan d. Kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat kurang	Melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait data kependudukan atau dapat berkoordinasi dengan instansi terkait (Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau RT/RW) Membuat usulan/bezeeting kepada BKPSDM terkait penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja) serta optimalisasi personil yang ada secara efektif dan efisien Melakukan sosialisasi, baik melalui tatap muka atau menggunakan media sosial untuk menginformasikan Perda/Perkada yang ada

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
		menyadari dampak penegakan Perda/Perkada e. Keterbatasan personil menmperlambat proses pengumpulan data saat pelaksanaan pemenuhan layanan dasar	Membuat usulan/bezeeting kepada BKPSDM terkait penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja) serta optimalisasi personil yang ada secara efektif dan efisien
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang masih kurang matang dan tepat sasaran untuk dapat mengakomodir semua kegiatan yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki untuk dapat menganalisis kebutuhan dan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang ahli.	Melakukan proses perencanaan secara matang, dengan melihat tagging kegiatan yang mendukung SPM serta melakukan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang masuk SPM
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program, kegiatan, dan Sub kegiatan SPM tidak dapat di akomodir.	Memperhatikan tagging kegiatan/sub kegiatan SPM dan memberikan prioritas penganggarnya
4.	PELAKSANAAN	1. Kurangnya pengetahuan SDM terhadap pentingnya SPM. 2. Sulitnya mendapatkan data by name by address	Melakukan kegiatan bimtek, sosialisasi, seminar, workshop yang diikuti oleh seluruh pegawai Satpol PP

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025, 2026

Tabel 4.27
Permasalahan dan Solusi Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(dilihat dari program'/kegiatan)

PROGRAM/ KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Perkembangan sosial masyarakat yang bersifat kritis, berani melawan aparat, berpikir praktis dan pelaksanaan penertiban/penegakan perda/perkada yang terkesan mengedepankan aksi secara arogan.	1. Melakukan penindakan/penertiban secara persuasif dan humanis dalam memecahkan masalah tentang gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	2. Kurangnya jumlah anggota satuan polisi pamong praja (belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja)	2. Usulan bezeeting formasi sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja)
	3. Adanya keraguan manakala harus melaksanakan tindakan represif Karena dapat berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).	3. Menyusun strategi (SOP) penanganan pelanggaran Perda dan/atau perkada yang lebih solutif dan bekerjasama dengan aparat keamanan (TNI/POLRI)
	4. Kurangnya sarana dan prasarana minimal (sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019)	4. Penyediaan sarana prasarana minimal (sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019)

PROGRAM/ KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5. Kurangnya kemampuan teknis sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS) dalam penegakan perda/perkada.	5. Melakukan Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis PPNS dan kompetensi lainnya yang menunjang dalam pelaksanaan penegakan perda/perkada
	6. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pengusaha terhadap Peraturan Daerah sehingga memicu permasalahan sosial di masyarakat.	6. Meningkatkan upaya preventif, pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pengusaha tentang implementasi Perda/Perkada di Kabupaten Tangerang.

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025, 2026

Tabel 4.28
Permasalahan dan Solusi Urusan Bencana dan Kebakaran

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	Terdapat kesulitan dalam memperoleh data penerima layanan pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran, maupun data korban bencana dan kebakaran secara menyeluruh, efektif dan efisien Masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM lapangan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data secara akurat	Koordinasi yang efektif antara Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan petugas lapangan dalam penyampaian dan pelaporan kejadian Melaksanakan diklat bagi pegawai guna meningkatkan kompetensi dalam pengolahan data
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	Sasaran pemenuhan pelayanan dasar yang bersifat dinamis menyebabkan belum dapat ditetapkannya angka pasti dalam perhitungan kebutuhan Kebutuhan pembangunan pos di setiap kecamatan	Melaksanakan analisis dan proyeksi guna mengukur perkiraan kebutuhan anggaran secara lebih terencana

No.	Permasalahan Penerapan SPM		Solusi
			Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Perencanaan program dan kebutuhan anggaran belum optimal dalam mendukung pemenuhan SPM. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan data untuk analisi kebutuhan serta belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran Masih terdapat kesulitan dalam melakukan pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana Minimnya anggaran yang disetujui oleh daerah untuk dapat melakukan pengadaan mobil damkar dan sarana prasarana lain yang menunjang untuk pemenuhan SPM sub urusan kebakaran dengan response time 15 menit	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas bidang guna Menyusun perencanaan kebutuhan yang akurat, tepat guna dan tepat sasaran Meningkatkan kualitas data seta kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisi data kebencanaan Mengusulkan peningkatan pagu anggaran SKPD
4.	PELAKSANAAN	Belum optimalnya komunikasi antar Lembaga baik saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan komunikasi antar lembaga

Sumber : Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2025, 2026

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan urusan sosial di Kabupaten Tangerang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar di bidang urusan sosial pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

4.6.2 Target Pencapaian

Tabel 4.29
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosia di luar panti	100	2025
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	2025
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	2025
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dil luarpanti	100	2025
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	2025

4.6.2 Realisasi

Tabel 4.30
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.89%	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	203	203	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	203	203	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	203	203	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	68	68	0	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	10	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0	100.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	25	25	0	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	40	40	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100.00%	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00%	
	13 . Layanan rujukan	Orang	32	32	0	100.00%	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMAYANG HARUS DILAYANI () :	Orang	310	310	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	310	310	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	310	310	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	125	125	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	125	125	0	100.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	25	25	0	100.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	35	35	0	100.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3	3	0	100.00%	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100.00%	
	12 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00%	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					<u>100.00%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	355	355	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dilayani / Dipenuhi				
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	355	355	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	355	355	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	125	125	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	125	125	0	100.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	60	60	0	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	15	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0	100.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	30	30	0	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	4	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran	Orang	10	10	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	keluarga/Bukti keberadaan keluarga						
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100.00%	
	13 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100.00%	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					<u>99.47%</u>	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	245	245	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.47%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.37%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	245	245	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	115	115	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	140	102	38	72.86%	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	10	10	0	100.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	100	100	0	100.00%	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	180	176	4	97.78%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	180	176	4	97.78%	
	12 . Layanan rujukan	Orang	2	2	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	3043	3043	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	3043	3043	0	100.00%	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	650	650	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	4	4	0	100.00%	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	65	65	0	100.00%	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	65	65	0	100.00%	

Sumber : Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2026

4.6.3 Alokasi Anggaran

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. TANGERANG	9.525.608.430.263			
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	76.166.823.382	0,80%		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3.380.799.309		0,04%	4,44%
	APBD	3.380.799.309			
	A. APBD MURNI	3.380.799.309			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD				
	A. CSR	0			
	APBN	0			
	B. APBN - DEKOSENTRASI	0			
	C. APBN -TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025, 2006

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan Pegawai di Dinas Sosial Sebanyak 59 orang dan mitra kerja sebanyak 702 Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. **ASN sebanyak 59 orang terdiri dari :**

Tabel 4.32
Jumlah ASN Dinas Sosial

Unit	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala Dinas	-	-	1	1
Sekretaris	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	-	4	4
Kepala Sub Bagian	-	-	1	1
Kepala UPT Rehabilitasi PMKS	-	1	-	1
Kepala Sub Bagian TU UPT Rehabilitasi PMKS	-	1	-	1
Kelompok Fungsional	-	13	2	15
Pelaksana PNS	2	4	-	11
PPPK	-	-	-	17
PPPK Paruh Waktu	-	-	-	14
Jumlah	2	18	8	59

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025, 2006

2. **Mitra Dinas Sosial 702 Orang terdiri dari :**

- Pendamping PKH di 29 kecamatan sebanyak 162 orang yang aktif;
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 29 orang;
- Karang Taruna 302 orang;
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 117 orang;
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 826 orang;
- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 122 LKS.

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.33
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial

Tahapan SPM	Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data (Dinas Sosial belum mempunyai SDM Statistisi)	Memasukkan data peta jabatan terkait kebutuhan SDM Statistisi
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis data dan kesenjangan yang meliputi data sarana prasarana (Dinas Sosial JFT baik Penyuluh Sosial maupun Pekerja Sosial belum semua jenjang jabatannya ada, baru ada jenjang jabatan muda dan pertama)	Menghitung kebutuhan JFT Penyuluh Sosial dan pekerja sosial untuk setiap jenjang jabatan
Penyusunan dan Penganggaran	Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program, kegiatan, dan Sub kegiatan SPM tidak dapat di akomodir	Mengusulkan anggaran ke TAPD untuk pemenuhan semua indikator SPM
Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	Masih kurangnya personal (karena belum memiliki JFT Statisti dan JFT Peksos maupun Pensos belum terisi semua jenjang jabatannya sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan SPM belum ada yang khusus menangani Dinas Sosial hanya memiliki 1 unit dapur umum sehingga apabila terjadi bencana di 2 lokasi pada waktu yang bersamaan kesulitan untuk menjangkau kebutuhan korban bencana	Mengusulkan semua kebutuhan JFT berikut jenjang jabatannya dan berkoordinasi dengan Kemensos RI untuk mendapat rekomendasi Mengusulkan kepada TAPD untuk pengadaan kendaraan dapur umum

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025, 2006

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial disajikan dalam lampiran sebagai berikut : *(data seluruhnya diambil dari aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri)*

Tabel 4.34
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								563,556,368,991	532,083,297,033	94.42 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						9,699,261,036	8,952,749,096	92.30 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	1,661,457,422	1,469,248,000	88.43 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	3,014,064,000	3,006,114,000	99.74 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	209,336,000	204,900,000	97.88 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	1,359,178,614	1,173,089,200	86.31 %	
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00 %	
Kekhususan PAUD											

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	0	0	0.00 %	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	1,007,943,600	769,653,496	76.36 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	86,700,000	82,900,000	95.62 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	1,798,961,400	1,696,219,400	94.29 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	101,180,000	99,060,000	97.90 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	137,240,000	134,940,000	98.32 %	
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	185,550,000	180,050,000	97.04 %	
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	52,500,000	52,100,000	99.24 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	85,150,000	84,475,000	99.21 %	
JUMLAH INDIKATOR					9,699,261,036	8,952,749,096	92.30 %				

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						283,807,995,745	272,401,648,100	95.98 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	12,367,779,190	11,654,906,000	94.24 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	14,384,487,810	8,682,684,000	60.36 %	
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	83,881,200	83,808,000	99.91 %	
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	69,215,503,908	66,512,920,600	96.10 %	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	58,321,003,837	58,025,017,700	99.49 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	58,572,462,400	58,502,535,400	99.88 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	373,836,000	364,920,000	97.61 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	367,584,000	363,863,400	98.99 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	192,572,000	190,948,000	99.16 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	55,500,000	54,900,000	98.92 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	201,480,000	194,538,600	96.55 %	
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	199,880,000	198,788,000	99.45 %	
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	255,140,000	251,330,000	98.51 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	58,572,462,400	58,502,535,400	99.88 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	373,836,000	364,920,000	97.61 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	367,584,000	363,863,400	98.99 %	
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	55,500,000	54,900,000	98.92 %	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	201,480,000	194,538,600	96.55 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	255,140,000	251,330,000	98.51 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	192,572,000	190,948,000	99.16 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	199,880,000	198,788,000	99.45 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	192,572,000	190,948,000	99.16 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	199,880,000	198,788,000	99.45 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	2,302,508,000	1,724,250,000	74.89 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	304,517,000	285,569,000	93.78 %	
Kebhinekaan											

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	192,572,000	190,948,000	99.16 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	199,880,000	198,788,000	99.45 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	2,302,508,000	1,724,250,000	74.89 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	304,517,000	285,569,000	93.78 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	192,572,000	190,948,000	99.16 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	199,880,000	198,788,000	99.45 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	2,302,508,000	1,724,250,000	74.89 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	304,517,000	285,569,000	93.78 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
	JUMLAH INDIKATOR				283,807,995,745	272,401,648,100	95.98 %				
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						196,245,416,000	179,620,456,100	91.53 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	9,988,876,000	9,751,880,500	97.63 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	14,339,887,000	11,469,059,800	79.98 %	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	33,046,500,000	21,393,400,000	64.74 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	47,100,000	35,180,000	74.69 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	30,046,714,000	29,235,461,800	97.30 %	
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	19,513,941,000	19,335,153,250	99.08 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	254,669,000	245,560,000	96.42 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	2,850,000,000	2,850,000,000	100.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	76,810,000	76,750,000	99.92 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	306,820,000	269,540,000	87.85 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	100,266,400	94,610,000	94.36 %	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	715,425,200	691,060,500	96.59 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	160,390,500	157,743,000	98.35 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	19,513,941,000	19,335,153,250	99.08 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	254,669,000	245,560,000	96.42 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	2,850,000,000	2,850,000,000	100.00 %	
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	100,266,400	94,610,000	94.36 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	306,820,000	269,540,000	87.85 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	715,425,200	691,060,500	96.59 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	0	0	0.00 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	76,810,000	76,750,000	99.92 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	160,390,500	157,743,000	98.35 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	76,810,000	76,750,000	99.92 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	160,390,500	157,743,000	98.35 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	19,869,171,100	19,700,420,500	99.15 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	166,860,000	163,300,000	97.87 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	76,810,000	76,750,000	99.92 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	160,390,500	157,743,000	98.35 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	19,869,171,100	19,700,420,500	99.15 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	166,860,000	163,300,000	97.87 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	76,810,000	76,750,000	99.92 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	160,390,500	157,743,000	98.35 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	19,869,171,100	19,700,420,500	99.15 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	166,860,000	163,300,000	97.87 %	
	JUMLAH INDIKATOR				196,245,416,000	179,620,456,100	91.53 %				
	4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437						594,802,730	593,661,890	99.81 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	545,863,030	545,282,190	99.89 %	
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	48,939,700	48,379,700	98.86 %	
	JUMLAH INDIKATOR				594,802,730	593,661,890	99.81 %				

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842						0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				
	JUMLAH PROGRAM				490,347,475,511	461,568,515,186	94.13 %				
KEGIATAN LAINNYA											
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							69,373,012,920	66,866,304,557	96%	
	1	Literasi									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LITERASI LAINYA											
	2	Numerasi									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN NUMERASI LAINYA											
	3	Inklusifitas									

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1.						138,306,000	137,331,600	99.30 %	
		2.						73,529,960	54,342,000	73.90 %	
	4	Kebhinekaan									
		1.						2,161,648,900	2,016,087,000	93.27 %	
		2.						1,462,395,700	1,440,716,690	98.52 %	
	5	Keamanan									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEAMANAN LAINYA											
	1.	4 2025 Pengadaan Mebel Sekolah SD 1182653						7,117,115,000.00	6,831,545,034.00	95.99 %	
	2.	4 2025 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1182657						20,478,856,000.00	20,353,200,000.00	99.39 %	
	3.	4 2025 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP 1182660						853,170,000.00	825,450,000.00	96.75 %	
	4.	4 2025 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD 1182661						7,954,074,300.00	7,761,206,200.00	97.58 %	
	5.	4 2025 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP 1182662						11,788,694,650.00	11,469,059,800.00	97.29 %	
	6.	4 2025 Pengadaan Mebel Sekolah SMP 1182663						6,391,150,000.00	6,231,911,850.00	97.51 %	
	7.	4 2025 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1182665						3,680,470,000.00	3,600,000,000.00	97.81 %	
	8.	4 2025 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1182667						4,950,705,920.00	4,614,719,133.00	93.21 %	
	9.	4 2025 Pengadaan Mebel PAUD 1182668						548,872,000.00	534,176,400.00	97.32 %	
	10.	4 2025 Pengadaan Perlengkapan PAUD 1182669						261,358,600.00	238,121,640.00	91.11 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	11.	4 2025 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 1182670						313,500,000.00	297,000,000.00	94.74 %	
	12.	4 2025 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1182671						631,438,000.00	569,478,000.00	90.19 %	
	13.	4 2025 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1182672						2,059,790,000.00	2,033,470,000.00	98.72 %	
	14.	4 2025 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 1182673						57,000,000.00	57,000,000.00	100.00 %	
	15.	4 2025 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1182674						528,085,000.00	512,085,000.00	96.97 %	
	16.	4 2025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1182675						128,800,000.00	59,100,000.00	45.89 %	
	17.	4 2025 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1182676						317,348,300.00	127,900,000.00	40.30 %	
	18.	4 2025 Rehab sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah 1182677						816,870,000.00	306,375,000.00	37.51 %	
	19.	4 2025 Penyusunan Model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 1182679						250,473,000.00	224,363,000.00	89.58 %	
	20.	4 2025 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 1182681						58,396,200.00	57,742,000.00	98.88 %	
	21.	4 2025 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat 1182682						59,989,500.00	47,989,500.00	80.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	22.	4 2025 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 1182683						52,024,000.00	45,624,000.00	87.70 %	
	23.	4 2025 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat 1182684						52,064,450.00	46,020,000.00	88.39 %	
	24.	4 2025 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat 1182685						22,768,000.00	22,768,000.00	100.00 %	

Tabel 4.35
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. TANGERANG				35,878,346,470	34,418,817,657	95.93 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5,755,087,000	5,448,925,283	94.68 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			5,755,087,000	5,448,925,283	94.68 %
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	748,242,000	604,635,391	80.81 %
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	105,989,000	103,901,000	98.03 %
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	116,412,000	112,412,000	96.56 %
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	135,760,000	135,473,880	99.79 %
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	991,885,000	989,204,832	99.73 %
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	442,442,200	438,867,580	99.19 %
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	609,422,000	591,986,000	97.14 %
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	127,478,400	115,776,000	90.82 %
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	491,544,000	491,011,100	99.89 %
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	227,472,000	219,072,000	96.31 %
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	492,958,400	407,399,000	82.64 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	1,265,482,000	1,239,186,500	97.92 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,755,087,000	5,448,925,283	94.68 %
	JUMLAH PROGRAM				5,755,087,000	5,448,925,283	94.68 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		7,467,217,500	7,456,717,500	99.86 %
		2.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		22,656,041,970	21,513,174,874	94.96 %

Tabel 4.36
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. TANGERANG				141,770,764,271	139,482,093,644	98.39 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				122,290,606,730	120,447,538,491	98.49 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			122,290,606,730	120,447,538,491	98.49 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	118,324,608,130	117,244,068,333	99.09 %
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	97,207,500	95,504,930	98.25 %
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	3,868,791,100	3,107,965,228	80.33 %
	1.03.03.2.01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				122,290,606,730	120,447,538,491	98.49 %
	JUMLAH PROGRAM				122,290,606,730	120,447,538,491	98.49 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				19,480,157,541	19,034,555,153	97.71 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			19,480,157,541	19,034,555,153	97.71 %
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	3,037,515,900	2,707,533,183	89.14 %
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	3,280,714,304	3,169,152,970	96.60 %
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	13,161,927,337	13,157,869,000	99.97 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				19,480,157,541	19,034,555,153	97.71 %
	JUMLAH PROGRAM				19,480,157,541	19,034,555,153	97.71 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Tabel 4.37
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. TANGERANG				854,857,000	853,681,950	99.86 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				854,857,000	853,681,950	99.86 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			354,857,000	353,681,950	99.67 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	354,857,000	353,681,950	99.67 %
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				354,857,000	353,681,950	99.67 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			500,000,000	500,000,000	100.00 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	500,000,000	500,000,000	100.00 %
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				500,000,000	500,000,000	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				854,857,000	853,681,950	99.86 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Tabel 4.38
Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. TANGERANG				17,021,056,450	16,635,374,068	97.73 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				6,487,452,900	6,288,942,847	96.94 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			5,829,657,750	5,655,300,997	97.01 %
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	<u>1,057,750,550</u>	<u>1,045,423,044</u>	98.83 %
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	<u>204,317,700</u>	<u>202,082,700</u>	98.91 %
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	<u>833,440,500</u>	<u>802,013,900</u>	96.23 %
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	<u>37,927,450</u>	<u>36,821,950</u>	97.09 %
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	<u>131,305,150</u>	<u>129,285,150</u>	98.46 %
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	<u>0</u>	<u>0</u>	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1,612,357,000	1,594,560,200	98.90 %
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	954,448,400	877,333,200	91.92 %
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	25,000,000	0	0%
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	973,111,000	967,780,853	99.45 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,829,657,750	5,655,300,997	97.01 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			510,124,700	501,506,900	98.31 %
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	297,369,850	290,200,000	97.59 %
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	47,840,100	47,578,000	99.45 %
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	164,914,750	163,728,900	99.28 %
	JUMLAH INDIKATOR				510,124,700	501,506,900	98.31 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			147,670,450	132,134,950	89.48 %
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	147,670,450	132,134,950	89.48 %
	JUMLAH INDIKATOR				147,670,450	132,134,950	89.48 %
	JUMLAH PROGRAM				6,487,452,900	6,288,942,847	96.94 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				2,172,723,550	2,111,007,339	97.16 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			162,603,800	152,008,700	93.48 %
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	94,689,500	94,540,000	99.84 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	67,914,300	57,468,700	84.62 %
	JUMLAH INDIKATOR				162,603,800	152,008,700	93.48 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			837,172,850	826,229,364	98.69 %
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	127,253,500	127,225,000	99.98 %
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	38,613,750	37,972,500	98.34 %
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	275,708,000	268,358,300	97.33 %
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	174,912,400	173,523,564	99.21 %
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	51,454,700	50,905,000	98.93 %
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	66,761,000	66,010,000	98.88 %
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	83,075,000	82,950,000	99.85 %
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	19,394,500	19,285,000	99.44 %
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				837,172,850	826,229,364	98.69 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			997,130,000	959,184,900	96.19 %
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	9,708,000	3,025,000	31.16 %
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	76,458,000	67,849,500	88.74 %
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	910,964,000	888,310,400	97.51 %
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH INDIKATOR				997,130,000	959,184,900	96.19 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			175,816,900	173,584,375	98.73 %
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	13,077,500	13,055,000	99.83 %
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	66,487,500	66,216,375	99.59 %
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	55,019,500	54,651,000	99.33 %
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	24,804,500	23,310,000	93.97 %
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	16,427,900	16,352,000	99.54 %
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				175,816,900	173,584,375	98.73 %
	JUMLAH PROGRAM				2,172,723,550	2,111,007,339	97.16 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				8,360,880,000	8,235,423,882	98.50 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			8,187,582,000	8,067,408,190	98.53 %
	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22,152,000	22,142,000	99.95 %
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	16,868,000	16,810,000	99.66 %
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	919,018,000	918,543,000	99.95 %
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	182,385,000	140,000,000	76.76 %
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	249,647,000	233,486,000	93.53 %
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	6,793,718,000	6,732,633,190	99.10 %
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	3,794,000	3,794,000	100.00 %
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				8,187,582,000	8,067,408,190	98.53 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			26,172,500	26,122,500	99.81 %
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	18,840,000	18,790,000	99.73 %
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	7,332,500	7,332,500	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				26,172,500	26,122,500	99.81 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			14,670,000	9,918,000	67.61 %
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	14,670,000	9,918,000	67.61 %
	JUMLAH INDIKATOR				14,670,000	9,918,000	67.61 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			104,424,000	104,208,192	99.79 %
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	19,179,000	19,019,000	99.17 %
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	71,765,000	71,709,192	99.92 %
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	13,480,000	13,480,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				104,424,000	104,208,192	99.79 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			28,031,500	27,767,000	99.06 %
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	28,031,500	27,767,000	99.06 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	_____0	_____0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				28,031,500	27,767,000	99.06 %
	JUMLAH PROGRAM				8,360,880,000	8,235,423,882	98.50 %
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Tabel 4.39
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. TANGERANG				3,380,799,308	3,304,521,198	97.74 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3,380,799,308	3,304,521,198	97.74 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			2,393,518,308	2,337,861,939	97.67 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanaan	Orang	340,058,500	338,813,500	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	177,349,000	176,751,500	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	751,852,000	734,938,000	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	204,497,600	192,754,600	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	549,759,208	539,020,539	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	146,215,200	145,841,000	0%
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	9,518,800	9,018,800	0%
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	22,163,400	21,663,400	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	10,328,800	9,828,800	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	134,937,000	122,893,000	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	38,400,000	38,400,000	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	<u>8,438,800</u>	<u>7,938,800</u>	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,393,518,308	2,337,861,939	97.67 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			987,281,000	966,659,259	97.91 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	<u>701,983,000</u>	<u>685,361,259</u>	97.63 %
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	<u>249,800,000</u>	<u>247,400,000</u>	99.04 %
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	<u>6,260,000</u>	<u>4,660,000</u>	74.44 %
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	<u>18,446,000</u>	<u>18,446,000</u>	100.00 %
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	<u>10,792,000</u>	<u>10,792,000</u>	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				987,281,000	966,659,259	97.91 %
	JUMLAH PROGRAM				3,380,799,308	3,304,521,198	97.74 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan isi Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah disajikan dalam bab per bab sebelumnya, berikut adalah ringkasan yang dapat menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

5.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2024 mencapai 76,19 dan naik pada tahun 2025 menjadi 76,74

2. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024 mencapai 6,55 % dan turun pada tahun 2025 menjadi 6,42 %.

3. Angka Pengangguran

Pada tahun 2024 mencapai 6,06 % dan turun pada tahun 2025 menjadi 5,94 %.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024 mencapai 5% dan naik pada tahun 2025 menjadi 5,67 %.

5. Pendapatan Perkapita

Pada tahun 2024 mencapai Rp.55.170.000,00 dan naik pada tahun 2025 menjadi Rp.56.840.000,00

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pada tahun 2024 mencapai 0,27 dan turun pada tahun 2025 menjadi 0,26

5.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tangerang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

5.3 CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaian 103,96 %
2. Indeks Pendidikan capaian 94,77 %
3. Indeks Kesehatan capaian 99,52 %

4. Indeks Pembangunan Pemuda capaian 108,49 %
5. Indeks Pemberdayaan Pemberdayaan Gender capaian 108,39 %
6. Laju Pertumbuhan Penduduk capaian 95,83 %
7. Indeks kesalehan Sosial capaian 108,86 %
8. Indeks ketentraman dan ketertiban capaian 100 %
9. Laju pertumbuhan ekonomi capaian 106,38 %
10. Tingkat pengangguran terbuka capaian 123,91 %
11. Presentase penduduk miskin capaian 89,4 %
12. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan capaian 333,62 %
13. Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN) capaian 843,74 %
14. Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal capaian 100 %
15. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan capaian 135,29 %
16. Indeks Desa Membangun capaian 100 %
17. Indeks Ketahanan Pangan capaian 101,78 %
18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 97,66 %
19. Persentase PPKS yang Berdaya capaian 100 %
20. Indeks Reformasi Birokrasi capaian 130,09 %
21. Nilai SAKIP capaian 99,83 %
22. Nilai Indeks Kemnadirian Fisikal capaian 115,24 %
23. Opini BPK capaian 100 %
24. Indeks Profesionalitas ASN capaian 111,53 %
25. Maturitas SPIP Terintegrasi capaian 86,67 %
26. Indeks SPBE capaian 122,57 %
27. Indeks Pelayanan Publik capaian 98,14 %
28. Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur capaian 92,83 %
29. Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik capain 102,11 %
30. Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW capaian 104,95 %
31. Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak capaian 100,33 %
32. Rasio Konektivitas Kabupaten capaian 72,29 %
33. Indeks kualitas lingkungan Hidup capaian 105,78 %
34. Indeks resiko bencana (IRBI) capaian 91,84 %

5.4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan, baik berupa tugas pembantuan yang diberikan maupun tugas pembantuan yang diterima.

5.5 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Pendidikan dasar capaian kinerjanya sebesar 96,53 %;
2. Pendidikan kesetaraan capaian kinerjanya sebesar 97,82%;
3. Pendidikan anak usia dini capaian kinerjanya sebesar 87,36%;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil capaian kinerjanya sebesar 100%;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin capaian kinerjanya sebesar 100%;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir capaian kinerjanya sebesar 100%;
7. Pelayanan kesehatan balita capaian kinerjanya sebesar 100%;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar capaian kinerjanya sebesar 100%;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif capaian kinerjanya sebesar 99,36%;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut capaian kinerjanya sebesar 99,45%;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi capaian kinerjanya sebesar 98,24%;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus capaian kinerjanya sebesar 100%;
13. Pelayanan kesehatan ODGJ berat capaian kinerjanya sebesar 99,58%;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis capaian kinerjanya sebesar 99,88%;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) capaian kinerjanya sebesar 100%
16. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari capaian kinerjanya sebesar 100%;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik capaian kinerjanya sebesar 94,67%;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota capaian kinerjanya sebesar 100%;

19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerjanya sebesar 100%;
20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi capaian kinerjanya sebesar 100%
21. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu capaian kinerjanya sebesar 100%
22. Pelayanan informasi rawan bencana capaian kinerjanya sebesar 95,50%;
23. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaian kinerjanya sebesar 100%;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana capaian kinerjanya sebesar 95%;
25. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran capaian kinerjanya sebesar 100%;
26. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial capaian kinerjanya sebesar 100%;
27. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial capaian kinerjanya sebesar 100%;
28. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial capaian kinerjanya sebesar 100%;
29. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial capaian kinerjanya sebesar 100%;
30. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota capaian kinerjanya sebesar 100 %;

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tangerang.